



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Jalan RTA. Milono No.09 Telp./Fax. (0536) 3221854 Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

Palangkaraya, Januari 2020



H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya



ROKI PANJAITAN, S.H.
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya



KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.

Mengawali karier sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Dompu tahun 1986, Bapak H. Mochamad Hatta, S.H., M.H. lahir di Pekalongan pada 11 Mei 1959. Memperoleh gelar Magister di bidang hukum pada tahun 2006 di Universitas Krisnadwipayana.

Dibawah kepemimpinan beliau, Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah mencapai beberapa prestasi, yaitu :

1. PT Palangkaraya berhasil mempertahankan nilai "A" untuk Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum.
2. PT Palangkaraya memperoleh penghargaan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai "Produsen Data Tingkat Daerah Terbaik III".
3. PN Sampit memperoleh predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi" (WBK) dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
4. PN Pangkalan Bun memperoleh penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalan Bun sebagai Satuan Kerja Dengan Kinerja Pengelolaan Keuangan Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2019 Lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. PN Pangkalan Bun memperoleh penghargaan terbaik II dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk periode Semester I Tahun Anggaran 2019 dengan klasifikasi pagu kecil lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai 100 (Sangat Baik).
6. PN Pangkalan Bun memperoleh penghargaan terbaik IV dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk periode Semester II Tahun Anggaran 2019 dengan klasifikasi pagu kecil lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai 99,51 (Sangat Baik).
7. PN Kuala Kurun, satuan kerja yang baru berdiri dan yang diresmikan pada akhir tahun 2018, berhasil memperoleh nilai "A" untuk Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum.



Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin-Nya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Palangka Raya dapat diselesaikan. Tujuan dari pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya kepada Ketua Mahkamah Agung RI dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2019.

Pelaksanaan kegiatan baik yang berkaitan dengan tugas pokok maupun pendukung Tahun Anggaran 2019 diuraikan jelas pada laporan ini yang terdiri dari Pendahuluan, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan Sarana dan Prasarana serta TI, Peningkatan Pelayanan Publik, Pengawasan dan Penutup.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 dan menjadi bahan perbaikan untuk yang akan datang.

Selaku Pimpinan di Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah atas pengabdian terbaik yang telah ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selama ini. Semoga semua kerja keras kita dalam rangka mengemban visi dan misi Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI dapat memulihkan kembali kepercayaan masyarakat kepada Lembaga peradilan yang menjadi dambaan kita Bersama

Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Mochamad Hatta

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
BAB II	TUGAS DAN FUNGI.....	8
	A. Keadaan Perkara.....	8
	B. Penyelesaian Perkara.....	13
	C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan).....	16
	- Posbakum	16
	- Sidang Keliling.....	17
	- Perkara Prodeo	19
BAB III	SUMBER DAYA MANUSIA.....	20
BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TI.....	69
	A. Pengelolaan Keuangan.....	69
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	78
	C. Pengelolaan TI.....	159
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	163
	A. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	163
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	164
	C. Inovasi Pelayanan Publik.....	170
BAB VI	PENGAWASAN.....	178
	A. Internal.....	178
	B. Evaluasi.....	182
BAB VII	PENUTUP.....	183
	A. Kesimpulan.....	183
	B. Rekomendasi	183

BAB I

PENDAHULUAN





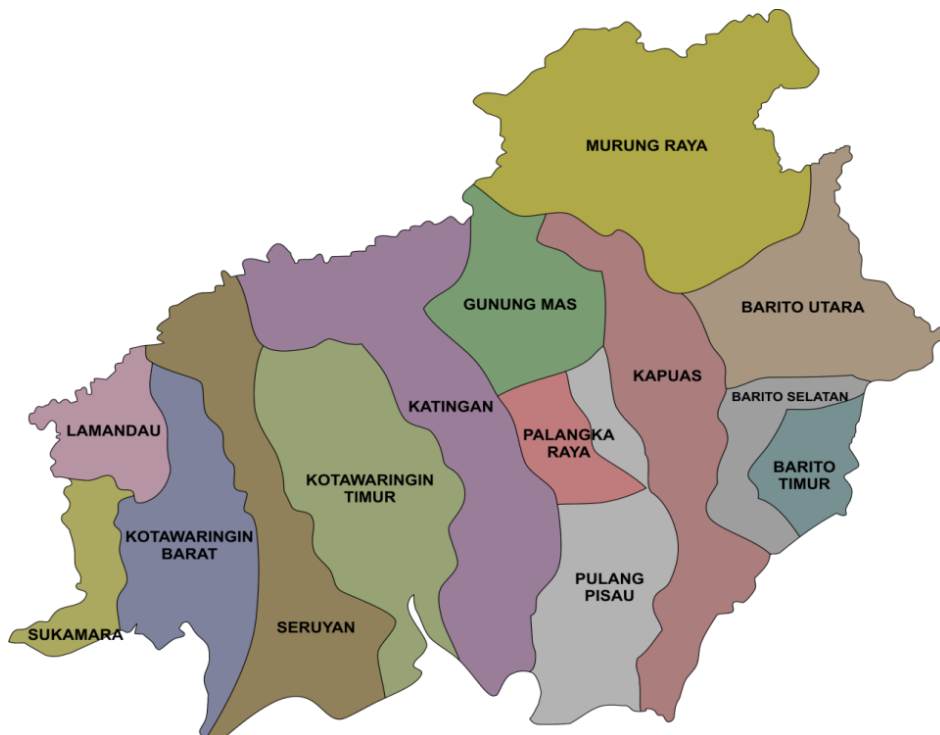
BAB I

PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Tengah dengan hari jadi 23 Mei 1957 merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan (Indonesia) yang pada era awal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Kalimantan hanya ada satu Provinsi. Gubernur Kalimantan pertama bernama Ir. Pangeran Muhammad Nur (1950), kedua bernama Dr. Murjani (1953) dan ketiga bernama RTA Milono (1956).

Setelah masa jabatan RTA Milono, Kalimantan dimekarkan menjadi 4 (empat) Provinsi, yaitu :

1. Kalimantan Barat dengan Gubernur R.A. Afflus.
2. Kalimantan Selatan dengan Gubernur Sarkawi.
3. Kalimantan Timur dengan Gubernur A.P.T. Pranoto.
4. Kalimantan Tengah (tahun 1957-1958 masih dalam tahap persiapan pembentukan Provinsi) dengan Gubernur R.T.A. Milono yang berkantor di Kalimantan Selatan dan saat yang sama Tjilik Riwut yang kemudian sejak tahun 1958 menjadi Gubernur Kalimantan Tengah definitif.



Peta Provinsi Kalimantan Tengah
Luas 157.983 m²

Sampai saat ini, Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yaitu:

No.	Nama Kabupaten/Kota	Pusat Pemerintahan
1.	Kabupaten Barito Selatan	Buntok
2.	Kabupaten Barito Timur	Tamiyang Layang
3.	Kabupaten Barito Utara	Muara Teweh
4.	Kabupaten Gunung Mas	Kuala Kurun
5.	Kabupaten Kapuas	Kuala Kapuas
6.	Kabupaten Katingan	Kasongan
7.	Kabupaten Kotawaringin Barat	Pangkalan Bun
8.	Kabupaten Kotawaringin Timur	Sampit
9.	Kabupaten Lumandau	Nanga Bulik
10.	Kabupaten Murung Raya	Puruk Cahu
11.	Kabupaten Pulang Pisau	Pulang Pisau
12.	Kabupaten Sukamara	Suka Mara
13.	Kabupaten Seruyan	Kuala Pembuang
14.	Kota Palangka Raya	Palangka Raya

A. SEJARAH PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Sebelum terbentuknya Pengadilan Tinggi Palangka Raya, 6 (enam) Pengadilan Negeri di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin, 6 (enam) Pengadilan Negeri dimaksud yaitu :

1. Pengadilan Negeri Palangka Raya;
2. Pengadilan Negeri Sampit;
3. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
4. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;
5. Pengadilan Negeri Muara Teweh, dan
6. Pengadilan Negeri Buntok.

Pada tanggal 29 Juli 1980 dibentuklah Pengadilan Tinggi Palangka Raya di Palangka Raya berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan wilayah hukum meliputi Provinsi Kalimantan Tengah.

Gedung Pengadilan Tinggi Palangka Raya dibangun dengan biaya/dana dari DIP 1979/1980 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), konstruksi bangunan dirancang oleh Direktorat Jenderal Peradilan Umum Departemen Kehakiman R.I.

Pembangunan dimulai pada tanggal 10 Desember 1979 dan selesai tanggal 8 Maret 1981. Kemudian pada tanggal 17 September 1981 diresmikan penggunaannya oleh bapak Soeroto, S.E., Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mewakili Menteri Kehakiman R.I.

Pada tanggal 12 Desember 2006 dibentuklah Pengadilan Negeri Tamiang Layang di Tamiang Layang berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan **Pengadilan Negeri Tamiang Layang** Dan Pengadilan Negeri Batu Licin.

Kemudian pada tanggal 26 Januari 2008 dibentuk Pengadilan Negeri Kasongan di Kasongan berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Masamba, Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagar Alam, **Pengadilan Negeri Kasongan**, Pengadilan Negeri Pangsi, Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Pengadilan Negeri Amurang, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Tuber, dan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (*Access to Justice*), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Meloungane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3 (tiga) Mahkamah Syar'iyah serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang baru dibentuk tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan berada di ibukota kabupaten dan Kotamadya, sementara Pengadilan Tata usaha Negara berada di Ibukota Propinsi. Dibentuknya pengadilan baru, daerah-daerah yang awalnya secara geografis berada sangat jauh dari kantor pengadilan karena berada di wilayah ibukota kabupaten yang dimekarkan sehingga menyulitkan masyarakat pencari keadilan, saat ini sudah tidak lagi menjadi kendala utama. Selain itu, masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya yang besar untuk menuju ke pengadilan karena waktu tempuh menjadi relatif singkat.

Dari 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri yang diresmikan, ada 3 (tiga) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yaitu:

1. Pengadilan Negeri Kuala Kurun
2. Pengadilan Negeri Nanga Bulik
3. Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Sehingga sampai dengan sekarang 31 Desember 2019 Pengadilan Tinggi Palangka Raya membawahi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri, yaitu :

No.	Nama	Wilayah Hukum
1	Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas I A	Kota Palangka Raya
2	Pengadilan Negeri Sampit Kelas I B	Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan
3	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B	Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara
4	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II	Kabupaten Kuala Kapuas
5	Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II	Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya
6	Pengadilan Negeri Buntok Kelas II	Kabupaten Barito Selatan
7	Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II	Kabupaten Barito Timur
8	Pengadilan Negeri Kasongan Kelas II	Kabupaten Katingan
9	Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II	Kabupaten Gunung Mas
10	Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II	Kabupaten Lamandau
11	Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II	Kabupaten Pulang Pisau

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung R.I. selaku salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dalam pasal 51 menyatakan:

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding.
2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. **Fungsi Mengadili (*judicialpower*)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkarayangmenjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.”
- b. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan ditingkat

Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

d. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

e. Fungsi Lainnya :

- 1) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/199).
- 2) Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

C. VISI PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, serta menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Sejalan dengan tujuan dan keinginan sebagaimana telah diuraikan dalam kebijakan umum peradilan yang ada di Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagaimana diuraikan dalam Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan sebuah pedoman/arah pendekatan yang akan ditempuh.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahanstrategis yang dihadapi dan mengacu kepada Reviu Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2019, Pengadilan Tinggi Palangka Raya menetapkan visinya yang dirumuskan sebagai berikut:



*Terwujudnya Pengadilan Tinggi Palangka Raya
yang Agung*

Penetapan visi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat dan fokus bagi Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam mencapai keberhasilan organisasi. Penetapan visi juga merupakan wujud komitmen Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan kepada *stakeholders* Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

D. MISI PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Palangka Raya menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- 1 Menjaga kemandirian badan peradilan
- 2 Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3 Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4 Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

E. MOTO PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

- C** • Cerdas melaksanakan tugas
- A** • Adil dalam berperilaku
- N** • Nyaman dalam bekerja
- T** • Tangkas dalam Melayani
- I** • Independen dari segala pengaruh
- K** • Komitmen dalam penegakan hukum

Untuk mewujudkan visi, misi dan moto Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut, pimpinan selalu melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberdayakan para hakim pengawas bidang, sedangkan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, pimpinan menggariskan agar perkara yang masuk ditingkat banding harus sudah diputus paling lama 2 (dua) bulan setelah perkara masuk.

Pembinaan mental maupun spiritual bagi hakim dan pegawai juga dilakukan dengan sholat dzuhur dan Ashar berjama'ah, pengajian rutin bagi yang beragama Islam

juga kebaktian rutin setiap Jum'at pagi bagi yang beragama Nasrani, termasuk memperingati hari besar keagamaan.

Budaya disiplin diwujudkan dengan menyelenggarakan apel pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin dan apel sore dilaksanakan setiap hari Jum'at sedangkan untuk memupuk kerjasama diadakan senam bersama dan kerja bakti di lingkungan kantor.

Sebagai kepanjangan tangan Mahkamah Agung R.I., dilakukan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Negeri se Kalimantan Tengah dan setiap tahun Ketua mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi bagi hakim Pengadilan Negeri demi meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan para hakim.

Bahwa akhirnya dari kinerja tersebut, dilakukan audit dari Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada 11 sampai dengan 12 April 2017 dengan hasil terakreditasi "A". Kemudian pada 30 sampai dengan 31 Mei 2018 dilakukan surveilan dan hasilnya Pengadilan Tinggi Palangka Raya berhasil mempertahankan nilai akreditasinya yaitu "A". Di tahun 2019, surveilan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2019, dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Pengadilan Tinggi Palangka Raya berhasil mempertahankan hasil, yaitu "terakreditasi A".

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI





BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

A. KEADAAN PERKARA

1. Keadaan Perkara Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2019.

Keadaan penyelesaian perkara pidana, pidana anak, Tipikor dan perdata di Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2019 dijelaskan pada tabel berikut ini :

NO	PERKARA	JENIS PERKARA	SISA 2018	MASUK 2019	PUTUS 2019	CABUT 2019	SISA 2019
1	PIDANA	PIDANA	14	98	104	4	4
		PIDANA KHUSUS ANAK	-	2	2	-	-
		TINDAK PIDANA KORUPSI	-	8	7	-	1
2.	PERDATA	PERDATA	8	73	74	1	6

2. Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama se-Kalimantan Tengah

Keadaan penyelesaian perkara Pengadilan Negeri di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2019 dijelaskan pada tabel berikut ini :

a. Perkara Pidana Biasa

NO	NAMA PENGADILAN	SISA TAHUN 2018	MASUK 2019	PUTUS 2019	SISA 2019
1	PN. PALANGKA RAYA	70	513	517	66
2	PN. SAMPIT	89	501	436	154
3	PN. PANGKALAN BUN	62	338	354	46
4	PN. KUALA KAPUAS	48	280	286	42
5	PN. BUNTOK	3	104	107	0
6	PN. MUARA TEWEH	18	180	168	30
7	PN. TAMIANG LAYANG	38	142	164	16
8	PN. KASONGAN	13	144	142	15
9	PN. KUALA KURUN	0	72	70	2
10	PN. PULANG PISAU	8	120	124	4
11	PN. NANGA BULIK	5	81	75	11
J U M L A H		354	2.475	2.443	386

b. Perkara Pidana Singkat

NO	NAMA PENGADILAN	SISA TAHUN 2018	MASUK 2019	PUTUS 2019	SISA 2019
1	PN. PALANGKA RAYA	0	3	3	0
2	PN. SAMPIT	0	1	1	0
3	PN. PANGKALAN BUN	0	0	0	0
4	PN. KUALA KAPUAS	0	0	0	0
5	PN. BUNTOK	0	3	3	0
6	PN. MUARA TEWEH	0	1	1	0
7	PN. TAMIANG LAYANG	0	1	1	0
8	PN. KASONGAN	0	3	3	0
9	PN. KUALA KURUN	0	3	3	0
10	PN. PULANG PISAU	0	0	0	0
11	PN. NANGA BULIK	0	2	2	0
J U M L A H		0	17	17	0

c. Perkara Pidana Cepat

NO	NAMA PENGADILAN	SISA TAHUN 2018	MASUK 2019	PUTUS 2019	SISA 2019
1	PN. PALANGKA RAYA	0	58	58	0
2	PN. SAMPIT	0	2	2	0
3	PN. PANGKALAN BUN	0	31	31	0
4	PN. KUALA KAPUAS	0	14	14	0
5	PN. BUNTOK	0	0	0	0
6	PN. MUARA TEWEH	0	3	3	0
7	PN. TAMIANG LAYANG	0	2	2	0
8	PN. KASONGAN	0	5	5	0
9	PN. KUALA KURUN	0	2	2	0
10	PN. PULANG PISAU	0	8	8	0
11	PN. NANGA BULIK	0	6	6	0
J U M L A H		0	131	131	0

d. Perkara Pidana Lalu Lintas

NO	NAMA PENGADILAN	SISA TAHUN 2018	MASUK 2019	PUTUS 2019	SISA 2019
1	PN. PALANGKA RAYA	0	5791	5791	0
2	PN. SAMPIT	0	7308	7308	0
3	PN. PANGKALAN BUN	0	5380	5380	0
4	PN. KUALA KAPUAS	0	3343	3343	0
5	PN. BUNTOK	0	1030	1030	0
6	PN. MUARA TEWEH	0	2950	2950	0

NO	NAMA PENGADILAN	SISA TAHUN 2018	MASUK 2019	PUTUS 2019	SISA 2019
7	PN. TAMIANG LAYANG	0	2625	2625	0
8	PN. KASONGAN	0	3845	3845	0
9	PN. KUALA KURUN	0	1324	1324	0
10	PN. PULANG PISAU	0	2549	2549	0
11	PN. NANGA BULIK	0	1389	1389	0
J U M L A H		0	37534	37534	0

e. Perkara Pra Peradilan

NO	NAMA PENGADILAN	SISA TAHUN 2018	MASUK 2019	PUTUS 2019	SISA 2019
1	PN. PALANGKA RAYA	1	5	6	0
2	PN. SAMPIT	0	2	2	0
3	PN. PANGKALAN BUN	0	5	5	0
4	PN. KUALA KAPUAS	0	2	2	0
5	PN. BUNTOK	1	1	2	0
6	PN. MUARA TEWEH	0	0	0	0
7	PN. TAMIANG LAYANG	0	0	0	0
8	PN. KASONGAN	0	1	1	0
9	PN. KUALA KURUN	0	0	0	0
10	PN. PULANG PISAU	0	3	3	0
11	PN. NANGA BULIK	0	1	1	0
J U M L A H		2	20	22	0

f. Perkara Pidana Anak

NO	NAMA PENGADILAN	SISA TAHUN 2018	MASUK 2019	PUTUS 2019	SISA 2019
1	PN. PALANGKA RAYA	-	11	11	0
2	PN. SAMPIT	0	22	21	1
3	PN. PANGKALAN BUN	0	8	8	0
4	PN. KUALA KAPUAS	0	10	10	0
5	PN. BUNTOK	0	6	6	0
6	PN. MUARA TEWEH	0	9	9	0
7	PN. TAMIANG LAYANG	0	2	2	0
8	PN. KASONGAN	0	1	1	0
9	PN. KUALA KURUN	0	10	10	0
10	PN. PULANG PISAU	0	7	7	0
11	PN. NANGA BULIK	0	4	4	0
J U M L A H		0	90	89	1

g. Perkara Tindak Pidana Korupsi

NO	NAMA PENGADILAN	SISA TAHUN 2018	MASUK 2019	PUTUS 2019	SISA 2019
1	PN. PALANGKA RAYA	10	33	34	9

h. Perkara Perdata Gugatan

NO	NAMA PENGADILAN	SISA TAHUN 2018	MASUK 2019	PUTUS 2019	SISA 2019
1	PN. PALANGKA RAYA	52	218	217	53
2	PN. SAMPIT	20	49	30	39
3	PN. PANGKALAN BUN	12	34	39	7
4	PN. KUALA KAPUAS	21	19	35	5
5	PN. BUNTOK	1	24	25	0
6	PN. MUARA TEWEH	2	21	21	2
7	PN. TAMIANG LAYANG	5	35	31	9
8	PN. KASONGAN	4	33	29	8
9	PN. KUALA KURUN	3	22	18	7
10	PN. PULANG PISAU	0	24	12	12
11	PN. NANGA BULIK	2	27	23	6
J U M L A H		122	506	480	148

i. Perkara Perdata Permohonan

NO	NAMA PENGADILAN	SISA TAHUN 2018	MASUK 2019	PUTUS 2019	SISA 2019
1	PN. PALANGKA RAYA	1	100	99	2
2	PN. SAMPIT	0	641	640	1
3	PN. PANGKALAN BUN	2	85	87	0
4	PN. KUALA KAPUAS	0	6	5	1
5	PN. BUNTOK	0	22	22	0
6	PN. MUARA TEWEH	0	16	16	0
7	PN. TAMIANG LAYANG	0	9	9	0
8	PN. KASONGAN	1	17	18	0
9	PN. KUALA KURUN	0	1	1	0
10	PN. PULANG PISAU	0	5	5	0
11	PN. NANGA BULIK	2	81	83	0
J U M L A H		6	983	985	4

j. Perkara Perdata Gugatan Sederhana

NO	NAMA PENGADILAN	SISA TAHUN 2018	MASUK 2019	PUTUS 2019	SISA 2019
1	PN. PALANGKA RAYA	6	16	21	1
2	PN. SAMPIT	0	13	13	0
3	PN. PANGKALAN BUN	0	3	3	0
4	PN. KUALA KAPUAS	0	1	1	0
5	PN. BUNTOK	0	0	0	0
6	PN. MUARA TEWEH	1	1	2	0
7	PN. TAMIANG LAYANG	0	1	1	0
8	PN. KASONGAN	0	0	0	0
9	PN. KUALA KURUN	0	0	0	0
10	PN. PULANG PISAU	0	0	0	0
11	PN. NANGA BULIK	0	0	0	0
J U M L A H		7	35	41	1

k. Perkara Pengadilan Hubungan Industrial

NO	NAMA PENGADILAN	SISA TAHUN 2018	MASUK 2019	PUTUS 2019	SISA 2019
1	PN. PALANGKA RAYA	3	16	16	3

3. Keadaan Perkara Tingkat Banding Tahun 2019

NO	NAMA PENGADILAN	PERDATA GUGATAN	PIDANA BIASA	PIDANA ANAK	TIPIKOR
1	PN. PALANGKA RAYA	24	26	-	8
2	PN. SAMPIT	13	15	-	-
3	PN. PANGKALAN BUN	7	26	-	-
4	PN. KUALA KAPUAS	15	8	-	-
5	PN. BUNTOK	3	6	-	-
6	PN. MUARA TEWEH	1	3	1	-
7	PN. TAMIANG LAYANG	1	3	-	-
8	PN. KASONGAN	6	3	-	-
9	PN. KUALA KURUN	1	1	-	-
10	PN. PULANG PISAU	1	6	1	-
11	PN. NANGA BULIK	1	1	-	-
J U M L A H		73	98	2	8

4. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Tahun 2019.

NO	NAMA PENGADILAN	PERDATA GUGATAN	PIDANA BIASA	PIDANA ANAK	TIPIKOR
1	PN. PALANGKA RAYA	24	19	-	7
2	PN. SAMPIT	2	5	-	-
3	PN. PANGKALAN BUN	3	12	-	-
4	PN. KUALA KAPUAS	8	4	-	-
5	PN. BUNTOK	2	4	-	-
6	PN. MUARA TEWEH	2	3	1	-
7	PN. TAMIANG LAYANG	1	2	-	-
8	PN. KASONGAN	2	2	-	-
9	PN. KUALA KURUN	1	1	-	-
10	PN. PULANG PISAU	1	2	-	-
11	PN. NANGA BULIK	-	1	-	-
J U M L A H		49	64	1	7

5. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali Tahun 2019.

NO	NAMA PENGADILAN	PERDATA GUGATAN	PIDANA BIASA	PIDANA ANAK	TIPIKOR
1	PN. PALANGKA RAYA	1	-	-	2
2	PN. SAMPIT	-	-	-	-
3	PN. PANGKALAN BUN	1	-	-	-
4	PN. KUALA KAPUAS	1	-	-	-
5	PN. BUNTOK	-	-	-	-
6	PN. MUARA TEWEH	-	-	-	-
7	PN. TAMIANG LAYANG	-	-	-	-
8	PN. KASONGAN	2	-	-	-
9	PN. KUALA KURUN	-	-	-	-
10	PN. PULANG PISAU	-	-	-	-
11	PN. NANGA BULIK	-	-	-	-
J U M L A H		5	-	-	2

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus.

Jumlah seluruh sisa perkara yang diputus di tahun 2019 pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se Kalimantan Tengah dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PENGADILAN	JUMLAH SELURUH SISA PERKARA TAHUN 2019
1.	PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA	11
2	PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA	134
3	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	195
4	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	53

5	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	48
6	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	32
7	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	-
8	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	25
9	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	23
10	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	9
11	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	17
12	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	16
JUMLAH		563

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu.

Jumlah seluruh perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se Kalimantan Tengah dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PENGADILAN	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU TAHUN 2019
1.	PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA	187
2	PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA	6774
3	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	7770
4	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	509
5	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	3626
6	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	216
7	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	1183
8	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	126
9	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	198
10	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	1447
11	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	193
12	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	156
JUMLAH		22.385

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Pk.

Jumlah seluruh perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Se Kalimantan Tengah, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PENGADILAN	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN BANDING, KASASI, PK TAHUN 2019
1	PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA	668
2	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	452
3	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	352
4	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	295
5	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	188
6	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	123
7	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	190
8	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	157
9	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	94
10	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	132
11	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	99
JUMLAH		2750

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi.

Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi pada Pengadilan Negeri Se Kalimantan Tengah Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PENGADILAN	JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI 2019
1	PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA	4
2	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	5
3	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	3
4	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	10
5	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	2
6	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	0
7	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	0
8	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	1
9	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	0
10	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	0
11	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	1
JUMLAH		26

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi.

Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi pada Pengadilan Negeri Se Kalimantan Tengah Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PENGADILAN	JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI 2019
1	PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA	0
2	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	0
3	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	0
4	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	0
5	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	0
6	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	0
7	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	0
8	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	0
9	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	0
10	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	0
11	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	0
JUMLAH		0

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

1. POSBAKUM (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran).

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 27).

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Adapun jumlah alokasi dan realisasi anggaran untuk Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Se Kalimantan Tengah tahun 2019, adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PENGADILAN	JUMLAH ALOKASI DANA TAHUN 2019	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019
1	PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA	Rp. 48.000.000,-	Rp. 48.000.000,-
2	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-
3	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	Rp. 48.000.000,-	Rp. 48.000.000,-
4	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-
5	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-
6	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-
7	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-
8	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-
9	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-
10	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-
11	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-

2. SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran mewajibkan setiap Pengadilan Negeri untuk melakukan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten /Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Pengesahan Perkawinan bagi masyarakat beragama selain

Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri ini antara lain seperti permohonan pergantian nama, permohonan perbaikan akta kelahiran dan lain-lain sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri.

Sidang Keliling adalah sidang Pengadilan Negeri yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik dilaksanakan secara berkala maupun insidentil dengan tujuan meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan Negeri akibat keterbatasan biaya, fisik ataupun secara geografis.

Adapun jumlah alokasi dan realisasi anggaran untuk Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu pada Pengadilan Negeri Se Kalimantan Tengah tahun 2019, adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PENGADILAN	JUMLAH ALOKASI DANA TAHUN 2019	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019	JUMLAH PERKARA YANG DITANGANI TAHUN 2019
1	PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	Rp. 72.500.000,-	Rp. 72.500.000,-	19
3	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	Rp. 2.900.000,-	Rp. 2.900.000,-	2
6	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	NIHIL	NIHIL	NIHIL
7	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	NIHIL	NIHIL	NIHIL
8	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	NIHIL	NIHIL	NIHIL
9	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	NIHIL	NIHIL	NIHIL
10	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	NIHIL	NIHIL	NIHIL
11	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA).

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan salah satunya meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo). Pembebasan Biaya Perkara ini diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu. Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma dengan begitu bisa meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Salah satu bentuk untuk memenuhi pelayanan kepada publik adalah dengan memberi Hak atas biaya perkara cuma-cuma (prodeo) yang didasari oleh PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis.

Adapun jumlah alokasi dan realisasi anggaran untuk Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) pada Pengadilan Negeri Se Kalimantan Tengah tahun 2019, adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PENGADILAN	JUMLAH ALOKASI DANA TAHUN 2019	JUMLAH PERKARA YANG DITANGANI TAHUN 2019
1	PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA	NIHIL	NIHIL
2	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	NIHIL	NIHIL
3	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	NIHIL	NIHIL
4	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	NIHIL	NIHIL
5	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	NIHIL	NIHIL
6	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	NIHIL	NIHIL
7	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	NIHIL	NIHIL
8	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	NIHIL	NIHIL
9	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	NIHIL	NIHIL
10	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	NIHIL	NIHIL
11	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	NIHIL	NIHIL

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA





BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai lembaga Pengadilan Tingkat Banding, berdasarkan Peraturan yang ada diberi beban untuk melakukan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia bagi aparatur Peradilan Umum yang ada di Kalimantan Tengah, baik yang menyangkut tenaga Teknis Yudisial maupun tenaga Non Teknis Yudisial.

Secara keseluruhan, jumlah personil yang menjadi binaan dan pengelolaan Pengadilan Tinggi Palangka Raya adalah berjumlah 460 (empat ratus enam puluh) orang dengan rincian sebagaimana tersebut pada table serta tergambar dalam struktur organisasi di bawah ini :

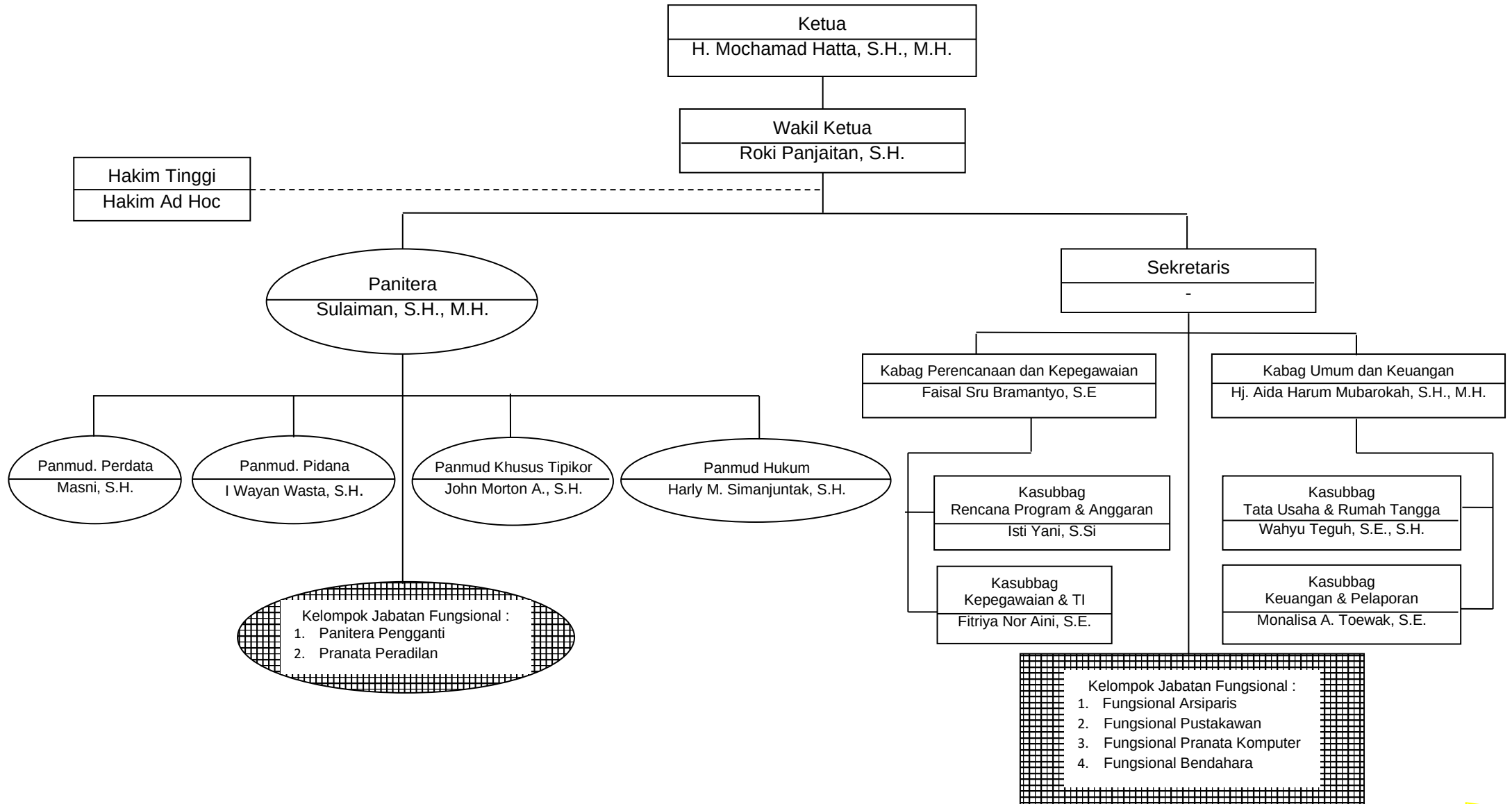
I. Pengadilan Tinggi Palangka Raya

No	Nama	NIP	Jabatan
1	H. Mochamad Hatta, S.H., M.H.	195905111984031004	Ketua
2	Roki Panjaitan, S.H.	195904301985121001	Wakil Ketua
3	Setyaningsih Wijaya S.H.,M.H	195910111985122001	Hakim Tinggi
4	Bambang Kustopo, S.H., M.H.	195906181986121001	Hakim Tinggi
5	Sucipto S.H.,M.H.	195805271985031002	Hakim Tinggi
6	Pudji Tri Rahadi, S.H.	196006151985121001	Hakim Tinggi
7	Houtman Lumban Tobing, S.H.	195601211988031002	Hakim Tinggi
8	Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H.	195903041985122001	Hakim Tinggi
9	H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.	195802131981031002	Hakim Tinggi
10	Porman Situmorang, S.H, M.H.	196008071985122001	Hakim Tinggi
11	Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H.	195907171986122001	Hakim Tinggi
12	Harini, S.H., M.H.	196012261986122001	Hakim Tinggi
13	Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H., M.H.	195903231988032002	Hakim Tinggi
14	Indria Miryani, S.H.	195709171988032001	Hakim Tinggi
15	F. X. Supriyadi, S.H., M.Hum.	195910241988031002	Hakim Tinggi
16	Dwi Prapti Maryudiati, S.H.	196211231986122001	Hakim Tinggi
17	Heru Prakosa, S.H., M.H.	196301261982031002	Hakim Tinggi
18	Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H.	196305311988031003	Hakim Tinggi
19	Richard Silalahi, S.H.	195905301986121001	Hakim Tinggi
20	Nawaji, S.H.	196011171988031003	Hakim Tinggi
21	Gatut Sulistyo, S.H., M.H.	-	Hakim Ad Hoc Tipikor
22	DR. Andreas Eno Tirtakusuma, S.H., M.H.	-	Hakim Ad Hoc Tipikor
23	Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.	198809272011011005	Hakim Non Palu
24	Sulaiman, S.H., M.H.	196003221982031004	Panitera
25	Hj. Aida Harum Mubarakah, S.H., M.H.	196301091989032002	Kabag. Umum dan Keuangan

26	Faisal Sru Bramantyo, S.E.	197809212005021002	Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian
27	John Morton Abdurrahman, S.H.	197207101999031003	Panmud. Khusus Tipikor
28	Masni, S.H.	196006031982032005	Panmud. Perdata
29	Harly Marlyn Simanjuntak, S.H.	197610012001121002	Panmud. Hukum
30	I Wayan Wasta, S.H.	196907101993031003	Panmud. Pidana
31	Isti Yani, S.Si.	198102212006042002	Kasubbag. RPA
32	Fitriya Nor Aini, S.E.	198008112006042003	Kasubbag. KP-TI
33	Monalisa Agustina Toewak, S.E.	198108242006042003	Kasubbag. KU- PL
34	Wahyu Teguh, S.E., S.H.	198608272011011014	Kasubbag. TU- RT
35	Ginter, S.H.	196105051986031006	Panitera Pengganti
36	Sulamiah, S.H.	196205151985032005	Panitera Pengganti
37	Paksi Nurlambang, S.H.	196605091988031003	Panitera Pengganti
38	Evi Ernawati, S.H., M.H.	197010201991032002	Panitera Pengganti
39	Akri Yuliani, S.H.	196707011991032001	Panitera Pengganti
40	Mersia Sibarani, S.E.	197711112009122004	Pelaksana Kepaniteraan Hukum
41	Krista	198506142006042001	Pelaksana Kepaniteraan Hukum
42	Gustia Ningsih, A.Md., S.H.	198108192011012011	Pelaksana Kepaniteraan Pidana
43	Sylvi Enggriani, S.H.	198902032012122001	Pelaksana Kepaniteraan Pidana
44	Akhmad Darkuni, S.Sos., M.AP.	198902032012122001	Pelaksana Kepaniteraan Pidana
45	Evi Katsiani, S.E.	197608292006042023	Pelaksana Kepaniteraan Perdata
46	Yudi Yusliannoor, S.H.	197507192006041003	Pelaksana Kepaniteraan Perdata
47	Yunia Arian, S.H.	198306062006042003	Pelaksana Kepaniteraan Perdata
48	Uner	197703192014081002	Pelaksana Subbag. TU-RT
49	Joni Petrus, S.H.	198106012009121004	Pelaksana Subbag. TU-RT
50	Junaldi Singarimbun, S.E.	198507072009121003	Pelaksana Subbag. KU-PL
51	Julianto, S.H.	198107162006041003	Pelaksana Subbag. KU-PL

52	Susilawati	198901072009122004	Pelaksana Subbag. KU-PL
53	Apridius, S.E., M.Si.	198804052009121002	Pelaksana Subbag. RPA
54	Julius Siberium Timbung, S.E.	198207152006041003	Pelaksana Subbag. KP-TI
55	Abdul Yusuf, S.Sos.	199211152019031011	Analisis Kepegawaian
56	Bangga Crysto Tarigan, A.Md.	199604272019031001	Pengelola Sistem TI dan Jaringan
57	Roberto Asintongan P., A.Md.	198802062019031003	Pengelola Sistem TI dan Jaringan
58	Anreni Lambung, S.E.	-	Honorar DIPA
59	Surya Jhon Hery Tobing, S.H.	-	Honorar DIPA
60	Wahyunanda Trisno Jaya Lambung, S.Pd.	-	Honorar DIPA
61	David Risky Pratama	-	Honorar DIPA
62	Muhammad Hilmi, S.PdI.	-	Honorar DIPA
63	Getyere	-	Honorar DIPA
64	Albert Theofilus Yohanes	-	Honorar DIPA
65	Yuli Harianto	-	Honorar DIPA
66	Tutut, S.H.	-	Honorar DIPA
67	Rahmad Dwi Ariyanto	-	Honorar DIPA
68	Sugiharto	-	Honorar Non DIPA

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palangka Raya

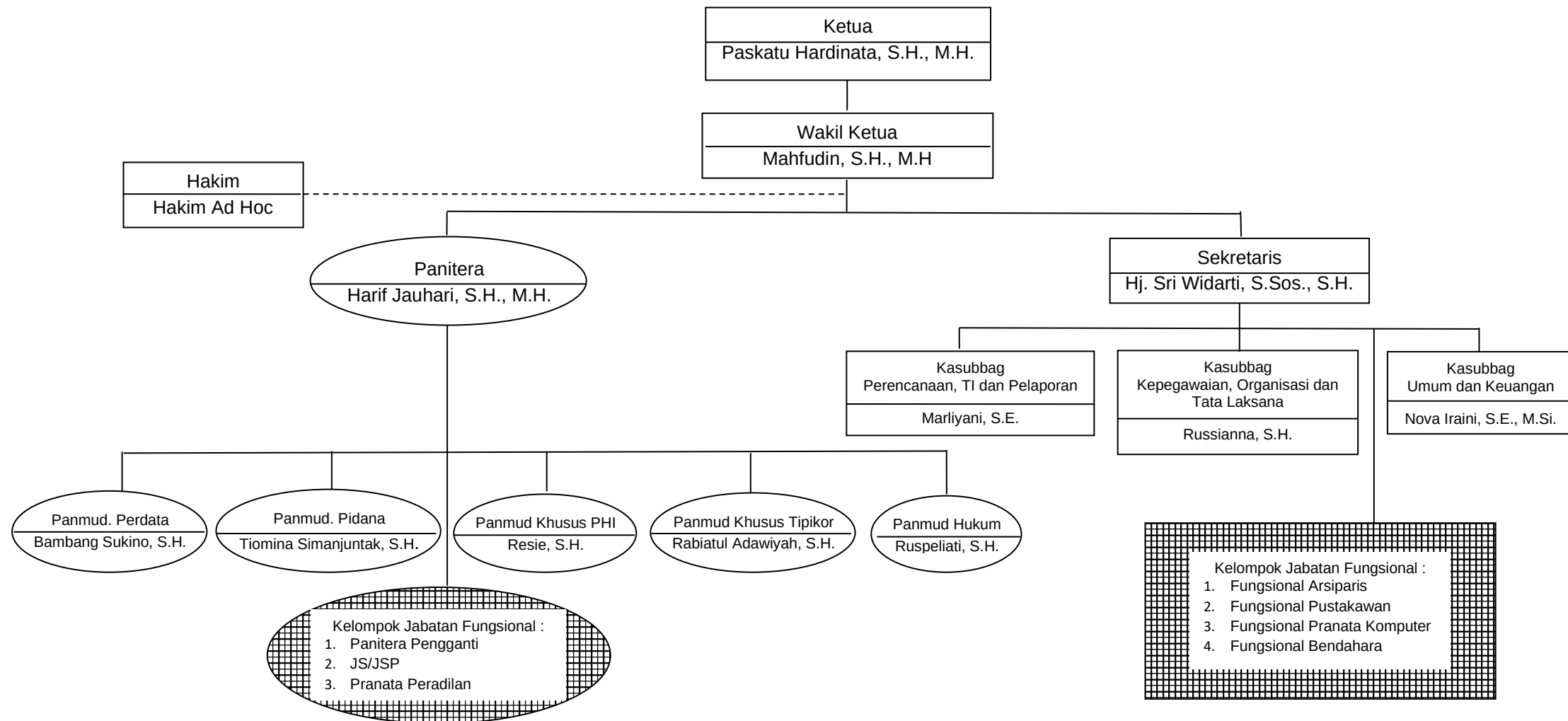


II. Pengadilan Negeri Palangka Raya

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Paskatu Hardinata, S.H., M.H.	196304141992121001	Ketua
2.	Mahfudin, S.H.M.H.	196505311988031002	Wakil Ketua
3.	Alfon, S.H., M.H.	196303011992121001	Hakim
4.	Etri Widayati, S.H., M.H.	196505171985022001	Hakim
5.	Zulkifli, SH.MH	196608091996031002	Hakim
6.	Maria Rina Sulistiawati, S.H. M.Hum	197704082002122004	Hakim
7.	Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.	197708142002122002	Hakim
8.	Dian Kurniawati, S.H.,M.H.	197707242000122001	Hakim
9.	Jimmy Ray Ie, SH	197706052002121002	Hakim
10.	Irfanul Hakim, S.H.	197602092000031001	Hakim
11.	Anuar Sakti Siregar, S.H.		Hakim Ad Hoc Tipikor
12.	Rajali, S.H., M.H.		Hakim Ad Hoc Tipikor
13.	Dedi Riswandi, S.H., M.H.		Hakim Ad Hoc Tipikor
14.	Aliasman Purba, S.E., M.H.		Hakim Ad Hoc PHI
15.	Avan Loeckman Pranawa, S.H., M.M.		Hakim Ad Hoc PHI
16.	LelaYulianty, S.H., M.H.		Hakim Ad Hoc PHI
17.	M. Suhri Burhan, S.H., M.H.		Hakim Ad Hoc PHI
18.	Drs. Nur Ihsan		Hakim Ad Hoc PHI
19.	Hj. Sri Widarti, S.Sos., SH.	196703151990032001	Sekretaris
20.	Harif Jauhari, S.H., M.H.	196906011994031004	Panitera
21.	Bambang Sukino, S.H.	197210291994031004	Panmud. Perdata
22.	Tiomina Simanjuntak, SH.	197102201992032003	Panmud. Pidana
23.	Ruspeliati, SH.	196904011991032002	Panmud. Hukum
24.	Rabiatul Adawiyah, SH	197105181992032003	Panmud. Khusus Tipikor
25.	Resie, SH.	196005041986032006	Panmud. Khusus PHI
26.	Indah Yuli Priyatni, SH.	196007011993032002	Panitera Pengganti
27.	Hj. Masriah, SH.	196009081986032002	Panitera Pengganti
28.	Linda, S.H.	196905201989032001	Panitera Pengganti
29.	Ika Melinda Meliala, SH	198710202011012014	Panitera Pengganti
30.	Taty, S.H.	198502162006042001	Panitera Pengganti
31.	Efraim, S.H.	197504232006041001	Panitera Pengganti
32.	Samlawy	196301111986031002	Panitera Pengganti
33.	Rahmawati Fitri, S.H.	198407242009042011	Panitera Pengganti
34.	Bobby Ertanto, S.H.	198704252006041002	Panitera Pengganti
35.	I Gusti Bagus Sandhi, SH.	198406072008051001	Panitera Pengganti
36.	Jayadi	196209051985031007	Panitera Pengganti
37.	Teguh Budiono, SH.	198208092008051001	Panitera Pengganti
38.	Sari Ramadhaniati, SH	198406142009042011	Panitera Pengganti
39.	Jumiati, S.H.	198709252006042002	Panitera Pengganti
40.	Lianova, S.H.	197503022009122001	Panitera Pengganti
41.	Maryani, SH.	197503071994032002	Juru Sita
42.	Ida Purwanti, SH.	198307102002122001	Juru Sita

43.	Wajidin	196905251993031005	Juru Sita
44.	Ika Murtianingsih, SH	198004102006042003	Juru Sita Pengganti
45.	Russianna, SH	196905161992032002	Kasubbag. KP-Ortala
46.	Marliyani, SE.	198507212009042003	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan
47.	Nova Iraini, SE., M.Si.	198411022009042007	Kasubbag. Umum dan Keuangan
48.	Ainun Zaryah, SE	198712162009042005	Pelaksana Subbag. Umum dan Keuangan
49.	Siti Nor Asiah, S.H, M.H	197401142006042002	Pelaksana Subbag. Umum dan Keuangan
50.	Laili Rahmah, A.Md.	198012242009122005	Pelaksana Subbag. PTIP
51.	Laila Hayati, A.Md.	198410172009122001	Pelaksana Subbag. KP-Ortala
52.	Abdul Kahar Mashuri	197211101993031002	Pelaksana Subbag. Umum dan Keuangan
53.	Salundik	197107052014081002	Pelaksana Kepaniteraan Pidana
54.	Agave Christy J. Saragih		Honorer DIPA
55.	Elsa Situmorang, S.H.		Honorer DIPA
56.	Yoyo		Honorer DIPA
57.	Rizki Kurniawan, A.Md		Honorer DIPA
58.	Kabul Budiono		Honorer DIPA
59.	Firdana Priyo Handoko, A.Md		Honorer DIPA
60.	Ferry, S.E.		Honorer DIPA
61.	Jejen Jaeni		Honorer DIPA
62.	Timotius Agni Angga Kusuma		Honorer DIPA
63.	Dean Barizka, S.Pd		Honorer DIPA
64.	Kaspul Anwar, S.Pd		Honorer DIPA
65.	Gustaf Denovan		Honorer DIPA
66.	Dandy Kurniawan		Honorer DIPA
67.	Anggryanto Sulisty		Honorer DIPA
68.	Syahrin		Honorer DIPA
69.	Supriyanto		Honorer DIPA

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas IA

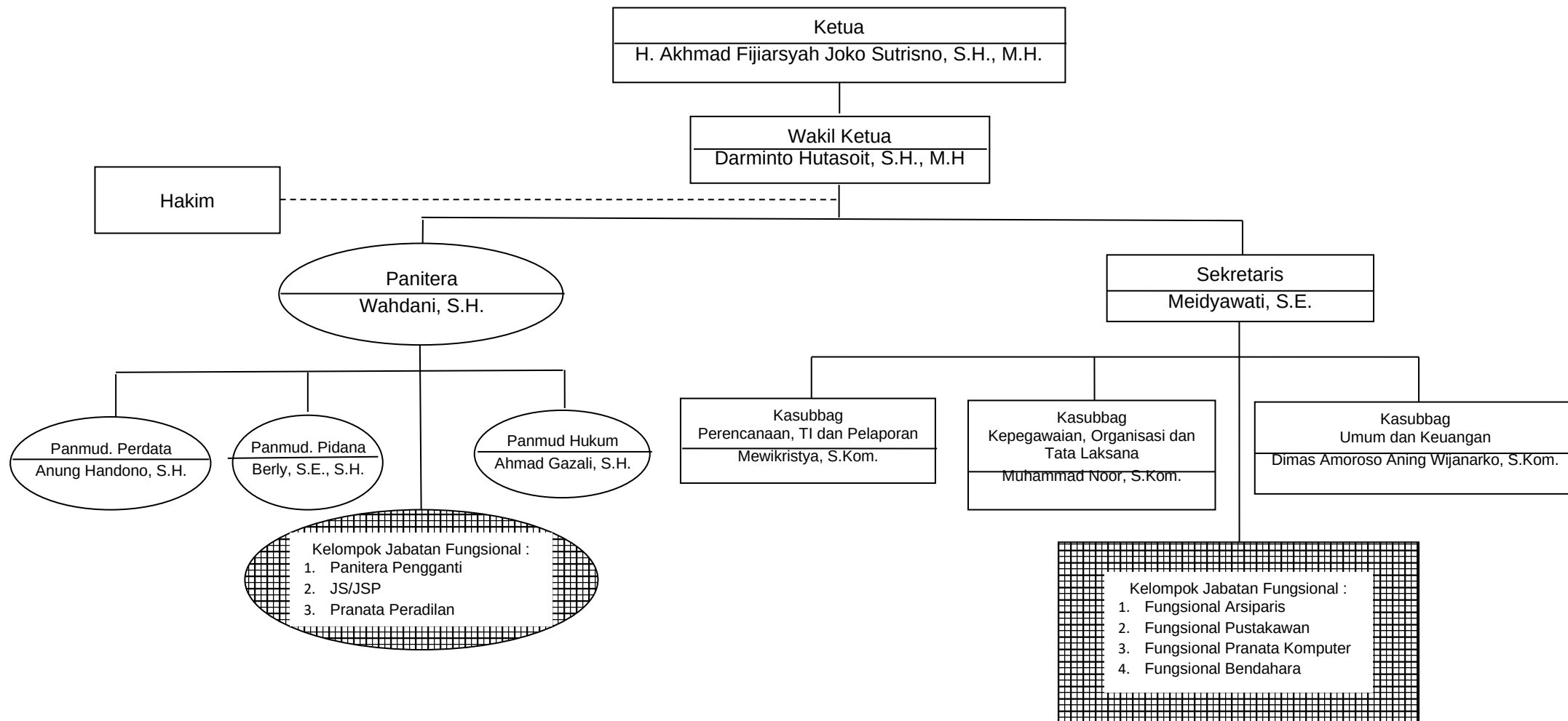


III. Pengadilan Negeri Sampit

No	Nama	NIP	Jabatan
1	H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.	197111011993031002	Ketua
2	Darminto Hutasoit, S.H., M.H.	197501242000121001	Wakil Ketua
3	Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.	197504292006042001	Hakim
4	Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.	197807212005021001	Hakim
5	Ade Satriawan, S. H., M.H.	198103202006041004	Hakim
6	Muslim Setiawan, S.H.	197704282003121001	Hakim
7	Paisol, S.H., M.H.	197907172005021001	Hakim
8	Edi Rosadi, S.H.,M.H	198210262007041001	Hakim
9	Ega Shaktiana, S.H., M.H.	197710012003121001	Hakim
10	Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.	197903222007041001	Hakim
11	Doni Prianto, SH	197901052006041004	Hakim
12	Wahdani, S.H.	197306021994031007	Panitera
13	Meidyawati, S.E.	197205142006042001	Sekretaris
14	Anung Handono, S. H.	197303221993031003	Panmud. Perdata
15	Berly, S.E.,S.H.	198001182006041003	Panmud. Pidana
16	Ahmad Gazali, S.H.	196312051990031004	Panmud. Hukum
17	Sri Yuninto, S.H.	197006191998031001	Panitera Pengganti
18	Nurhidayah	196007051982032020	Panitera Pengganti
19	Atrikuasa, S.H.	198502012011011006	Panitera Pengganti
20	Wahyudi, S.H.	197107101993031006	Panitera Pengganti
21	Junipar Munte, S.H.	198405242012121002	Panitera Pengganti
22	Sopyani Devi, SH	198510112005022002	Panitera Pengganti
23	Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, SH.	198801292009042003	Panitera Pengganti
24	Evi Agustine, S.H.	198608032006042001	Panitera Pengganti
25	Bayu Sistiawan, A.Md., S.H.	198309232011011004	Juru Sita
26	Syahrudin	197307041993031002	Juru Sita
27	Mewikristya, S.Kom.	198511072009042010	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan
28	Muhammad Noor, S.KOM	197911282009121005	Kasubbag. KP-Ortala
29	Dimas Amoroso Aning Wijanarko, S.Kom	199103012015031002	Kasubbag. Umum Dan Keuangan
30	Andri Firmansyah, S.H.	199505122019031001	Analisis Perkara Peradilan
31	Mario Tyson Nadapdap, S.E.	199608172019031002	Analisis SDM Aparatur
32	Indra Lasmono, A.Md.	198707132019031008	Pengelola Sistem Dan Jaringan
33	Tompono		Honorer DIPA
34	Kenmart Rajagukguk		Honorer DIPA
35	Eko Wahyudi		Honorer DIPA

36	Hasan Basri		Honoror DIPA
37	Juhran		Honoror DIPA
38	Erfan Saiful Anam		Honoror DIPA
39	Robi Suhada		Honoror DIPA
40	Eka Sartika Dewi		Honoror DIPA
41	M. Saleh		Honoror Non DIPA
42	Rito		Honoror Non DIPA
43	Sherly Cristina		Honoror Non DIPA
44	Sri Alfyani		Honoror Non DIPA
45	Yandi Anggriyawan Adhitiya		Honoror Non DIPA
46	Sopiyan		Honoror Non DIPA
47	Mahming		Honoror Non DIPA
48	Widya		Honoror Non DIPA

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB

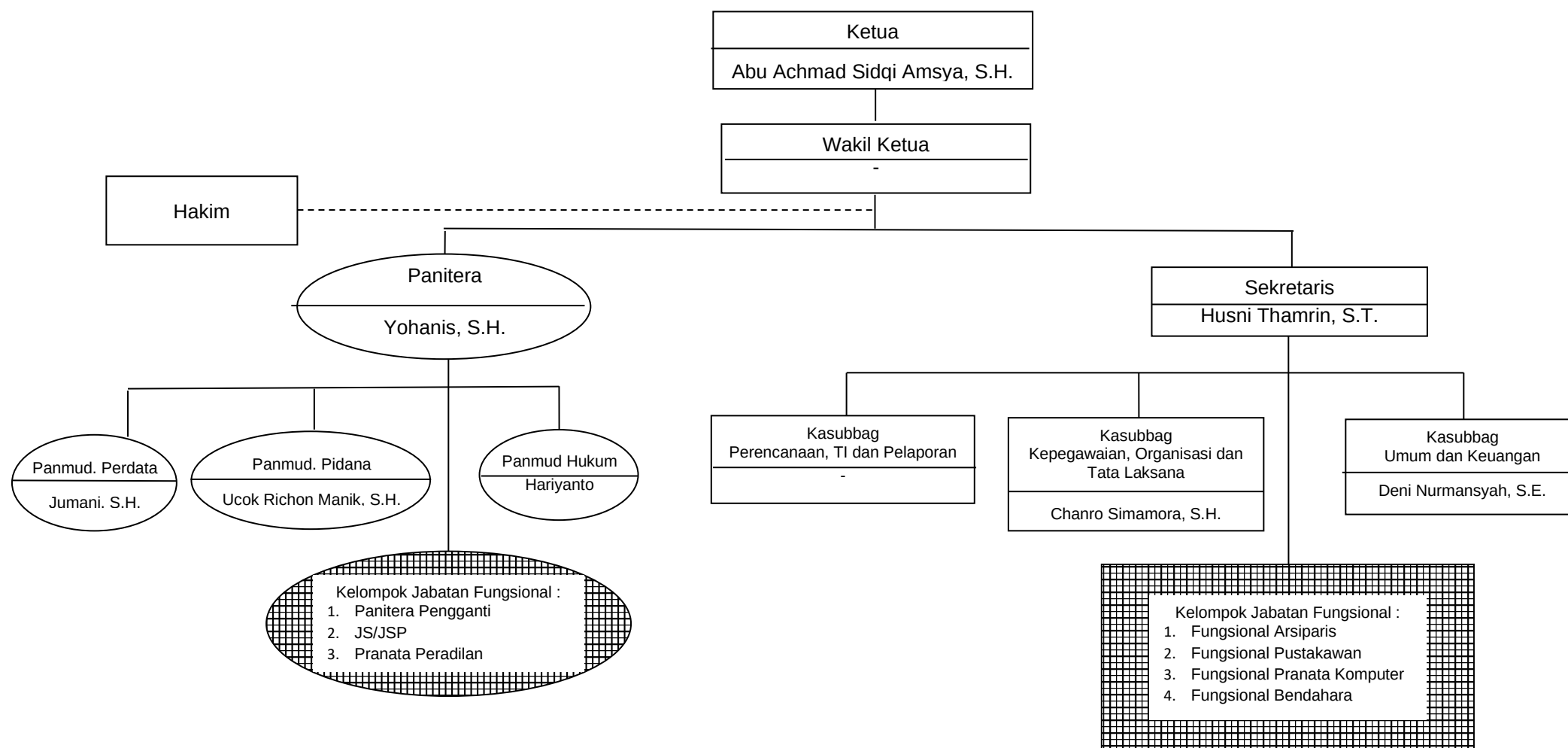


IV. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Abu Achmad Sidqi Amsya, SH.	196811181996031002	Ketua
2	Heru Karyono, SH.	198312162007041001	Hakim
3	Muhammad Ikhsan, SH.	198010132008051001	Hakim
4	Iman Santoso, SH., MH.	197605132008051001	Hakim
5	Iqbal Albanna, SH., MH.	198501312009041004	Hakim
6	Mantiko Sumanda M. SH., M.Kn.	198210162009121002	Hakim
7	Yohanis, SH.	196404111998031001	Panitera
8	Husni Thamrin, ST.	197803082009041003	Sekretaris
9	Ucok Richon Manik, SH.	198306272006041003	Panmud. Pidana
10	Jurmani, SH.	197912052008051001	Panmud. Perdata
11	Hariyanto	197501151994031002	Panmud. Hukum
12	Deni Nurmansyah, SE.	198401012006041005	Kasubbag. Umum dan Keuangan
13	Chanro Simamora, SH	198904042012121002	Kasubbag. KP-Ortala
14	Patmawaty, SH.	197205071998032003	Panitera Pengganti
15	Didik Sulaiman, SH.	198110182012121003	Pelaksana Subbag. Umum dan Keuangan
16	Rosilawati, SE.	198407192009122002	Jurusita Pengganti
17	Maya Agustina, SH.	198408222014082001	Pelaksana Kepaniteraan Perdata
18	Yudha Pradana Putra, A.Md.	199103282015031001	Pelaksana Subbagian PTIP
19	Sulistiywati	198403062014082001	Pelaksana Umum dan Keuangan
20	M. Guntur, SH.	199212082019031007	Analisis Perkara Peradilan
21	Mulia Rizky, SE.	198510292019031002	Analisis SDM Aparatur
22	Yogi Nugraha Putra, A.Md.T.	199409182019031009	Pengelola Sistem dan Jaringan
23	Hiskia J. Aritonang		Honorar DIPA
24	Kao M. Kaokabanullah		Honorar DIPA
25	Noor Maydah Lestika, S.Pd.		Honorar DIPA
26	Erwin Tirajul Akbar, S.E.		Honorar DIPA
27	Ega Ayu Ananda		Honorar DIPA
28	Masrun		Honorar DIPA
29	Suci Paramita		Honorar DIPA
30	Muhamad Aji Purnomo		Honorar DIPA
31	Muhammad Syamsi		Honorar DIPA

32	Imam Setiyawan		Honoror DIPA
33	Prijanto		Honoror DIPA
34	Nurul Hidayah		Honoror DIPA

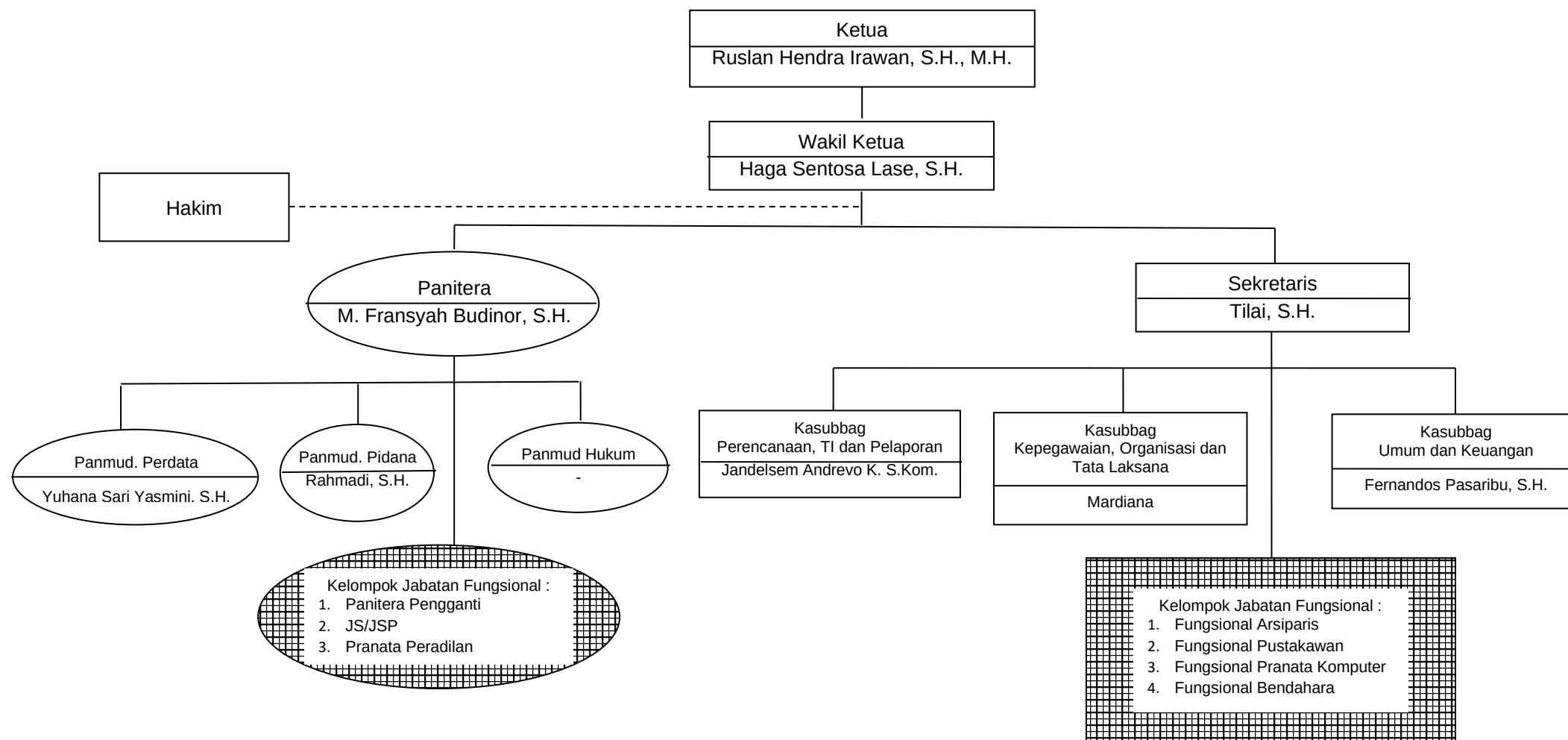
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB



V. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.	197112301996031001	Ketua
2	Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.	197810212002121004	Wakil Ketua
3	Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.	198408182009121004	Hakim
4	Emna Aulia, S.H., M.H.	198204292006042001	Hakim
5	M Fransyah Budinor, S.H.	196503161987031002	Panitera
6	Tilai, SH.	196704061992032002	Sekretaris
7	Yuhana Sari Yasmini, SH	196704041989032001	Panitera Muda Perdata
8	Rahmadi, SH	196507171992031005	Panitera Muda Pidana
9	Ernawati, SH	196603191992032001	Panitera Pengganti
10	Rusmiati, SH	196803041990032003	Panitera Pengganti
11	Gusti Norliani	196506281991032002	Panitera Pengganti
12	Agus Hairuddin, SH.	196808171993031003	Panitera Pengganti
13	Kiki Hidayanti, SH	198109202006042004	Panitera Pengganti
14	Ubaidillah	198506142009121009	Juru Sita
15	Dedtran Natalia Marsetyo	198412162009121002	Juru Sita
16	Mariatul Khiftiah, SH	198611012009122006	Juru Sita Pengganti
17	Mardiana	197208091991032002	Kasubbag. KP-Ortala
18	Jandelsem Andrevo Khairum, S.Kom	198901172015031002	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan
19	Fernandos Pasaribu, S.H.	199204102014031002	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan
20	Muhammad Imron Rosiyadi, SH	196905231993031002	Pelaksana
21	Wuri Mulyandari, S.H	199306252017122001	Calon Hakim,
22	Dody Pandiangan, S.E.	198604022019031005	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
23	Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.	199408172017122003	Calon Hakim,
24	Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.M.H.	199109122017122001	Calon Hakim,
25	Inggit Suci Pratiwi, S.H.M.H.	199203072017122002	Calon Hakim,
26	Rya Fitriyadi		Honorar DIPA
27	Agus		Honorar DIPA
28	Amir Sinaga		Honorar DIPA
29	Muhammad Usman, Sh.		Honorar DIPA
30	Hasan Basri, S.Pd		Honorar DIPA
31	Rahmat Hidayatullah		Honorar DIPA
32	Saifuddin, Se.		Honorar DIPA
33	Nanda Kusuma Wardhan		Honorar DIPA
34	Erico K. Singam		Honorar Non DIPA
35	Noor Halidah, Sh		Honorar Non DIPA

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas IB

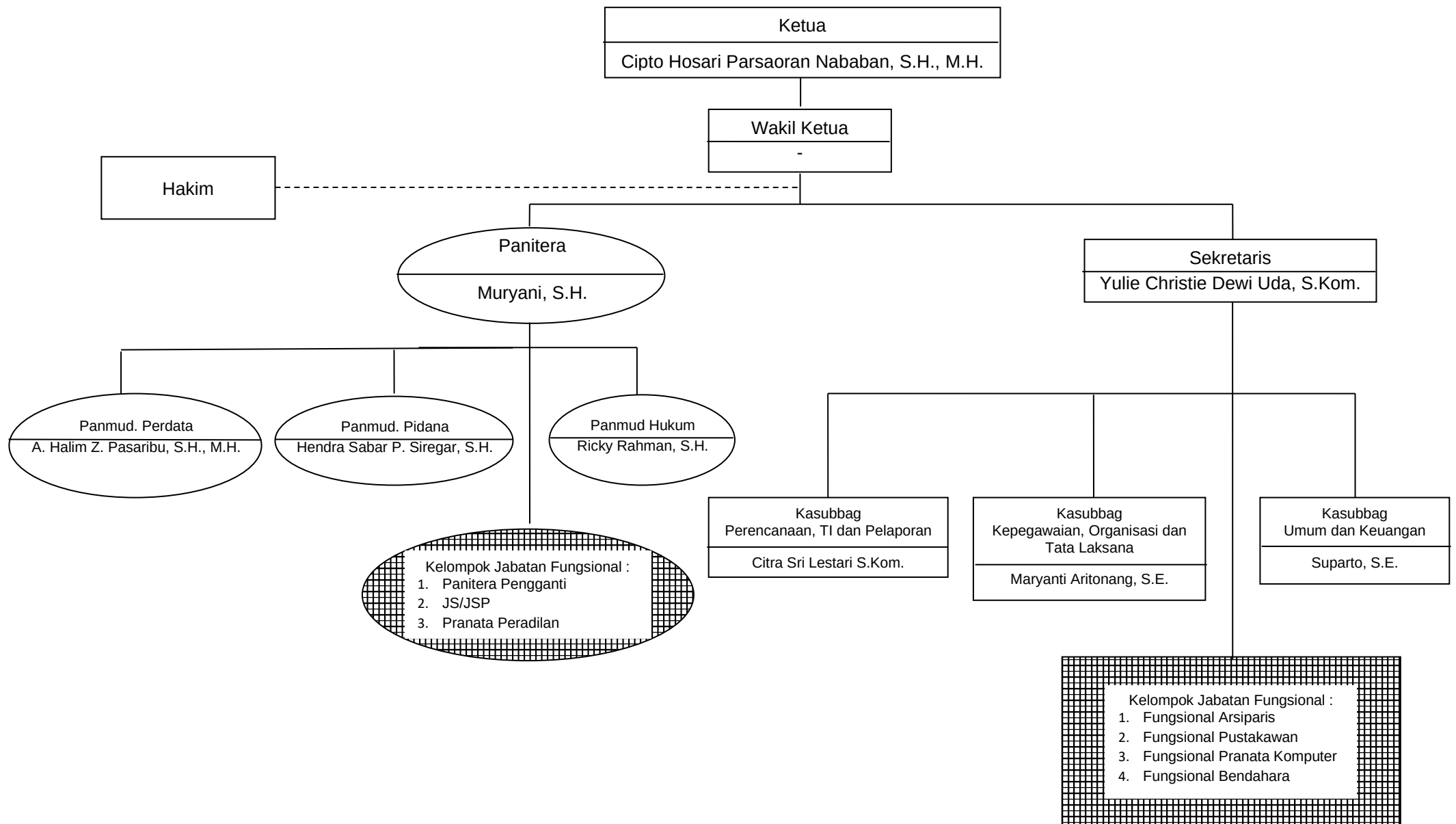


VI. Pengadilan Negeri Muara Teweh

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Cipto Hosari Parsaoran Nababan, Sh., M.H.	19800328 200312 1 001	Ketua
2	Teguh Indrasto, S.H.	19790303 200212 1 008	Hakim Madya Pratama
3	Fredy Tanada, S.H.,M.H.	19850701 200912 1 008	Hakim Pratama Madya
4	Muryani, S.H.	19701109 199303 1 008	Panitera
5	Yulie Christie Dewi Uda,S.Kom	19780724 200904 2 002	Sekretaris
6	Amran Halim Zunaedi Pasaribu, Sh.,H.H.	19840607 200704 1 001	Panitera Muda Perdata
7	Hendra Sabar Parulian Siregar, Sh.	19820531 200805 1 001	Panitera Muda Pidana
8	Ricky Rahman, Sh.	19870827 201101 1 011	Panitera Muda Hukum
9	Citra Sri Lestari, S.Kom	19840904 201101 2 019	Kasubbag Perencanaan ,Ti Dan Pelaporan
10	Suparto, Se	19690821 199303 1 006	Kasubbag Umum & Keuangan
11	Maryanti Aritonang, Se	19900408 200912 2 001	Kasubbag Kepegawaian Dan Ortala
12	Richard R. Sampiterson Petrus, Sh.	19870417 200604 1 002	Panitera Pengganti
13	Rony Oktavianus, S.H.	19841009 200904 1 005	Panitera Pengganti
14	Rudy Ihsan	19821012 200604 1 003	Jurusita
15	Rosmini Huzaimah	19680608 199003 2 003	Pelaksana Kepaniteraan Perdata
16	Aulia Rachmi, S.H., Mh	19840408 201403 2 002	Pelaksana Kepaniteraan Perdata
17	Luther Sianturi	19680912 199403 1 007	Pelaksana Subbag Umum Dan Keuangan
18	Boby Rahman	19720329 201408 1 001	Pelaksana Kepaniteraan Pidana
19	Awaludin Nur	19780221 201408 1 001	Pelaksana Subbag Umum Dan Keuangan
20	Kaspul Anwar	19720907 201408 1 001	Pelaksana Kepaniteraan Hukum
21	Edi Rahmad, S.H.	19900625 201712 1 005	Calon Hakim
22	Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.	19940610 201712 1 003	Calon Hakim
23	Mohammad Pandi Alam, S.H.	19940914 201712 1 005	Calon Hakim
24	Muhammad Sabil Ryandika, S.H.	19941018 201712 1 002	Calon Hakim
25	Dina Tiara Wati		Honoror DIPA
26	H. Chandra Sujana, S.H.		Honoror DIPA
27	Parmin		Honoror DIPA
28	Pran Ary Gunadi		Honoror DIPA

29	M. Faisal Tandjung		Honorer DIPA
30	Mentari		Honorer DIPA
31	Nur Indah Kusumawardhani		Honorer DIPA
32	Suandy Aries Setiady		Honorer DIPA
33	M. Luthfi Haikal		Honorer Non DIPA
34	Dandi Suherman		Honorer Non DIPA

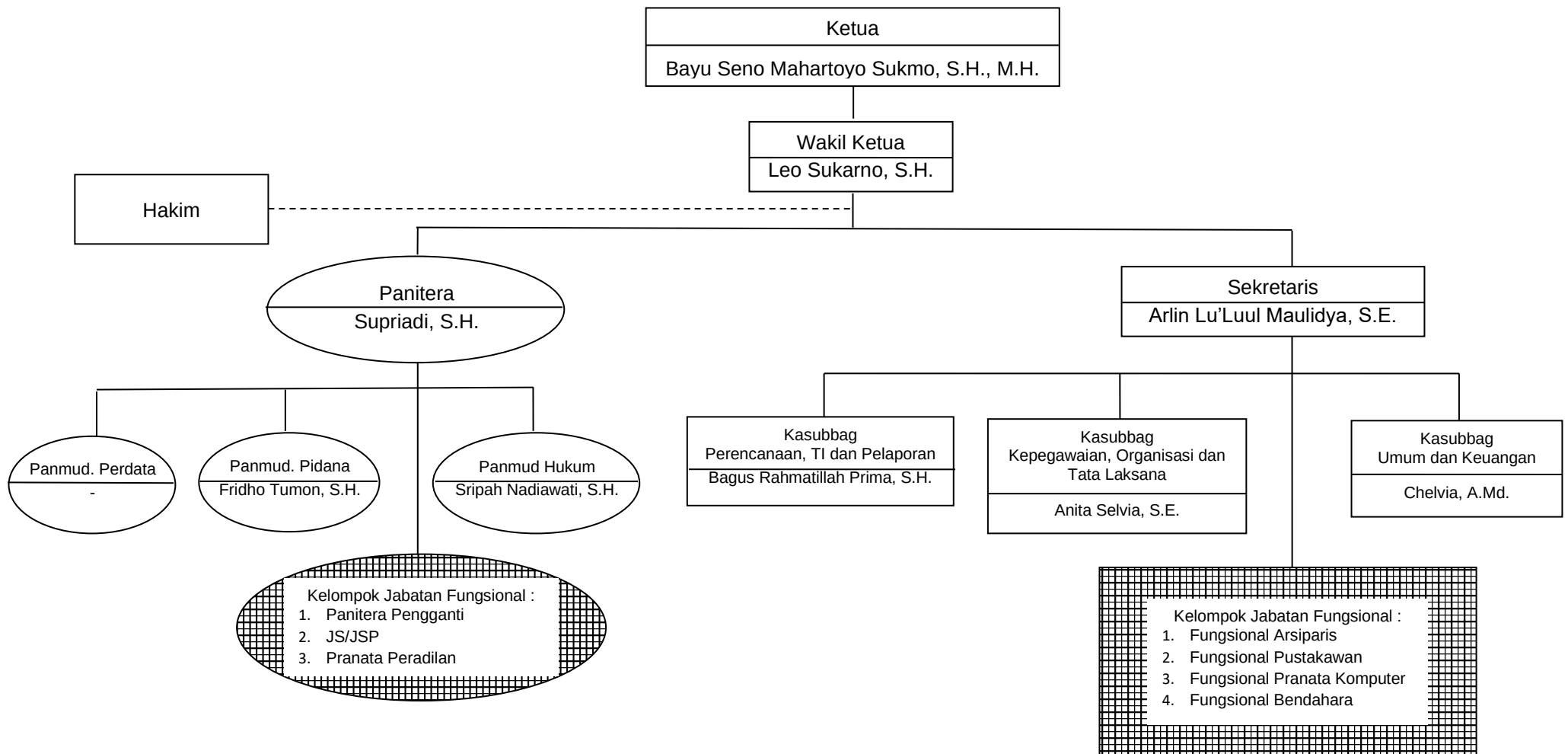
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II



VII. Pengadilan Negeri Buntok

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H., M.H.	19770402 200212 1 002	Ketua
2	Leo Sukarno, S.H.	19791022 200212 1 002	Wakil Ketua
3	John Ricardo, S.H.	19850421 200904 1 005	Hakim
4	Supriadi, S.H.	19731020 199303 1 002	Panitera
5	Arlin Lu'luul Maulidya, S.E.	19851128 200604 2 001	Sekretaris
6	Fridho Tumon, S.H.	19840524 200912 1 007	Panitera Muda Pidana
7	Sripah Nadiawati, S.H.	19861111 200604 2 002	Panitera Muda Hukum
8	Anita Selvia, S.E.	19780706 201101 2 003	Kasubbag. KP-Ortala
9	Bagus Rahmatillah Prima, S.H.	19881021 201403 1 004	Kasubbag. Perencanaan, TI Dan Pelaporan
10	Chelvia, A.Md.	19861125 200904 2 003	Kasubbag. Umum Dan Keuangan
11	Shifa Natasa, S.H.	19900516 201403 2 004	PaniteraPengganti
12	Yuris. S.	19710116 201408 1 001	JurusitaPengganti
13	Arifin Budiman, S.H.	198808072017121002	Calon Hakim
14	Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.	198809082017121001	Calon Hakim
15	Fega Uktolseja, S.H.	198905082017121001	Calon Hakim
16	Elton Mayo, S.H.	199205012017121008	Calon Hakim
17	Firdaus Amin, S.E.	198504262019031006	Analisis SDM Aparatur
18	Noryadin	197203052014081001	Pelaksana Kepaniteraan Hukum
19	Erosusanto. RI.		Honorer DIPA
20	Reni Anggrahini, S.E.		Honorer DIPA
21	Elmidiyanti		Honorer DIPA
22	Rohmi Jannnatin, S.Pd.		Honorer DIPA
23	Febrina Rahmah, A.Md.		Honorer DIPA
24	Syahidurrasyid		Honorer DIPA
25	Syarif Hidayatullah, S.Pd.I.		Honorer DIPA
26	Suriyadi		Honorer Non DIPA
27	Anton Saputra		Honorer Non DIPA

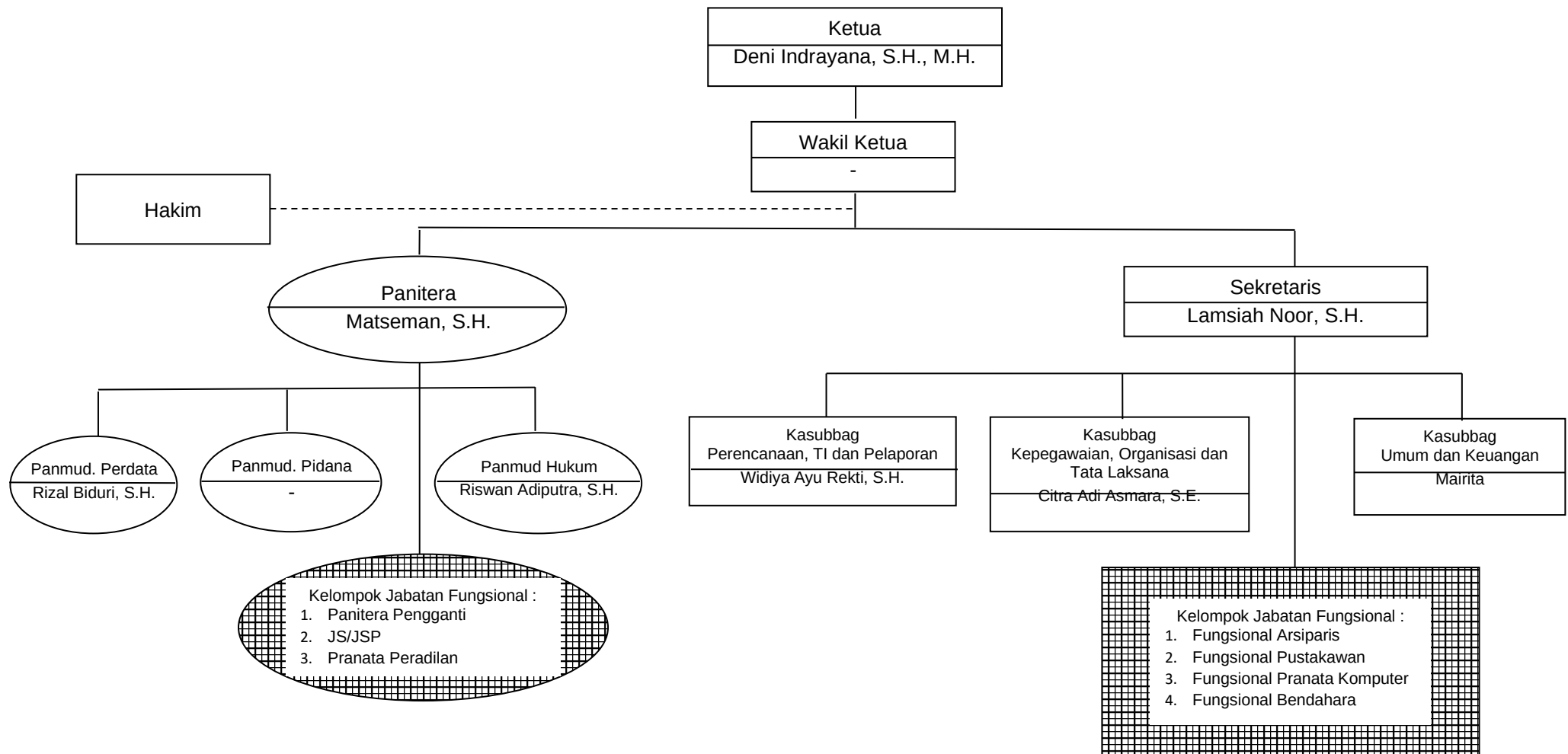
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II



VIII. Pengadilan Negeri Tamiang Layang

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Deni Indrayana, S.H., M.H.	197610082001121003	WakilKetua/Hakim MadyaPratama
2.	Beny Sumarno, S.H., M.H.	197608292005021001	Hakim Pratama Utama
3.	Roland Parsada Samosir, S.H.	198210022007041001	Hakim PratamaMadya
4.	Helka Rerung, S.H.	198202102009041004	Hakim PratamaMadya
5.	Lamsiah Noor, S.H.	196308171987032003	Sekretaris
6.	Matseman, S.H.	196111081984031001	Panitera
7.	Rizal Biduri, S.H.	197201021994031001	PaniteraMudaPerdata
8.	Riswan Adiputra, S.H.	198602172009041003	PaniteraMudaPidana
9.	Mairita	196805201991032001	Kasubbag. Umum&Keuangan
10.	Citra Adi Asmara, S.E.	198309092011011010	Kasubbag. KP-Ortala
11.	Widiya Ayu Rekti, S.H.	198901262012122001	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan
12.	Sepende	196909091993031005	PaniteraPengganti
13.	Nordin Asaddiq	197408271993031003	Jurusita
14.	Zabal Akbar, S.H.	198810242014031001	Jurusita Pengganti
15.	Dian Yustisia, S.H.	198602212014032003	Pelaksana
16.	Arif Rachman Hakim, S.H.	198811272014031002	Pelaksana
17.	Febdhy Setyana, S.H.	198602232017121001	Calon Hakim
18.	AriefHeryogi, S.H.	199208302017121002	Calon Hakim
19.	Eddy Montana, S.H.	199402012017121004	Calon Hakim
20.	Kharisma Laras Sulu S.H.	199409072017121005	Calon Hakim
21.	Akhmad Wardani		Honorer DIPA
22.	Arbatson		Honorer DIPA
23.	Norsehat		Honorer DIPA
24.	Pirmansyah		Honorer DIPA
25.	Tada Mawisa		Honorer DIPA
26.	Ifan Yuan Tanjung Sinduro		Honorer DIPA

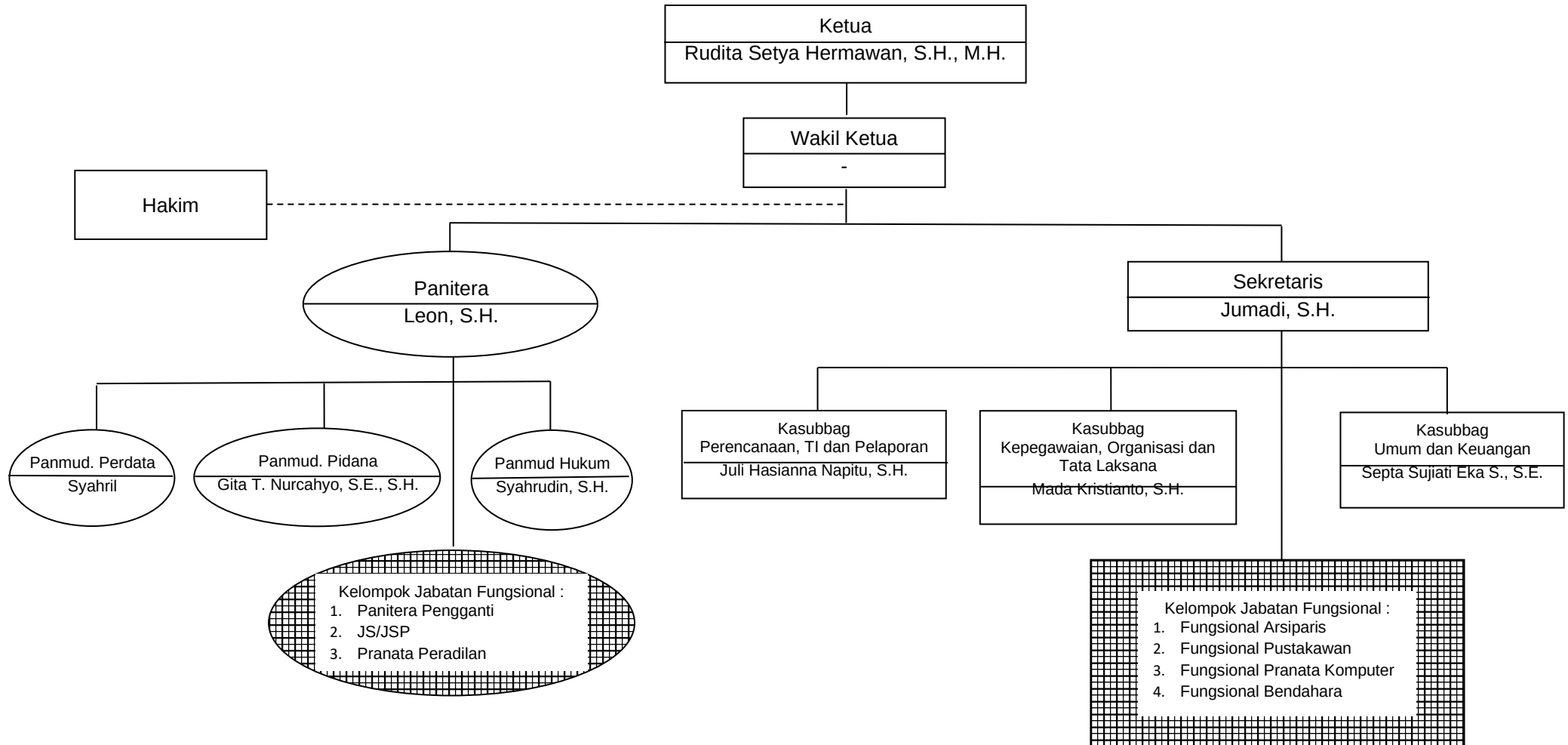
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II



IX. Pengadilan Negeri Kasongan

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.	197806172001121002	Ketua
2	Evan Setiawan Dese, S.H.	197805042007041001	Hakim
3	GT. Risna Mariana, S.H.	198405262009042007	Hakim
4	Leon, S.H.	196903111993031004	Panitera
5	Jumadi, S.H.	196807171993031010	Sekretaris
6	Syahrudin, S.H.	196808271993031004	Panmud. Hukum
7	Gita Triyanto Nurcahyo, S.E.,S.H.	197909202006041003	Panmud. Pidana
8	Syahril,	196001101981031003	Panmud.Perdata
9	Masrianor, S.H.	198310062009121008	Panitera Pengganti
10	Hendy Pradipta, S.H.	198704302011011014	Panitera Pengganti
11	Muhamad Fadli, SH	198705262006041002	Panitera Pengganti
12	Ricky Darmawan, S.H., M.H.	198708182012121001	Juru Sita Pengganti
13	Faros Ashdaq, A.Md	199005262015031001	Juru Sita Pengganti
14	Septa Sujiati Eka Setia, S.E.	198509232006042001	Kasubbag. Umum Dan Keuangan
15	Juli Hasianna Napitu, S.H.	198707112012122001	Kasubbag. Perencanaan, TI Dan Pelaporan
16	Mada Kristianto, S.H.	198503092012121002	Kasubbag. KP-Ortala
17	Rinaldy Adipratama, S.H.	198705122017121001	Calon Hakim
18	M Iskandar Muda, S.H.	198909182017121004	Calon Hakim
19	Afrian Faryandi, S.H.	199104212017121004	Calon Hakim
20	Sartika Dewi Hapsari, S.H.	199406252017122004	Calon Hakim
21	Siti Martinah,	198603312006042002	Pelaksana Subbag Keuangan dan Pelaporan
22	Adhyatma		Honorar DIPA
23	Mensusana		Honorar DIPA
24	Natalia Dhevinda, S.H.		Honorar DIPA
25	Martie		Honorar DIPA
26	Muhamad Subhan		Honorar DIPA
27	Sentosa		Honorar DIPA
28	Sihon		Honorar DIPA

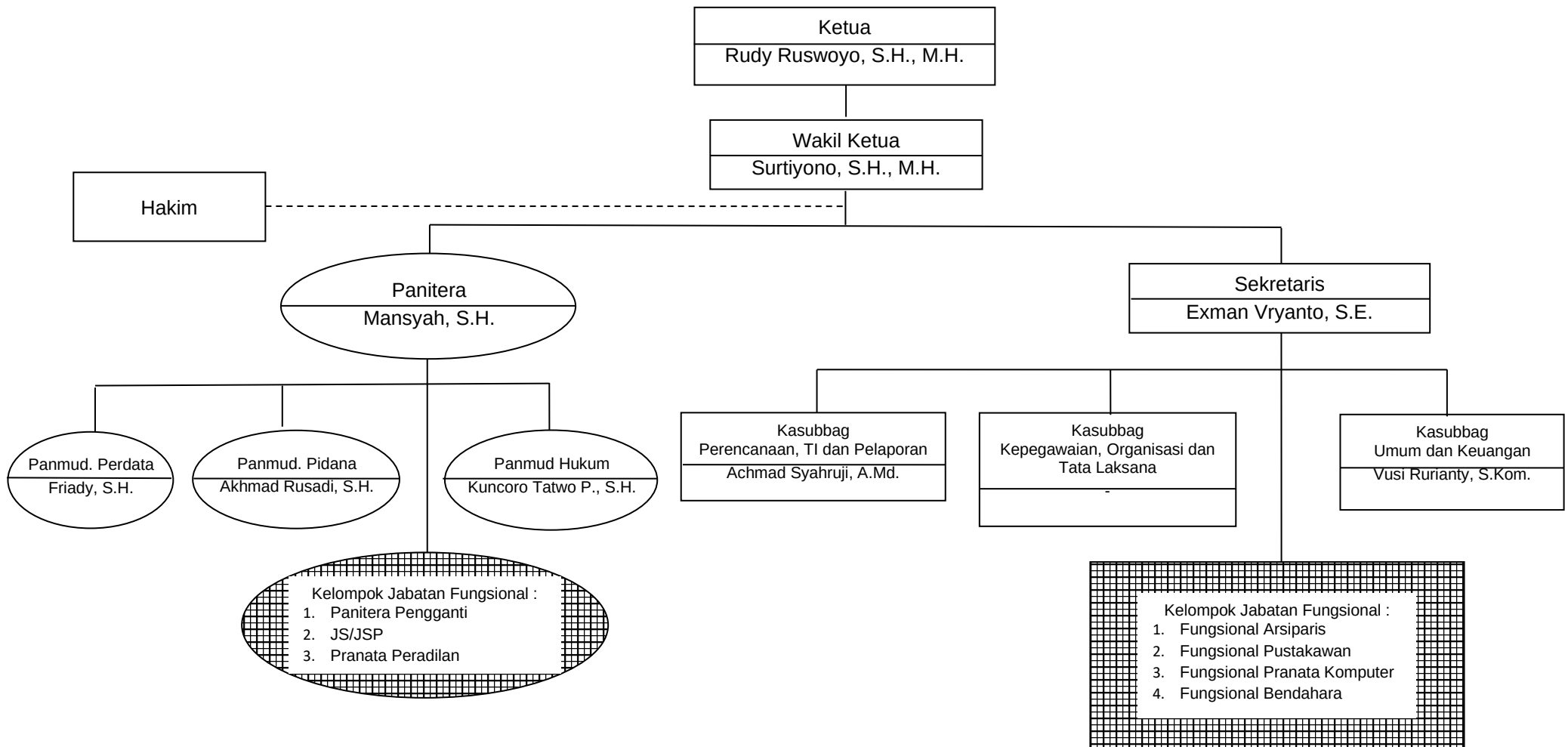
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kasongan Kelas II



X. Pengadilan Negeri Kuala Kurun

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Rudy Ruswoyo., S.H., M.H.	197610182001121002	Ketua
2	Surtiyono, SH, MH	198003262002121002	Wakil Ketua
3	Amir Rizki Apriadi, SH. MM	198504122011011018	Hakim
4	Mansyah., S.H.	197012131994031004	Panitera
5	Exman Vryanto., S.E.	197311211993031002	Sekretaris
6	Friady, SH	198210142009121005	Panitera Muda Perdata
7	Akhmad Rusadi, SH	198602102006041002	Panitera Muda Pidana
8	Kuncoro Tatwo Pratisto., S.H.	197101171995031001	Panitera Muda Hukum
9	Didid Suhartono, S.H.	198305022009041009	Panitera Pengganti
10	Mangisi Gultom	198408292006041001	Juru Sita
11	Vusi Rurianty., S.Kom.	198603152009042008	Kasubbag. Umum Dan Keuangan
12	Mario Reymond Pandey Silalahi, S.H.	198811012017121001	Calon Hakim
13	Patar Panjaitan, S.H.	199208082017121006	Calon Hakim
14	Ruben Barcelona Hariandja, S.H.	198909092017121003	Calon Hakim
15	Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.	199311072017121003	Calon Hakim
16	Kunti Kalma Syita, S.H.	199205142017122003	Calon Hakim
17	Raden Guntar Anggaraputra Sudjata, S.H., M.H.	198709092017121001	Calon Hakim
18	Rahmat Indera Satrya, S.H.	199211132017121003	Calon Hakim
19	Fransiskus Sinurat, S.H.	199403222017121004	Calon Hakim
20	Anjar Koholifano Mukti, S.H.	198909232017121002	Calon Hakim
21	Abi Kusuma Friestiawan Ahmad, S.H.	199309212019031005	Analisis Perkara Peradilan
22	Tubagus Ramdan, S.E.	198904232019031005	Analisis SDM Aparatur
23	Mardona		Honorar DIPA
24	Hery Wibowo		Honorar DIPA
25	Topan Brian		Honorar DIPA
26	Solimah		Honorar DIPA
27	Wulan Sari		Honorar DIPA
28	Yurike Febrila		Honorar DIPA
29	Dede Rully Kurniawan		Honorar DIPA
30	Sisto		Honorar DIPA

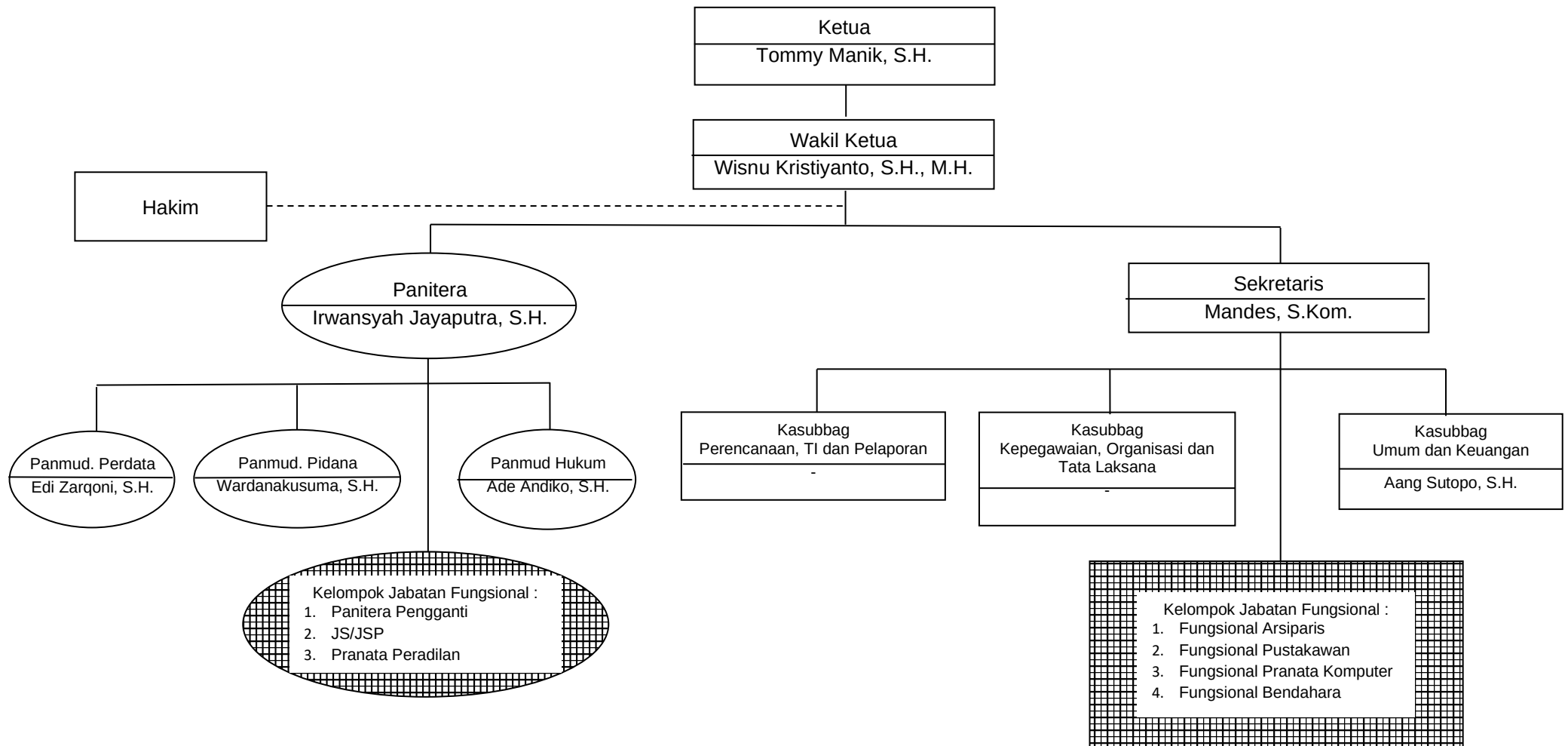
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II



XI. Pengadilan Negeri Nanga Bulik

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Tommy Manik, S.H.	197612262001121001	Ketua
2	Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H.	197706222001121002	Wakil Ketua
3	Petrus Nico Kristian, S.H.	198212042011011008	Hakim
4	Irwansyah Jayaputra, S.H.	197108041994031003	Panitera
5	Mandes, S.KOM.	198304032009121004	Sekretaris
6	Edi Zarqoni, S.H.	198101302009041002	Panmud. Perdata
7	Wardanakusuma, S.H.	198310032009121006	Panmud. Pidana
8	Ade Andiko, S.H.	198711192011011005	Panmud. Hukum
9	Thio Doly Pakpahan, SH.	198311062006041001	Juru Sita
10	Aang Sutopo, S.H.	198201132009121002	Kasubbag. Umum Dan Keuangan
11	Didik Nursetiawan, S.H.	199411252017121004	Calon Hakim
12	Rendi Abednego Sinaga, S.H.	199402262017121005	Calon Hakim
13	Elisabeth Panjaitan, S.H.	199309252017122001	Calon Hakim
14	Istiani, S.H.	199504042017122004	Calon Hakim
15	Noor Ibni Hasanah, S.H.	199308102017122002	Calon Hakim
16	Marshias Mereapul Ginting, S.H.	198810202017121001	Calon Hakim
17	Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.	199210102017121008	Calon Hakim
18	Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.	199509272017122005	Calon Hakim
19	Tony Arifuddin Sirait, S.H.	198602012017121002	Calon Hakim
20	Toni Aprianto, S.H.	199404262019031003	Analisis Perkara Peradilan
21	Aris Editio Telaumbanua, S.H.	198906232019031005	Analisis SDM Aparatur
22	Winda Astabela, S.H.		Honorar DIPA
23	Kasmawati		Honorar DIPA
24	Aldo Giovany		Honorar DIPA
25	Margon Soriyanto		Honorar DIPA
26	Rija Romadan		Honorar DIPA
27	Suriyanto		Honorar DIPA
28	Anggun Sesa		Honorar Non DIPA
29	Yuliana		Honorar Non DIPA
30	Hepi, S.H.		Honorar Non DIPA
31	Winda		Honorar Non DIPA

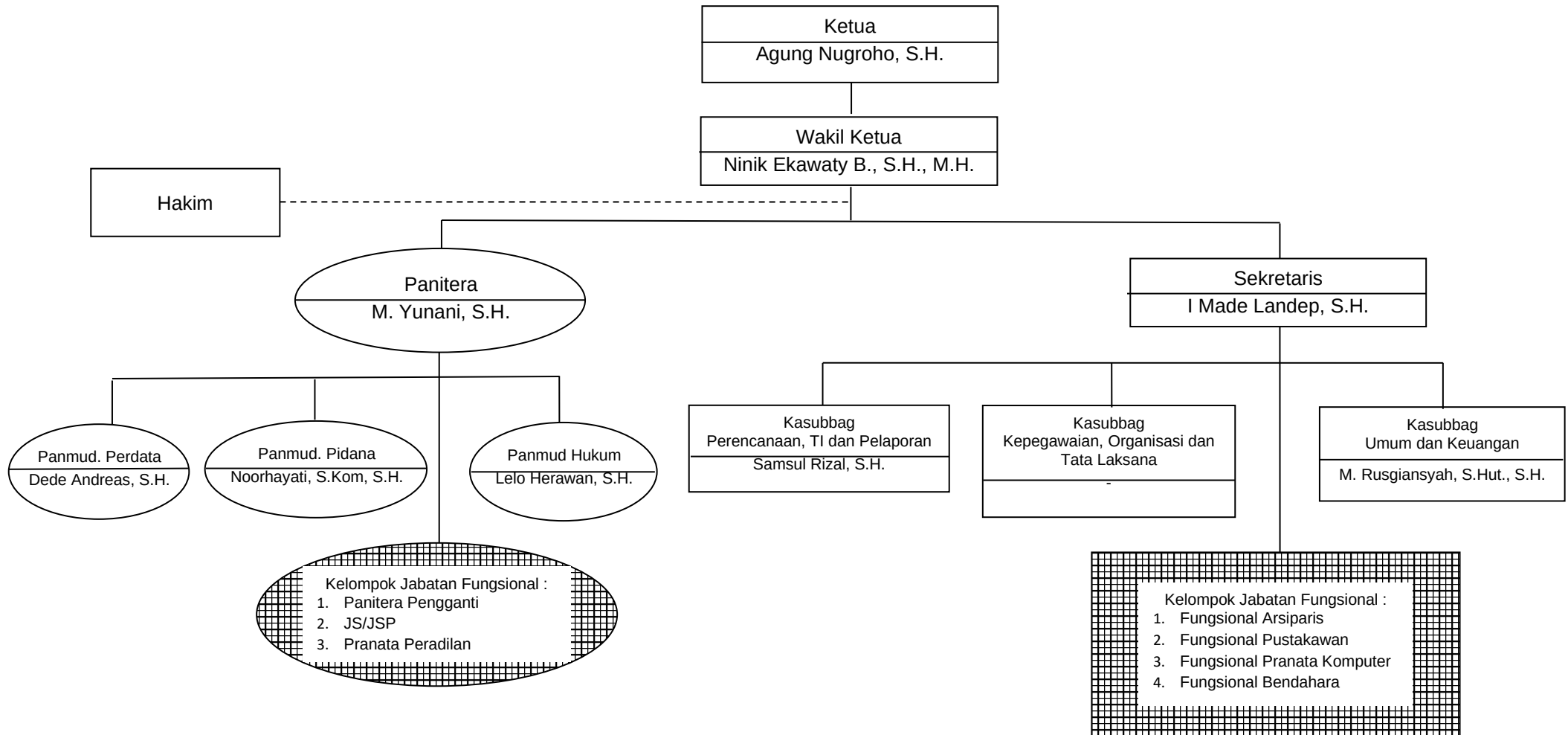
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II



XII. Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Agung Nugroho, S.H.	197203072000031003	Ketua
2.	Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.	197701122001122001	Wakil Ketua
3.	Chandran R Lumbanbatu, S.H., M.H.	198608152011011011	Hakim
4	M. Yunan, S.H.	196202011985031006	Panitera
5	I Made Landep, SH	197210041993031006	Sekretaris
6	Noorhayati, S.Kom.,S.H.	197708092009122002	Panmud. Pidana
7	Lelo Herawan, S.H.	198501142009041003	Panmud. Hukum
8	Dede Andreas, SH.	198202122005021003	Panmud. Perdata
9	Janward Sumuang Purba	197901102001121001	Juru Sita
10	Muhammad Rusgiansyah, S.Hut., S.H.	197209242006041014	Kasubbag. Umum Dan Keuangan
11	Samsul Rizal, S.H.	198404042006041004	Kasubbag. Perencanaan TI, Dan Pelaporan
12	Ishmatul Lu`Lu, S.H.	199312132017122001	Calon Hakim
13	Maria Faustina Beata, S.H.	199511132017122002	Calon Hakim
14	Silvia Kumalasari, S.H.	199408162017122002	Calon Hakim
15	Ismaya Salindri, S.H.	199105012017122002	Calon Hakim
16	Niken Anggi Prajanti, S.H.	198910082017122001	Calon Hakim
17	Niesya Mutiara Arindra, S.H	199210232017122001	Calon Hakim
18	Agewina, S.H., M.H.	198805212017122001	Calon Hakim
19	Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.	199402102017122002	Calon Hakim
20	Artha Uly, S.H., M.H.	198901282017122001	Calon Hakim
21	M. Zaldi Akbar, S.H.	199410122019031006	Analisis Perkara Peradilan
22	Reinhard Simanjuntak, S.H.	199408202019031005	Analisis SDM Aparatur
23	Geryawan		Honorar DIPA
24	Ahmad Faisal Rosadi		Honorar DIPA
25	Alfi Fahmi		Honorar DIPA
26	Sinta Kartika Sari		Honorar DIPA
27	M. Dian GM		Honorar DIPA
28	Oktaviana		Honorar DIPA
29	Rony		Honorar DIPA
30	Vicky Krisli		Honorar DIPA

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II



A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

1. Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

Pengadilan Tinggi Palangka Raya

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e	7	5	13
2	Pembina Utama Madya	IV/d	5	2	7
3	Pembina Utama Muda	IV/c	1		1
4	Pembina Tk. I	IV/b		1	1
5	Pembina	IV/a	2	1	3
6	Penata Tk. I	III/d	4	5	9
7	Penata	III/c	4	3	7
8	Penata Muda Tk. I	III/b	4	2	6
9	Penata Muda	III/a	2	1	3
10	Pengatur Tk. I	II/d		1	1
11	Pengatur	II/c		1	1
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1		1
13	Pengatur Muda	II/a			
14	Non Pangkat	-	12	1	13

Pengadilan Negeri Palangka Raya

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e			
2	Pembina Utama Madya	IV/d	1		1
3	Pembina Utama Muda	IV/c	2		2
4	Pembina Tk. I	IV/b	1	2	3
5	Pembina	IV/a	2	3	5
6	Penata Tk. I	III/d	2	9	11
7	Penata	III/c	6	7	13
8	Penata Muda Tk. I	III/b	1	5	6
9	Penata Muda	III/a	1	2	3
10	Pengatur Tk. I	II/d			
11	Pengatur	II/c			
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1		1
13	Pengatur Muda	II/a			
14	Non Pangkat	-	21	3	24

Pengadilan Negeri Sampit

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e			
2	Pembina Utama Madya	IV/d			
3	Pembina Utama Muda	IV/c			
4	Pembina Tk. I	IV/b	1		1
5	Pembina	IV/a	2	1	3
6	Penata Tk. I	III/d	11	1	12

7	Penata	III/c	3	2	5
8	Penata Muda Tk. I	III/b	3	2	5
9	Penata Muda	III/a	4	1	5
10	Pengatur Tk. I	II/d			
11	Pengatur	II/c	1		1
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b			
13	Pengatur Muda	II/a			
14	Non Pangkat	-	12	4	16

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e			
2	Pembina Utama Madya	IV/d			
3	Pembina Utama Muda	IV/c			
4	Pembina Tk. I	IV/b	1		1
5	Pembina	IV/a	1		1
6	Penata Tk. I	III/d	3	1	4
7	Penata	III/c	7		7
8	Penata Muda Tk. I	III/b	2		2
9	Penata Muda	III/a	3	2	5
10	Pengatur Tk. I	II/d	1		1
11	Pengatur	II/c	1		1
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1		1
13	Pengatur Muda	II/a			
14	Non Pangkat	-	7	5	12

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e			
2	Pembina Utama Madya	IV/d			
3	Pembina Utama Muda	IV/c			
4	Pembina Tk. I	IV/b	1		1
5	Pembina	IV/a	1		1
6	Penata Tk. I	III/d	3	4	7
7	Penata	III/c	2	3	5
8	Penata Muda Tk. I	III/b	2	1	3
9	Penata Muda	III/a	2	5	7
10	Pengatur Tk. I	II/d			
11	Pengatur	II/c	1		1
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b			
13	Pengatur Muda	II/a			
14	Non Pangkat	-	9	1	10

Pengadilan Negeri Muara Teweh

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e			
2	Pembina Utama Madya	IV/d			
3	Pembina Utama Muda	IV/c			
4	Pembina Tk. I	IV/b			
5	Pembina	IV/a	2		2
6	Penata Tk. I	III/d	2		2
7	Penata	III/c	3	3	6
8	Penata Muda Tk. I	III/b	1	1	2
9	Penata Muda	III/a	7	1	8
10	Pengatur Tk. I	II/d	1		1
11	Pengatur	II/c			
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	2		2
13	Pengatur Muda	II/a			
14	Juru Tk. I	I/d	1		1
15	Non Pangkat	-	7	3	10

Pengadilan Negeri Buntok

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e			
2	Pembina Utama Madya	IV/d			
3	Pembina Utama Muda	IV/c			
4	Pembina Tk. I	IV/b			
5	Pembina	IV/a	2		2
6	Penata Tk. I	III/d	1		1
7	Penata	III/c	2	2	4
8	Penata Muda Tk. I	III/b	1	2	3
9	Penata Muda	III/a	5	1	6
10	Pengatur Tk. I	II/d			
11	Pengatur	II/c			
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	2		2
13	Pengatur Muda	II/a			
14	Non Pangkat	-	5	4	9

Pengadilan Negeri Tamiang Layang

No.	Pangkat	Golongan	JenisKelamin		Jumlah
			L	P	
1.	Pembina Utama	IV/e			
2.	Pembina Utama Madya	IV/d			
3.	Pembina Utama Muda	IV/c			
4.	Pembina Tk. I	IV/b			
5.	Pembina	IV/a	1		1
6.	Penata Tk. I	III/d	3	1	4
7.	Penata	III/c	4	1	5
8.	Penata Muda Tk. I	III/b	4	2	6

9.	Penata Muda	III/a	4		4
10.	Pengatur Tk. I	II/d			
11.	Pengatur	II/c			
12.	Pengatur Muda Tk. I	II/b			
13.	Pengatur Muda	II/a			
14.	Non Pangkat	-	5	1	6

Pengadilan Negeri Kasongan

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e			
2	Pembina Utama Madya	IV/d			
3	Pembina Utama Muda	IV/c			
4	Pembina Tk. I	IV/b			
5	Pembina	IV/a	1		1
6	Penata Tk. I	III/d	5		5
7	Penata	III/c	3	2	5
8	Penata Muda Tk. I	III/b	3	1	4
9	Penata Muda	III/a	3	1	4
10	Pengatur Tk. I	II/d	1	1	2
11	Pengatur	II/c			
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b			
13	Pengatur Muda	II/a			
14	Non Pangkat	-	4	3	7

Pengadilan Negeri Kuala Kurun

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e			
2	Pembina Utama Madya	IV/d			
3	Pembina Utama Muda	IV/c			
4	Pembina Tk. I	IV/b			
5	Pembina	IV/a	2		2
6	Penata Tk. I	III/d	2		2
7	Penata	III/c	4	1	5
8	Penata Muda Tk. I	III/b			
9	Penata Muda	III/a	11	1	12
10	Pengatur Tk. I	II/d	1		1
11	Pengatur	II/c			
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b			
13	Pengatur Muda	II/a			
14	Non Pangkat	-	5	3	8

Pengadilan Negeri Nanga Bulik

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e			
2	Pembina Utama Madya	IV/d			

3	Pembina Utama Muda	IV/c			
4	Pembina Tk. I	IV/b			
5	Pembina	IV/a	2		2
6	Penata Tk. I	III/d	1		1
7	Penata	III/c	6		6
8	Penata Muda Tk. I	III/b			
9	Penata Muda	III/a	9	3	12
10	Pengatur Tk. I	II/d			
11	Pengatur	II/c			
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b			
13	Pengatur Muda	II/a			
14	Non Pangkat	-	4	6	10

Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e			
2	Pembina Utama Madya	IV/d			
3	Pembina Utama Muda	IV/c			
4	Pembina Tk. I	IV/b			
5	Pembina	IV/a	1	1	2
6	Penata Tk. I	III/d	1		1
7	Penata	III/c	3	1	4
8	Penata Muda Tk. I	III/b	2		2
9	Penata Muda	III/a	3	9	12
10	Pengatur Tk. I	II/d	1		1
11	Pengatur	II/c			
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b			
13	Pengatur Muda	II/a			
14	Non Pangkat	-	6	2	8

2. Berdasarkan Pendidikan

Pengadilan Tinggi Palangka Raya

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)	1		
2	Magister (S-2)	11	8	19
3	Sarjana (S-1)	22	14	36
4	Diploma (D-3)	2		2
5	SLTA/Sederajat	7	1	8
6	SLTP/Sederajat			
7	SD/Sederajat			
8	Non Pendidikan	1		1

Pengadilan Negeri Palangka Raya

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)			
2	Magister (S-2)	10	7	17
3	Sarjana (S-1)	12	21	33
4	Diploma (D-3)	3	2	5
5	SLTA/Sederajat	12	1	13
6	SLTP/Sederajat	1		1
7	SD/Sederajat			
8	Non Pendidikan			

Pengadilan Negeri Sampit

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)			
2	Magister (S-2)	8	1	9
3	Sarjana (S-1)	17	6	23
4	Diploma (D-3)	2		2
5	SLTA/Sederajat	9	4	13
6	SLTP/Sederajat			
7	SD/Sederajat			
8	Non Pendidikan	1		1

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)			
2	Magister (S-2)	3		3
3	Sarjana (S-1)	13	4	17
4	Diploma (D-3)	2		2
5	SLTA/Sederajat	8	5	13
6	SLTP/Sederajat			
7	SD/Sederajat			
8	Non Pendidikan			

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)			
2	Magister (S-2)	3	1	4
3	Sarjana (S-1)	10	11	21
4	Diploma (D-3)			
5	SLTA/Sederajat	8	2	10
6	SLTP/Sederajat			
7	SD/Sederajat			
8	Non Pendidikan			

Pengadilan Negeri Muara Teweh

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)			
2	Magister (S-2)	3	1	4
3	Sarjana (S-1)	12	3	15
4	Diploma (D-3)			
5	SLTA/Sederajat	11	4	15
6	SLTP/Sederajat			
7	SD/Sederajat			
8	Non Pendidikan			

Pengadilan Negeri Buntok

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)			
2	Magister (S-2)	1		1
3	Sarjana (S-1)	10		14
4	Diploma (D-3)		1	1
5	SLTA/Sederajat			2
6	SLTP/Sederajat			
7	SD/Sederajat			
8	Non Pendidikan			

Pengadilan Negeri Tamiang Layang

No.	Jenjang Pendidikan	JenisKelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Doktoral (S-3)			
2.	Magister (S-2)	2		2
3.	Sarjana (S-1)	18	1	19
4.	Diploma (D-3)		1	1
5.	SLTA/Sederajat	5	2	7
6.	SLTP/Sederajat	1		1
7.	SD/Sederajat			
8.	Non Pendidikan			

Pengadilan Negeri Kasongan

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)			
2	Magister (S-2)	2		2
3	Sarjana (S-1)	12	5	17
4	Diploma (D-3)	1		1
5	SLTA/Sederajat	5	2	7
6	SLTP/Sederajat		1	1
7	SD/Sederajat			
8	Non Pendidikan			

Pengadilan Negeri Kuala Kurun

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)			
2	Magister (S-2)	3		3
3	Sarjana (S-1)	18	3	21
4	Diploma (D-3)		1	1
5	SLTA/Sederajat	4	1	5
6	SLTP/Sederajat			
7	SD/Sederajat			
8	Non Pendidikan			

Pengadilan Negeri Nanga Bulik

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)			
2	Magister (S-2)	1		1
3	Sarjana (S-1)	17	5	22
4	Diploma (D-3)			
5	SLTA/Sederajat	4	4	8
6	SLTP/Sederajat			
7	SD/Sederajat			
8	Non Pendidikan			

Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)			
2	Magister (S-2)	2	1	3
3	Sarjana (S-1)	8	10	18
4	Diploma (D-3)			
5	SLTA/Sederajat	7	2	9
6	SLTP/Sederajat			
7	SD/Sederajat			
8	Non Pendidikan			

B. MUTASI

- Data Mutasi Masuk Tahun 2019

No	Nama	Jabatan/Satker Lama	Jabatan/Satker Baru
1	H. Mochamad Hatta, S.H., M.H.	WKPT Tanjung Karang	KPT Palangka Raya
2	Roki Panjaitan, S.H.	Panitera Muda Pidana Khusus MA-RI	WKPT Palangka Raya
3	Houtman Lumban Tobing, S.H.	Hakim Tinggi PT Jayapura	Hakim Tinggi PT Palangka Raya
4	Heru Prakosa, S.H., M.H.	Hakim PN Bandung	Hakim Tinggi PT Palangka Raya
5	Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H.	Hakim Yustisial	Hakim Tinggi PT

		Mahkamah Agung RI	Palangka Raya
6	Richard Silalahi, S.H.	Hakim PN Medan	Hakim Tinggi PT Palangka Raya
7	Nawaji, S.H.	Hakim PN Bandung	Hakim Tinggi PT Palangka Raya
8	DR. Andreas Eno Tirtakusuma, S.H., M.H.	Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tk. Banding	Hakim Ad Hoc Tipikor PT Palangka Raya
9	Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.	Hakim PN Labuan Bajo	Hakim Non Palu pada PT Palangka Raya
10	Sylvi Enggriani, S.H.	Pelaksana PN Pangkalan Bun	Pelaksana PT Palangka Raya
11	Abdul Yusuf, S.Sos.	-	Analisis Kepegawaian PT Palangka Raya
12	Bangga Crysto Tarigan, A.Md.	Pengelola Sistem Jaringan dan TI PN Nanga Bulik	Ditugaskan di PT Palangka Raya
13	Robert Asintongan P., A.Md.	Pengelola Sistem Jaringan dan TI PN Kuala Kurun	Ditugaskan di PT Palangka Raya
14	Sulaiman, S.H., M.H.	Panitera PN Surakarta	Panitera PT Palangka Raya
15	Paskatu Hardinata, S.H., M.H.	WKPN Palu	KPN Palangka Raya
16	Irfanul Hakim, S.H., M.H.	WKPN Tanah Grogot	Hakim PN Palangka Raya
17	Harif Jauhari, S.H., M.H.	Panitera PN Cianjur	Panitera PN P. Raya
18	Bambang Sukino, S.H., M.H.	Panmud. Pidana PN Sampit	Panmud. Perdata PN P. Raya
19	Linda, S.H.	Panitera PN Kotabaru	PP PN P. Raya
20	Sari Ramadhaniati, S.H.	PP PN Kasongan	PP PN P. Raya
21	Ika Melinda Meliala, S.H.	PP PN Buntok	PP PN P. Raya
22	Berly, S.E., S.H.	Panitera Pengganti PN Palangka Raya	Panitera Muda Pidana PN Sampit
23	Darminto Hutasoit, S.H., M.H.	KPN Kuala Kurun	WKPN Sampit
24	Abu Achmad Sidqi Amsya,.SH	KPN Tanjung Redep	WKPN Pangkalan Bun
25	Heru Karyono, SH.	Hakim PN Bengkayang	Hakim PN Pangkalan Bun
26	Mulia Rizky, SE		Analisis SDM Aparatur
27	M. Guntur, SH.		Analisis Pranata Peradilan
28	Yogi Nugraha Putra, A.Md.T		Pengelola Sistem dan Jaringan
29	Ruslan Hendra Irawan, SH. MH	KPN Bantaeng	KPN Kuala Kapuas
30	Haga Sentosa Lase, SH. MH	Hakim PN Kepanjen	WKPN Kuala Kapuas
31	Leo Sukarno, S.H.	Hakim PN Ambon	WKPN Buntok
32	Supriadi, S.H.	Panmud. Perdata PN P. Raya	Panitera PN Buntok
33	Muhamad Fadli, S.H.	PP PN Muara Teweh	PP PN Kasongan

34	Toni Aprianto, S.H.		Analisis Perkara Peradilan
35	Aris Editio Telaumbanua, S.H.		Analisis SDM Aparatur
36	Didid Suhartono, S.H.	PP PN Muara Teweh	PP PN Kuala Kurun
37	Surtiyono, S.H., M.H.	Hakim PN Kepanjen	WKPN Kuala Kurun
38	Achmad Syahrui, A.Md.	Pelaksana PT Palangka Raya	Kasubbag. PTIP PN Kuala Kurun

- Data Mutasi Keluar Tahun 2019

No	Nama	Jabatan/Satker Lama	Jabatan/Satker Baru
1	Umbu Jama, S.H.	Hakim Tinggi PT Palangka Raya	Hakim Tinggi PT Banten
2	Bambang Widiyatmoko, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Palangka Raya	Hakim Tinggi PT Yogyakarta
3	Juslak Arthur Lanifanik Balukh, S.H.	Panitera Pengganti PT Palangka Raya	Panitera Pengganti PT Mataram
4	Bambang Sukino, S.H.	Panitera Muda Pidana PN Sampit	Panitera Muda Perdata PN Palangka Raya
5	Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.	KPN Sampit	Hakim PN Surakarta
6	Achmad Syahrui, A.Md.	Pelaksana PT Palangka Raya	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan PN Kuala Kurun
7	Elly Endang Dahliani, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Palangka Raya	Hakim Tinggi PT Bandung
8	A.A. GD. Agung Parnata, SH., CN	KPN Pangkalan Bun	Ketua Pengadilan Negeri Blitar
9	Yelly Febdriyanti, SH.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkal Pinang
10	Sylvi Enggriani, SH	Pelaksana pada Kepaniteraan Pidana PN Pangkalan Bun	Pelaksana pada PT Palangka Raya
11	Isnandar Syahputra, SH. MH	Hakim pada PN Kuala Kapuas	Hakim pada PN Tanjung Pati
12	Nurhayati Nasution, SH. MH	KPN Kuala Kapuas	Hakim pada PN Bale Bandung
13	Putu Endru Sonata, SH. MH	WKPN Kuala Kapuas	KPN Semarang
14	Febrian Ali, S.H., M.H.	WKPN Muara Teweh	KPN Unaha
15	Didid Suhartono, SH	Panitera Pengganti PN Muara Teweh	Panitera Pengganti PN Kuala Kurun
16	Muhamad Fadli, SH	Panitera Pengganti PN Muara Teweh	Panitera Pengganti PN Kasongan
17	Hairatun Naemma, SH	Pelaksana Kepaniteraan Perdata	Panitera Pengganti PN

		PN Muara Teweh	Paringin
18	Ade Suherman, S.H., M.H.	WKPN Buntok	KPN Kalianda
19	Agustinus, S.H.	Hakim PN Buntok	Hakim PN Cibadak
20	Budian Noor, S.H.	Panitera Pengadilan Negeri Buntok	Panitera PN Marabahan
21	Ika Melinda Meliala, S.H.	Panitera Pengganti PN Buntok	Panitera Pengganti PN Palangka Raya
22	Maskur Hidayat, S.H., M.H.	KPN Tamiang Layang	KPN Bangkalan
23	Endang Sulistiono, S.H.	Panitera Pengganti PN Tamiang Layang	Panitera Pengganti PN Mentok
24	Sari Ramadhaniati, S.H.	Panitera Pengganti PN Kasongan	Panitera Pengganti PN Palangka Raya
25	Darminto Hutasoit, S.H., M.H.	KPN Kuala Kurun	WKPN Sampit
26	Roberto Asintongan P., A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan PN Kuala Kurun	Pengelola Sistem dan Jaringan PT P. Raya (Penugasan)
27	Bangga Crysto Tarigan, A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan PN Nanga Bulik	Pengelola Sistem dan Jaringan PT P. Raya (Penugasan)

D. PROMOSI

Data Promosi Selama Tahun 2019

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Achmad Syahruji, A.Md.	Pelaksana PT Palangka Raya	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan PN Kuala Kurun
2	Junipar Munthe, S.H.	Pelaksana PN Sampit	PP PN Sampit
3	Bayu Sistiawan, A.Md.	JSP PN Sampit	JS PN Sampit
4	A. F. Joko Sutrisno, S.H., M.H.	WKPN Sampit	KPN Sampit
5	Dimas Amoroso Aning W., S.Kom.	Pelaksana PN Sampit	Kasubbag. Umum dan Keuangan PN Sampit
6	Abu Achmad Sidqi Amsya, SH	WKPN Pangkalan Bun	KPN Pangkalan Bun
7	Fernandos Pasaribu, SH	Pelaksana PN Kuala Kapuas	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan PN Kuala Kapuas
8	Maryanti Aritonang, SE	Pelaksana PN Muara Teweh	Kasubbag Kepegawaian Organisasi Dan Tata Laksana PN Muara Teweh
9	Agustinus, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Buntok	Hakim PN Cibadak
10	Budian Noor, S.H.	Panitera Pengadilan Negeri Buntok	Panitera PN Marabahan
11	Ika Melinda Meliala, S.H.	Panitera Pengganti	Panitera

		Pengadilan Negeri Buntok	Pengganti PN P. Raya
12	Fridho Tumon, S.H.	Panitera Pengganti PN Buntok	Panmud. Pidana PN Buntok
13	Sripah Nadiawati, S.H.	Panitera Pengganti PN Buntok	Panitera Muda Hukum PN Buntok
14	Chelvia, A.Md	Jurusita Pengganti PN Buntok	Kasubbag. Umum Dan Keuangan PN Buntok
15	Yuris.S.	Pelaksana	Jurusita Pengganti PN Buntok
16	Maskur Hidayat, S.H., M.H.	KPN Tamiang Layang	KPN Bangkalan
17	Deni Indrayana, S.H., M.H.	WKPN Tamiang Layang	KPN Tamiang Layang
18	Zabal Akbar, S.H.	Pelaksana	JurusitaPengganti
19	Ricky Darmawan, S.H., M.H.	Pelaksana PN Kasongan	Jurusita Pengganti PN Kasongan
20	Faros Ashdaq, A.Md.	Pelaksana PN Kasongan	Jurusita Pengganti PN Kasongan
21	Rudy Ruswoyo, S.H., M.H.	WKPN Kuala Kurun	KPN Kuala Kurun
22	Surtiyono, S.H., M.H.	Hakim PN Kepanjen	WKPN Kuala Kurun

C. Pensiun dan Pemberhentian

Data Pensiun dan Pemberhentian Selama Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	TMT Pensiun/Pemberhentian	Keterangan
1	Drs. Philip, S.H.	Panitera PT Palangka Raya	1 Juli 2019	BUP
2	Abdul Khamid, S.H., M.H.	Sekretaris PT Palangka Raya	1 Juli 2019	BUP
3	Dulaimi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Palangka Raya	10 Februari 2019	Pensiun Meninggal
4	Sutarno, S.Kom.	Kasubbag. Umum dan Keuangan PN Sampit	1 Mei 2019	Pensiun Meninggal
5	Poniran	JS PN Sampit	1 Juni 2019	Pensiun Meninggal
6	Nordiansyah, SH.	Jurusita PN Pangkalan Bun	1 Februari 2019	Pensiun Meninggal
7	Sri Artuti	Panitera Muda Perdata PN Buntok	1 Juni 2019	BUP
8	Kasrani	Juru Sita PN Buntok		Pensiun Meninggal

D. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Data Tenaga Teknis/Non Teknis yang Mengikuti Diklat Selama Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Diklat yang Diikuti
1	H. Mochamad Hatta, S.H., M.H.	KPT Palangka Raya	Diklat Manajemen Media
2	Julius Siberium Timbung, S.E.	Pelaksana PT P. Raya	Diklat Analisis Kepegawaian
3	Abdul Yusuf, S.Sos.	Analisis Kepegawaian PT P. Raya	Pelatihan Dasar CPNS
4	Bangga Crysto Tarigan, A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan PN Nanga Bulik	Pelatihan Dasar CPNS
5	Roberto Asintongan P., A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan PN K. Kurun	Pelatihan Dasar CPNS
6	Lela Yulianty, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc PHI PN P. Raya	Diklat Sertifikasi Hakim PHI
7	M. Suhri Burhan, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc PHI PN P. Raya	Diklat Sertifikasi Hakim PHI
8	Dian Kurniawati, S.H., M.H.	Hakim PN P. Raya	Diklat Teknis Tindak Pidana di Bid. Perpajakan dan Diklat Terpadu Karhutla
9	Jimmy Ray Ie, S.H.	Hakim PN P. Raya	Diklat Terpadu Mineral dan Batubara
10	Paisol, S.H., M.H.	Hakim PN Sampit	Diklat Hakim Tipikor
11	Ade Satriawan, S.H., M.H.	Hakim PN Sampit	Diklat PHI
12	Doni Prianto, S.H.	Hakim PN Sampit	Diklat Perikanan
13	Andri Firmansyah, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PN Sampit	Pelatihan Dasar CPNS
14	Mario Tyson Nadapdap, S.E.	Analisis SDM Aparatur PN Sampit	Pelatihan Dasar CPNS
15	Indra Lasmono, A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan PN sampit	Pelatihan Dasar CPNS
16	Mulia Rizky, SE	Analisis SDM Aparatur PN Pangkalan Bun	Pelatihan Dasar CPNS
17	M. Guntur, SH	Analisis Pranata Peradilan PN Pangkalan Bun	Pelatihan Dasar CPNS
18	Yogi Nugraha Putra, A.Md.T	Pengelola Sistem dan Jaringan PN Pangkalan Bun	Pelatihan Dasar CPNS
19	Ruslan Hendra Irawan, SH. MH	Ketua PN kapuas	Diklat Hakim Lingkungan Hidup
20	Dody Pandiangan, SE	Analisis SDM Aparatur	Pelatihan Dasar

		PN Kuala Kapuas	CPNS
21	Putri Nugraheni Septyaningrum, SH	Calon Hakim PN kapuas	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
22	Anugerah Merdekawaty Maesya P, SH	Calon Hakim PN kapuas	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
23	Inggit Suci Pratiwi, SH	Calon Hakim PN kapuas	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
24	Wuri Mulyandari, SH	Calon Hakim PN kapuas	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
25	Cipto Hosari Parsaoran Nababan, Sh., Mh	KPN Muara Teweh	Diklat Manejemen Risiko dan Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
26	Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.	Calon Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas Ii	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
27	Muhammad Sabil Ryandika, S.H.	Calon Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas Ii	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
28	Mohammad Pandi Alam, S.H.	Calon Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas Ii	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
29	Edi Rahmad, S.H.	Calon Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas Ii	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
31	Leo Sukarno, S.H.	WKPN Buntok	Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
32	Arlin Lu'luul Maulidya, S.E.	Sekretaris PN Buntok	Diklat. Pim. Tk. IV dan Diklat Sekretaris
33	Firdaus Amin, S.E.	Analisis Sdm Aparatur PN Buntok	Pelatihan Dasar CPNS
34	Arifin Budiman, S.H.	Calon Hakim PN Buntok	Pendidikan dan Pelatihan Calon

			Hakim (PPC) Terpadu
35	Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.	Calon Hakim PN Buntok	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
36	Fega Uktolseja, S.H.	Calon Hakim PN Buntok	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
37	Elton Mayo, S.H.	Calon Hakim PN Buntok	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
38	Deni Indrayana, S.H., M.H.	KPN Tamiang Layang	Diklat Hakim Lingkungan Hidup
39	Eddy Montana, S.H.	Calon Hakim PN Tamiang Layang	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
40	Kharisma Laras Sulu, S.H.	Calon Hakim PN Tamiang Layang	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
41	Febdhy Setyana, S.H.	Calon Hakim PN Tamiang Layang	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
42	Arief Heryogi, S.H.	Calon Hakim PN Tamiang Layang	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
43	Rudita Setya Hermawan, SH., MH.	KPN Kasongan	Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan dan Diklat Kepemimpinan dan TOT Leader
44	Afrian Faryandi, SH.	Calon Hakim PN Kasongan	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
45	Rinaldy Adipratama, SH.	Calon Hakim PN Kasongan	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
46	M. Iskandar Muda, SH.	Calon Hakim PN Kasongan	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC)

			Terpadu
47	Sartika Dewi Hapsari, SH.	Calon Hakim PN Kasongan	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
48	Mario Reymond Pandey Silalahi, S.H.	Calon Hakim PN K. Kurun	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
49	Fransiskus Sinurat, S.H.	Calon Hakim PN K. Kurun	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
50	Raden Guntar Anggaraputra Sudjata, S.H.	Calon Hakim PN K. Kurun	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
51	Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.	Calon Hakim PN K. Kurun	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
52	Patar Panjaitan, S.H.	Calon Hakim PN K. Kurun	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
53	Anjar Koholifano Mukti, S.H.	Calon Hakim PN K. Kurun	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
54	Rahmat Indera Satrya, S.H.	Calon Hakim PN K. Kurun	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
55	Kunti Kalma Syita, S.H.	Calon Hakim PN K. Kurun	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
56	Ruben Barcelona Hariandja, S.H.	Calon Hakim PN K. Kurun	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
57	Abi Kusuma Friestiawan Ahmad, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PN Kuala Kurun	Pelatihan Dasar CPNS
58	Tubagus Ramdan, S.E.	Analisis SDM Aparatur PN Kuala Kurun	Pelatihan Dasar CPNS
59	Mandes, S.Kom.	Sekretaris PN Nanga Bulik	Diklat Pim. Tk. IV
60	Tommy Manik, S.H.	KPN Nanga Bulik	Diklat Manajemen

			Risiko, Diklat Pemeriksaan Bukti Elektronik dan Diklat Manajemen Media
61	Aris Editio Telaumbanua, S.H.	Analisis SDM Aparatur PN Nanga Bulik	Pelatihan Dasar CPNS
62	Toni Aprianto, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PN Nanga Bulik	Pelatihan Dasar CPNS
63	Didik Nursetiawan, S.H.	Calon Hakim PN Nanga Bulik	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
64	Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.	Calon Hakim PN Nanga Bulik	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
65	Marshias Mereapul Ginting, S.H.	Calon Hakim PN Nanga Bulik	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
66	Istiani, S.H.	Calon Hakim PN Nanga Bulik	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
67	Rendi Abednego Sinaga, S.H.	Calon Hakim PN Nanga Bulik	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
68	Tony Arifuddin Sirait, S.H.	Calon Hakim PN Nanga Bulik	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
69	Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.	Calon Hakim PN Nanga Bulik	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
70	Noor Ibni Hasanah, S.H.	Calon Hakim PN Nanga Bulik	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
71	Elisabeth Panjaitan, S.H.	Calon Hakim PN Nanga Bulik	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
72	M. Zaldy Akbar, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PN Pulang	Pelatihan Dasar CPNS

		Pisau	
73	Reinhard Simanjuntak, S.H.	Analisis SDM Aparatur PN Pulang Pisau	Pelatihan Dasar CPNS
74	Ishmatul Lu'lu, S.H.	Calon Hakim PN Pulang Pisau	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
75	Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.	Calon Hakim PN Pulang Pisau	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
76	Niesya Mutiara Arindra, S.H.	Calon Hakim PN Pulang Pisau	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
77	Ismaya Salindri, S.H.	Calon Hakim PN Pulang Pisau	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
78	Maria Faustina Beata, S.H.	Calon Hakim PN Pulang Pisau	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
79	Artha Uly, S.H.	Calon Hakim PN Pulang Pisau	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
80	Agewina, S.H.	Calon Hakim PN Pulang Pisau	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
81	Niken Anggi Prajanti, S.H.	Calon Hakim PN Pulang Pisau	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
82	Silvia Kumalasari, S.H.	Calon Hakim PN Pulang Pisau	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu

E. HUKUMAN DISIPLIN

Data Hakim dan Pegawai yang Mendapat Hukuman Disiplin Selama Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Hukdis yang Diberikan	Tingkat Hukdis
1	Rosmini Huzaimah	Pelaksana PN Muara Teweh	Pembebasan dari Jabatan Panitera Pengganti PN Muara Teweh	Berat
2	Beny Sumarno, S.H., M.H.	Hakim PN Tamiang Layang	Teguran Lisan II	Ringan

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TI





BAB IV

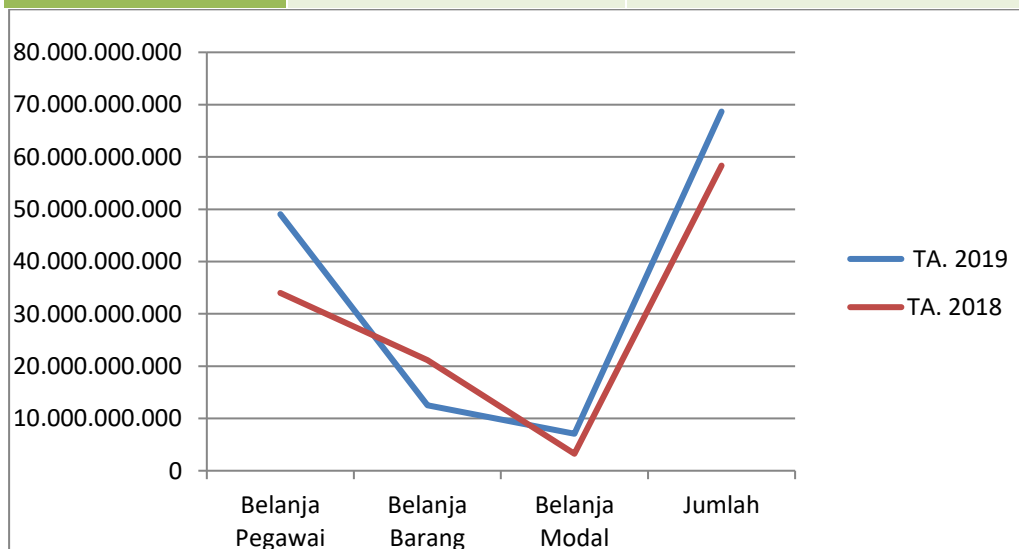
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANAN DAN PRASARANA DAN TI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Peradilan Umum se-Wilayah Hukum Kalimantan Tengah memperoleh anggaran sebesar **Rp.70.268.537.000** yang terdiri dari DIPA 01 BUA (Badan Urusan Administrasi) sebesar **Rp. 68.671.543.000** dan DIPA 03 BADILUM (Badan Peradilan Umum) sebesar **Rp. 1.596.994.000**. Anggaran tahun ini lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran tahun lalu karena pada tahun ini anggaran untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Anggaran Belanja terbagi ke dalam 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Jika dilihat dari pagu anggaran selama tahun 2019, maka anggaran paling besar adalah Belanja Pegawai yaitu sebesar **Rp. 49.077.728.000** atau sekitar 71.47 % dari jumlah Pagu anggaran yang ada, kemudian disusul oleh Belanja Barang sebesar **Rp. 12.523.837.000** atau 18.24 % dari total pagu anggaran, dan Belanja Modal dengan nilai pagu **Rp. 7.069.978.000** atau 10.30%.

Tabel : Perbandingan Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2018

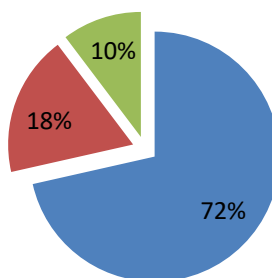
Jenis Belanja	Tahun 2019	Tahun 2018
Belanja Pegawai	Rp. 49.077.728.000	Rp. 33.970.602.000
Belanja Barang	Rp. 12.523.837.000	RP. 21.128.899.000
Belanja Modal	Rp. 7.069.978.000	Rp. 3.240.735.000
Jumlah	Rp. 68.671.543.000	Rp. 58.340.236.000



Grafik: Perbandingan Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2018

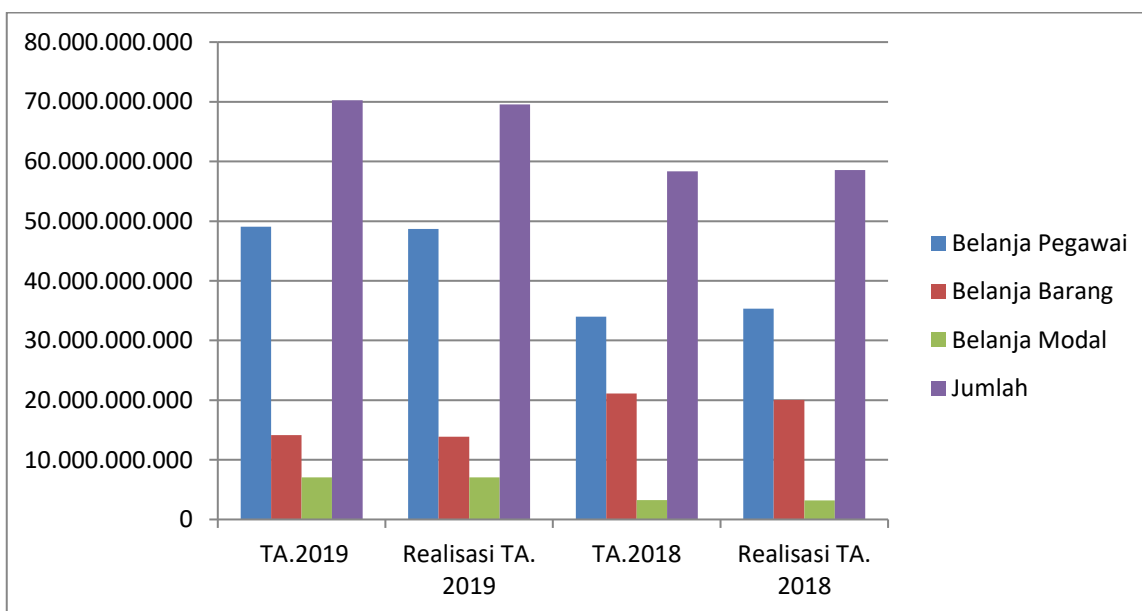
TAHUN ANGGARAN 2019

■ Belanja Pegawai ■ Belanja Barang ■ Belanja Modal



Grafik: Perbandingan Jenis Belanja

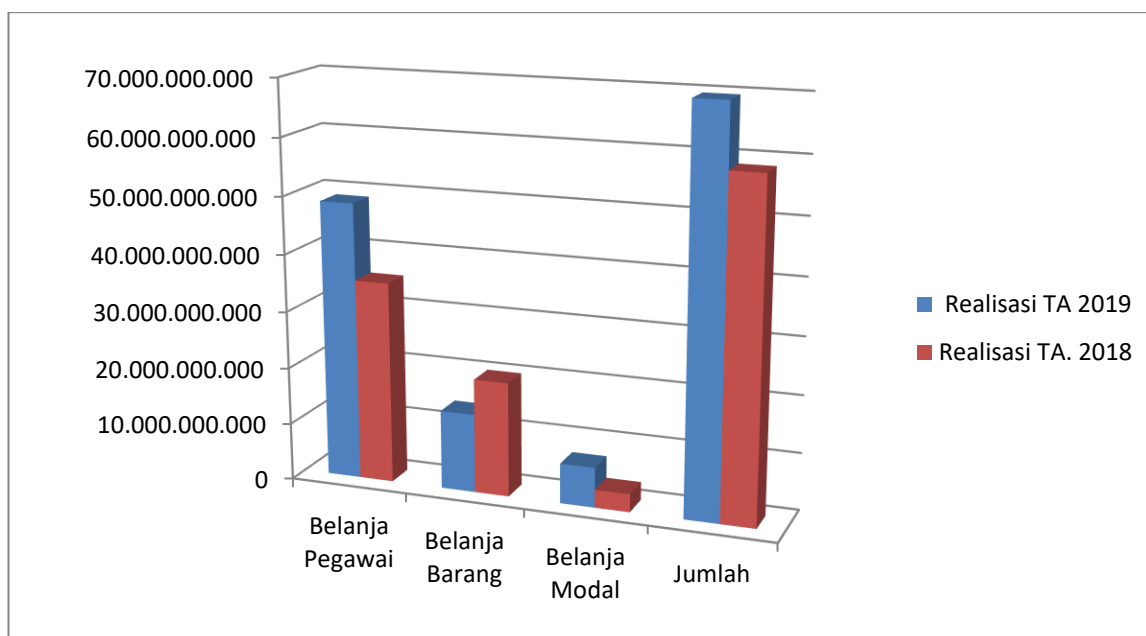
Realisasi belanja untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 69.538.010.293 dengan persentase 98.96% dari besarnya pagu anggaran, sedangkan tahun anggaran 2018 sebesar. 58.556.041.717 atau sebesar 100.37% dari besar Pagu anggaran. Jika dilihat dari persentase realisasi anggaran tahun ini realisasi anggaran tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia karena tidak ada terdapat pagu minus seperti tahun 2018 pada belanja pegawai (Akun 51). Realisasi DIPA 01 sebesar Rp. 67.966.392.249 atau 98.97% sedangkan untuk DIPA 03 realisasinya sebesar Rp.1.571.618.044 atau 98.41 %.



Grafik: Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran TA.2019 dan TA. 2018

Tabel: Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2018

Jenis Belanja	Pagu TA.2019 (Rp)	Realisasi TA. 2019 (Rp)	Pagu TA.2018 (Rp)	Realisasi TA. 2018 (Rp)
Belanja Pegawai	49.077.728.000	48.661.494.562	33.970.602.000	35.325.791.836
Belanja Barang	14.120.831.000	13.847.202.631	21.128.899.000	20.054.384.461
Belanja Modal	7.069.978.000	7.029.313.100	3.240.735.000	3.175.865.450
Jumlah	70.268.537.000	69.538.010.293	58.340.236.000	58.556.041.747



Grafik: Perbandingan Realisasi TA.2019 dan TA.2018

Adapun secara rinci Pagu dan realisasi pada setiap Pengadilan per DIPA dapat dijelaskan sebagai berikut:

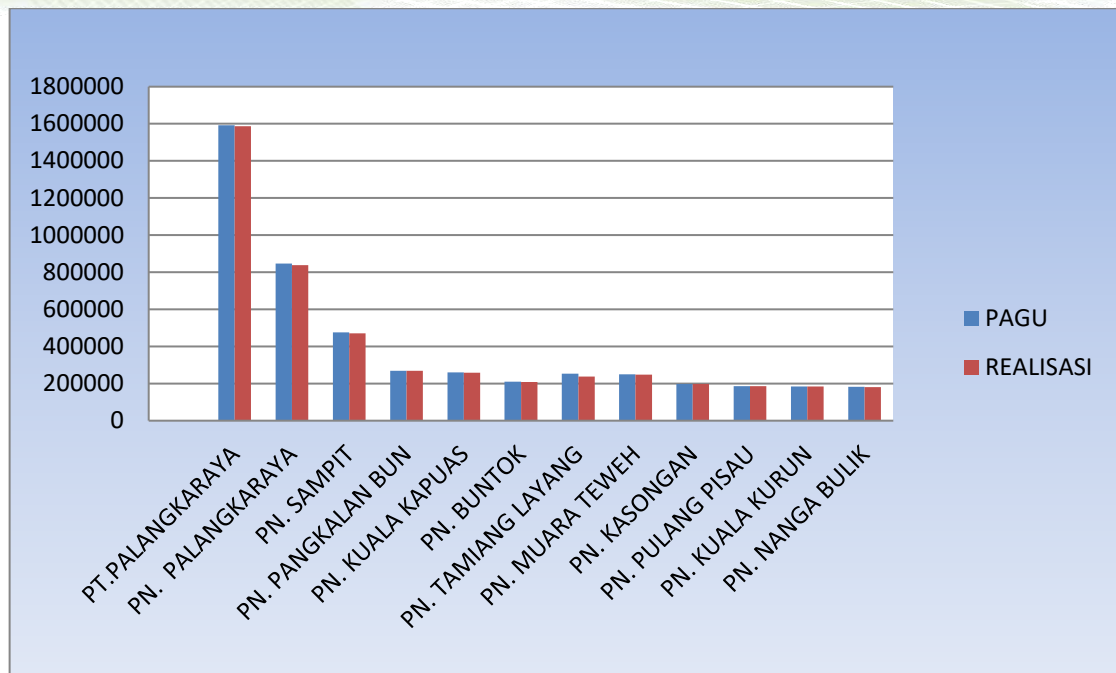
1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Total Pagu tahun 2019 sebesar Rp. 68.671.543.000 dan realisasi sebesar Rp. 67.966.392.249 atau 98.97%.

A. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai untuk pengadilan Se-Wilayah Hukum Kalimantan Tengah tahun 2019 Pagu sebesar Rp. 49.077.728.000 dengan realisasi sebesar Rp. 48.661.494.562 atau 99.15 %. Anggaran Belanja Pegawai pada setiap satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	15.928.107.000	15.861.261.830	66.845.170	99.58
2	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	8.460.852.000	8.387.480.683	73.371.317	99.13
3	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	4.753.121.000	4.714.822.460	38.298.540	99.19
4	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	2.696.015.000	2.688.627.834	7.387.166	99.73
5	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	2.597.433.000	2.578.827.638	18.605.362	99.28
6	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	2.107.154.000	2.085.941.363	21.212.637	98.99
7	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	2.537.483.000	2.383.508.336	153.974.664	93.93
8	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	2.505.940.000	2.476.873.396	29.066.604	98.84
9	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	1.974.523.000	1.973.117.633	1.405.367	99.93
10	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	1.860.360.000	1.860.328.076	31.924	99.99
11	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	1.835.600.000	1.834.566.067	1.033.933	99.94
12	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	1.821.140.000	1.816.139.246	5.000.754	99.73
	JUMLAH	49.077.728.000	48.661.494.562	416.233.438	99.15



Grafik: Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai TA.2019

B. Belanja Barang (52)

Pada tahun anggaran 2018 Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah mendapat anggaran sebesar Rp. 12.523.837.000 dengan pencapaian realisasi sebesar Rp. 12.275.584.587 dengan persentase sebesar 98.02%. Belanja Barang terdiri dari:

a) Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri:

- Belanja keperluan perkantoran;
- Belanja Langganan Daya dan Jasa;
- Belanja Pemeliharaan Kantor;
- Belanja Perjalanan Dinas
- Honor yang terkait dengan operasional Satker;
- Belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

b) Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.

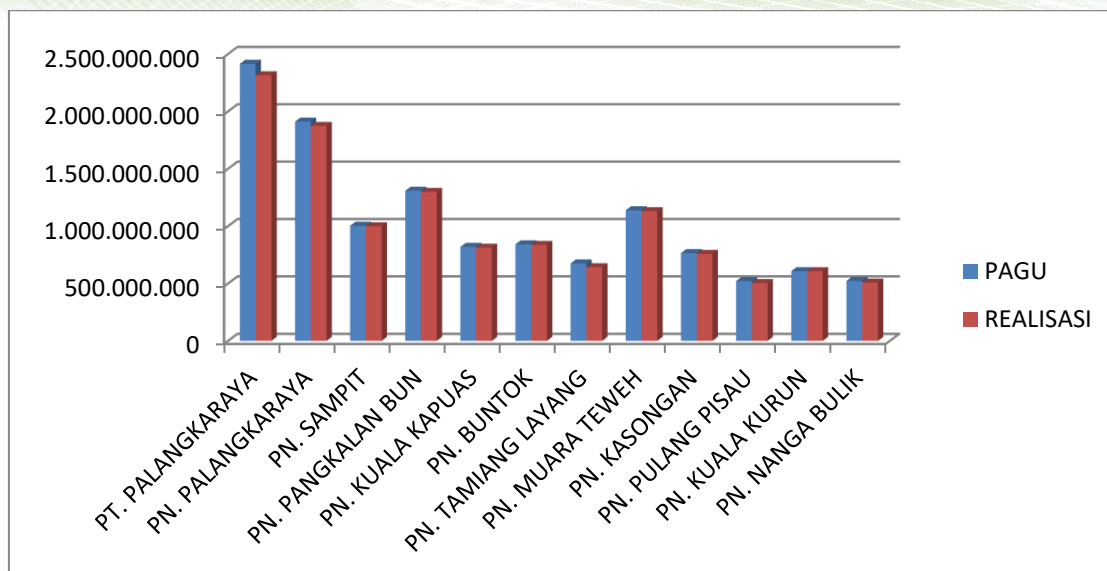
Jenis pengeluaran terdiri antara lain:

- Honor yang terkait dengan output kegiatan;

- b. Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kantor, antara lain biaya paket rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang transportasi lokal, biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan;

Tabel: Belanja Barang

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	2.414.094.000	2.314.127.398	99.966.602	95.86
2	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	1.910.479.000	1.872.877.737	37.601.263	98.03
3	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	1.002.754.000	998.012.368	4.741.632	99.53
4	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	1.307.817.000	1.297.420.570	10.396.430	99.21
5	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	818.847.000	811.964.213	6.882.787	99.16
6	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	841.469.000	835.310.491	6.158.509	99.27
7	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	674.617.000	641.794.332	32.822.668	95.13
8	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	1.138.382.000	1.129.521.094	8.860.906	99.22
9	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	764.448.000	757.501.032	6.946.968	99.09
10	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	521.310.000	503.272.592	18.037.408	96.54
11	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	607.310.000	606.630.972	679.028	99.89
12	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	522.310.000	507.151.788	15.158.212	97.10
	JUMLAH	12.523.837.000	12.275.584,587	715.045.631	98.02



Grafik: Pagu dan Realisasi Belanja Barang TA.2019

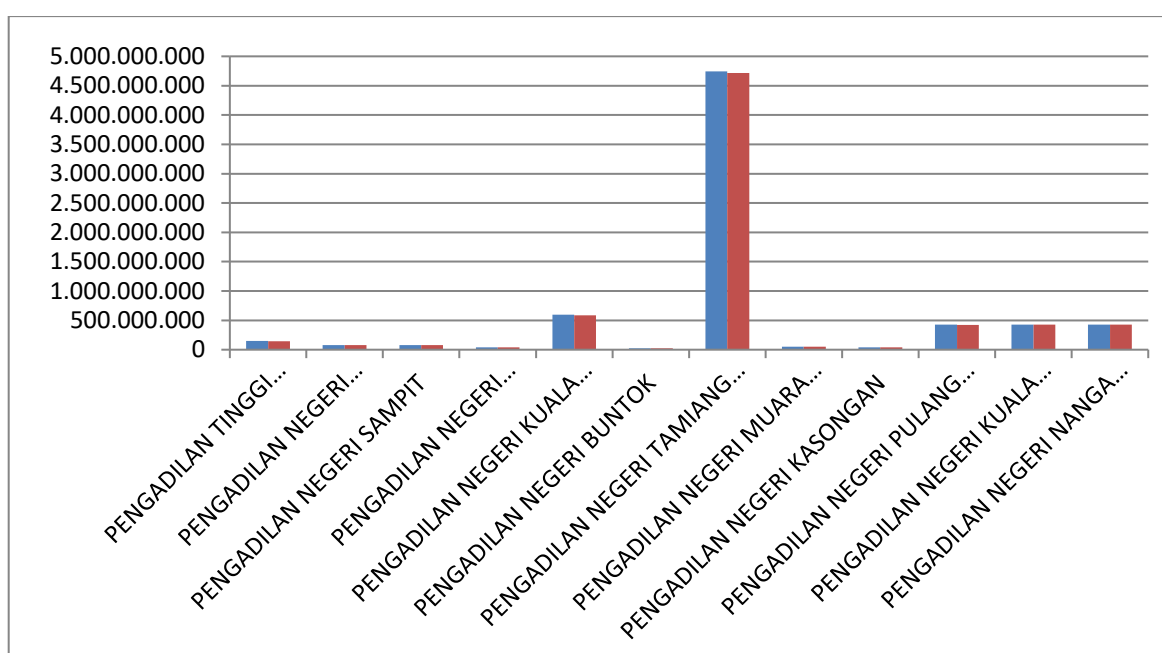
C. Belanja Modal (Akun 53)

Pada Tahun 2019 Belanja Modal untuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Umum Se-Kalimantan Tengah sebesar Rp. 7.069.978.000 dengan realisasi sebesar Rp. 7.029.313.100 atau mencapai 99.42 %. Apabila dilihat, belanja modal yang terlaksana yaitu berupa program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung, program tersebut dapat dikategorikan sudah mencapai sasaran sesuai target, yang bertujuan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan. Anggaran belanja Modal pada satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: Belanja Modal

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	146.500.000	144.666.500	1.833.500	98.75
2	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	78.000.000	77.747.000	253.000	99.68
3	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	78.000.000	75.680.000	2.320.000	97.03
4	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	39.000.000	39.000.000	0	100
5	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	594.478.000	586.602.431	7.875.569	98.67
6	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	26.000.000	25.500.000	500.000	98.08
7	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	4.742.000.000	4.715.061.059	26.938.941	99.43

8	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	52.000.000	52.000.000	0	100
9	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	39.000.000	39.000.000	0	100
10	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	425.000.000	424.210.410	789.590	99.81
11	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	425.000.000	424.855.000	145.000	99.97
12	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	425.000.000	424.990.700	9.300	99.99
	JUMLAH	7.069.978.000	7.029.313.100	1.833.500	99.42



Grafik: Pagu dan Realisasi Belanja Modal TA. 2019

2. DIPA 03 (Dirjen Badilum)

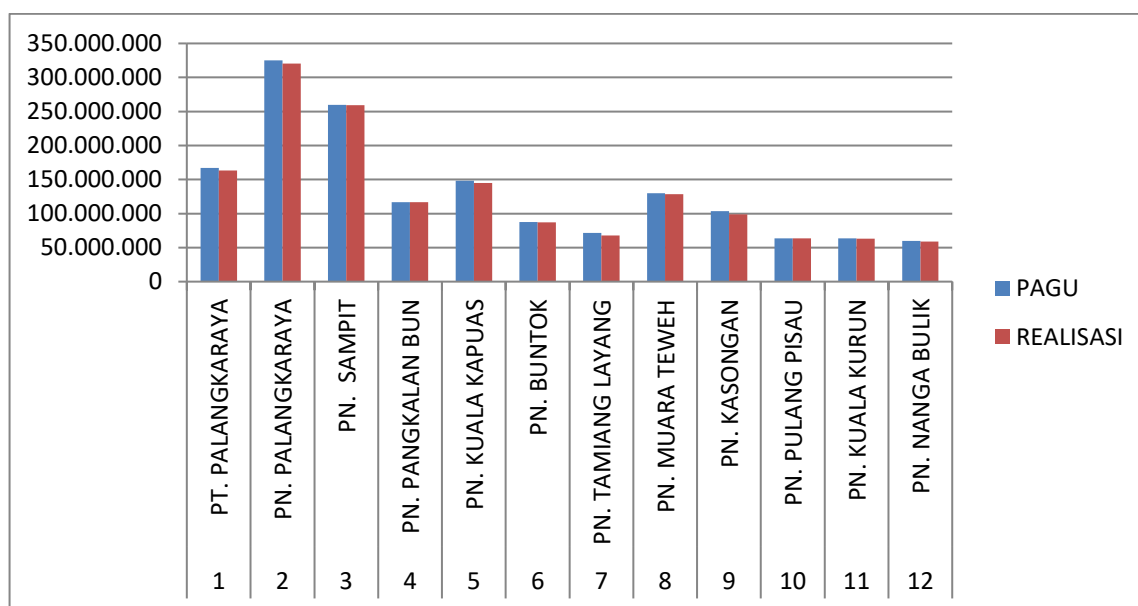
Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Tengah untuk DIPA 03 (Dirjen Badilum) mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.596.994.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.571.518.044 atau 98.40% dari pagu anggaran. DIPA 03 (Dirjen Badilum) hanya terdiri dari belanja barang saja. Belanja Barang tersebut digunakan untuk mendukung peningkatan manajemen peradilan, dengan tujuan agar perkara dapat terselesaikan tepat waktu baik pada Peradilan Tingkat Banding maupun Peradilan Umum lainnya. Belanja Barang terdiri dari :

- Belanja operasional terdiri dari belanja pengiriman surat dinas pos pusat.
- Belanja non operasional terdiri dari belanja bahan dan belanja non operasional lainnya.

- c) Belanja persediaan
- d) Belanja jasa untuk konsultasi
- e) Belanja perjalanan dinas

Tabel: Anggaran DIPA 03

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	167,169,000	163,098,576	4,070,424	97.57
2	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	325,335,000	320,562,500	4,772,500	98.53
3	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	259,730,000	259,251,495	478,505	99.82
4	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	116,700,000	116,691,000	9,000	99.99
5	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	148,250,000	144,800,000	3,450,000	97.67
6	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	87,520,000	87,056,760	463,240	99.47
7	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	71,640,000	67,673,000	3,967,000	94.46
8	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	130,120,000	128,344,310	1,775,690	98.64
9	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	103,400,000	98,852,000	4,548,000	95.60
10	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	63,700,000	63,414,950	285,050	99.55
11	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	63,700,000	63,135,000	565,000	99.11
12	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	59,730,000	58,738,453	991,547	98.34
	JUMLAH	1,596,994,000	1,571,618,044	25,375,956	98.41



Grafik: Pagu dan Realisasi Belanja Barang TA. 2019

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya terkhusus pada pengelolaan sarana dan prasarana merincikan tentang pelaksanaan pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung yang meliputi pengadaan, pemeliharaan dan usulan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dalam kurun waktu tahun anggaran 2019.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya saat ini mempunyai gedung perkantoran dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Gedung Kantor

Gedung kantor Pengadilan Tinggi Palangka Raya terbagi menjadi 2 gedung yaitu gedung depan dan gedung belakang. Gedung depan direnovasi pada tahun 2009 dengan 2 lantai dengan luas bangunan 2.544 m² serta gedung belakang juga dibangun pada tahun 2006 dengan 2 lantai dengan luas bangunan 1.600 m². Bangunan tersebut berdiri di atas tanah dengan luas 6.000 m² Sertipikat Hak Pakai No. 15 tanggal 17 Mei 1980 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan RTA. Milono No. 9 Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Ket
1	Ruang KPT	1	
2	Ruang WKPT	1	
3	Ruang Panitera	1	
4	Ruang Hakim Ad-Hoc Tipikor	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Panitera Pengganti	-	
7	Ruang Hakim Tinggi	5	
8	Ruang Kabag Umum dan Keuangan	1	
9	Ruang Sub bagian TU dan RT	1	
10	Ruang ATK	1	
11	Ruang Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	1	
12	Ruang Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	1	
13	Ruang Sub Bagian KP & IT	1	
14	Ruang Sub Bagian Rencana Program & Anggaran	1	
15	Ruang Pengaduan / Akreditasi	1	
16	Ruang Kepaniteraan Tipikor	1	
17	Ruang IT/Server	1	
18	Ruang Arsip Pidana	1	
19	Ruang Arsip Perdata	1	

20	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
21	Ruang Kepaniteraan Pidana dan Perdata	1	
22	Ruang Dokter dan Laktasi	1	
23	Ruang Perpustakaan	1	
24	Ruang Sidang	1	
25	Ruang Aula Pertemuan	1	
26	Ruang Arsip Kesekretariatan	1	
27	Mushola	1	
28	Ruang Kebaktian	1	
29	Gudang	2	
30	Toilet	16	

- Ruang Ketua yang terdiri dari ruang rapat, ruang tamu dan ruang kerja ketua;
- Ruang Wakil Ketua yang terdiri dari ruang kerja yang menyatu dengan ruang tamu;
- Ruang Panitera yang terdiri dari ruang kerja dan ruang tamu;
- Ruang Sekretaris yang terdiri dari ruang kerja dan ruang tamu;
- Ruang Hakim Tinggi pada tahun 2019 menjadi 5 (lima) ruangan dimana 4 (empat) ruangan diisi masing-masing 4 (empat) orang Hakim Tinggi dan 1 ruangan diisi oleh 2 (dua) orang Hakim Tinggi;
- Ruang Hakim Ad-Hoc TIPIKOR;
- Ruang Panitera Pengganti sementara dijadikan sebagai ruang Hakim Tinggi dikarenakan semua panitera pengganti diperbantukan di kepaniteraan pidana, perdata dan tipikor;
- Ruang Perpustakaan;
- Ruang Dokter dan Laktasi berada dalam ruang khusus yang bergabung dalam ruangan kepaniteraan Pidana dan Perdata;
- Ruang ATK berada dalam ruang khusus yang bergabung dengan ruang sub bagian tata usaha dan rumah tangga;
- Ruang Kepaniteraan Pidana dan Perdata;
- Ruang Kepaniteraan TIPIKOR;
- Ruang Kepaniteraan Hukum;
- Ruang Arsip Perdata;
- Ruang Arsip Pidana;
- Ruang IT/ Server;
- Ruang Pengaduan/Akreditasi;
- Ruang Sub Bagian Kepegawaian dan IT
- Ruang Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran;

- Ruang Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
- Ruang Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- Ruang Kabag Umum dan Keuangan;
- Ruang Kabag Perencanaan dan Kepegawaian;
- Ruang Aula Pertemuan Isen Mulang;
- Ruang Sidang;
- Ruang Arsip Kesekretariatan
- Mushola;
- Ruang Kebaktian/Ibadah;
- Gudang;
- Toilet yang terdiri dari 6 (enam) toilet umum dan 10 (sepuluh) toilet yang berada di dalam ruangan, 1 toilet umum yang lama difungsikan sebagai gudang dikarenakan tidak bisa berfungsi lagi.

2. Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			*Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1	Rumah Dinas Ketua	1	√			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√			
3	Rumah Dinas Hakim Tinggi	5	√			
4	Rumah Dinas Panitera	1	√			
5	Rumah Dinas Sekretaris	-	-	-	-	-
6	Rumah Dinas Wakil Panitera	1	√			Ditempati oleh Hakim Tinggi
7	Rumah Dinas Kabag Umum dan Keuangan	1	√			Ditempati oleh Hakim Tinggi

- Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 120 m² Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 2.000 m² Sertipikat nomor 22 tanggal 08 januari 2014 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan M.H. Thamrin No. 27 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m² Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.500 m² Sertipikat nomor 23 tanggal 19 maret 1981 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan M.H. Thamrin No. 29 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

- c) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m² Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.200 m² Sertipikat nomor 34 tanggal 17 mei 1980 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan G. Obos No. 5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Diperuntukan sebagai rumah dinas Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- d) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 120 m² Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.200 m² Sertipikat nomor 372 tanggal 12 april 1982 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Lambung Mangkurat No. 7 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- e) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 120 m² Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.181 m² Sertipikat nomor 373 tanggal 12 april 1982 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Lambung Mangkurat No. 9 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- f) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 120 m² Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.200 m² Sertipikat nomor 37 tanggal 17 mei 1980 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan G. Obos No. 3 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- g) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 120 m² Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah luas 750 m² dengan Sertipikat nomor 824 tanggal 20 februari 1985 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Baban No. 18 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- h) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 120 m² Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.200 m² Sertipikat nomor 36 tanggal 17 mei 1980 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan G. Obos No. 1 Palangka Raya,

Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

- i) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m² Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 600 m² Sertipikat nomor 1394 tanggal 04 juli 1989 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Baban No. 26 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Diperuntukan sebagai rumah dinas Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tetapi sekarang ditempati oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- j) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m² Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 600 m² Sertipikat nomor 1395 tanggal 04 juli 1989 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Baban No. 28 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Diperuntukan sebagai rumah dinas Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tetapi sekarang ditempati oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana gedung secara umum pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai berikut:

1. Pengadaan/pembangunan dan pengembangan

Dalam hal tersebut diatas tidak terdapat anggaran pengadaan pembangunan dan pengembangan pada DIPA Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun Anggaran 2019.

2. Pemeliharaan/perawatan

Pemeliharaan sarana dan prasarana tetap dilakukan setiap tahunnya untuk menjaga dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tahun 2018 meliputi perbaikan/service AC, PC Komputer, Printer, Jaringan Instalasi Listrik, Kendaraan Dinas/Operasional baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua), rumah dinas serta pemeliharaan taman dan gedung kantor.

No.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran Peralatan dan Mesin	Jumlah per 1 Januari 2019	Jumlah per 31 Desember 2019
1	Stationary Generating Set	1	1
2	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	0	0
3	Lemari Besi/metal	3	3
4	Lemari Kayu	59	53
5	Rak Besi	9	16
6	Rak Kayu	12	12
7	Filing Cabinet Besi	10	10
8	Brandkas	2	2

9	Buffet	4	4
10	Tabung Pemadam Api	8	8
11	CCTV	1	1
12	White Board	7	7
13	Alat Detektor Barang Terlarang/x Ray	0	0
14	Mesin Absensi	5	2
15	Penangkal Petir	1	1
16	Lcd Projector/infocus	1	1
17	Alat Perekam Suara (voice pen)	1	1
18	Perkakas Kantor Lainnya	4	4
19	Alat Kantor Lainnya	3	3
20	Meja Kerja Kayu	112	67
21	Kursi Besi/metal	257	214
22	Kursi Kayu	44	41
23	Sice	15	15
24	Bangku Panjang Kayu	12	12
25	Meja Rapat	12	9
26	Meja Komputer	10	10
27	Meja Telepon	4	4
28	Meja Resepsionis	8	8
29	Kasur/spring Bed	0	0
30	Meja Makan Kayu	1	1
31	Jam Elektronik	2	2
32	Mesin Penghisap Debu/vacum Cleaner	1	1
33	Mesin Pemotong Rumput	1	1
34	Lemari Es	1	1
35	A.c. Window	0	0
36	A.c. Split	53	35
37	Kipas Angin	7	7
38	Alat Pendingin Lainnya	2	2
39	Televisi	10	10
40	Loudspeaker	7	7
41	Sound System	2	2
42	Microphone	15	15
43	Microphone Table Stand	4	4
44	Unit Power Supply	6	6
45	Stabilisator	2	2
46	Lambang Garuda Pancasila	0	0
47	Gambar Presiden/wakil Presiden	0	0
48	Tiang Bendera	2	2
49	Tangga Aluminium	1	1
50	Kaca Hias	7	7
51	Dispenser	4	4
52	Mimbar/podium	1	1
53	Palu Sidang	1	1
54	Lambang Instansi	1	1
55	Handycam	1	1
56	Karpet	4	4
57	Gordyin/kray	3	3
58	Kabel Roll	0	0
59	Asbak Tinggi	5	5
60	Kabel	3	3
61	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	1
62	Audio Mixing Portable	2	2

63	Compact Disc Player (peralatan Studio Audio)	1	1
64	Intercom Unit	0	0
65	Modulation Monitor Speaker Kabaret	1	1
66	Microphone/wireless Mic	2	3
67	Microphone/boom Stand	2	2
68	Uninterruptible Power Supply (ups)	2	7
69	Power Amplifier	1	1
70	Digital Keyboard Technics	1	1
71	Camera Digital	1	1
72	Lcd Monitor	2	2
73	Telephone (pabx)	1	1
74	Pesawat Telephone	0	0
75	Handy Talky (ht)	4	4
76	Facsimile	2	2
77	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	0	0
78	Antene Mf/mw Portable	0	0
79	Genset	0	0
80	P.c Unit	32	22
81	Lap Top	27	30
82	Personal Komputer Lainnya	2	2
83	Monitor	2	3
84	Printer (peralatan Personal Komputer)	41	29
85	Scanner (peralatan Personal Komputer)	4	4
86	Keyboard (peralatan Personal Komputer)	2	2
87	Peralatan Personal Komputer Lainnya	4	4
88	Server	5	3
89	Router	4	4
90	Hub	2	2
91	Rak Server	1	1
92	Wireless Access Point	14	13
93	Peralatan Jaringan Lainnya	3	3
94	Alat Badminton	0	0

3. Penghapusan

Pada tahun 2019, Pengadilan Tinggi Palangka Raya ada melakukan penghapusan terhadap aset Barang Milik Negara (BMN).

- Berikut daftar Barang Milik Negara yang telah mendapat persetujuan penghapusan dan telah dilaksanakan penjualan melalui lelang dan telah mendapatkan SK penghapusan dari Eselon I, dengan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 153/SEK/SK/III/2019 tanggal 05 Maret 2019.

NO	Nama Barang	Jumlah/unit
1	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	3
2	Filing Cabinet Besi	2
3	White Board	4
4	Alat Detektor Barang Terlarang/X-Ray	2
5	LCD Projector/Infocus	2
6	Kursi Besi/Metal	5
7	Kursi Kayu	7

8	Kasur/Spring Bed	1
9	Jam Elektronik	6
10	Mesin Pemotong Rumput	1
11	A.C. Window	2
12	A.C. Split	3
13	Kipas Angin	5
14	Loudspeaker	2
15	Lambang Garuda Pancasila	3
16	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2
17	Kabel Roll	6
18	Intercom Unit	10
19	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1
20	Telephone (PABX)	14
21	Pesawat Telephone	2
22	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	2
23	Antene MF/MW Portable	1
24	P.C Unit	10
25	Lap Top	2
26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4
27	Alat Badminton	1
28	Software Komputer	1
29	Genset	1

Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam melaksanakan tugas agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan harapan maka perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang dilaksanakan dalam tahun 2019 ini dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana

1. Pengadaan Paket Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk tahun 2019 yaitu:

NO	NAMA	KUANTITAS
1	LAPTOP (Fujitsu Lifebook E449)	9 unit
2	Samsung Curved Monitor Full HD 27"	1 unit
3	Wireless Vocal Set SKM9000	1 set

2. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk tahun 2019 yaitu:

NO	NAMA	KUANTITAS
1	Rak Arsip Hukum (Besi)	7 unit
2	Kursi Kerja (KPT LEC 098 dan Panitera)	2 unit

Pengadilan Tinggi Palangka Raya juga telah menerima barang hasil Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung e-Court Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Unit	Merk/Tipe
1	P.C. Unit	4	HP AIO PROONE 600 G5 (I5, 4 GB, 1TB, WIN10, 21.5IN)
2	UPS P.C. Unit	4	APC Back-UPS BX1400U-MS
3	Server	1	Fujitsu TX1330M4 (Intel Xeon E-2134, 32 GB, 2x 1TB)
4	UPS Server	1	Apc Smart UPS On Line 2.7kWatts / 3.0kVa

Pada tahun 2019, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan nomor: 243.A.1/BUA.7/RT/BAST/BMN/7/2019 pada tanggal 1 Juli 2019, Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menerima 1 (satu) unit kendaraan operasional roda 4 (empat) dengan spesifikasi sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	No. Polisi	Merk/Tipe	No. Mesin & Rangka	Pengguna
1.	MPV	KH 1438 TK	Toyota Kijang Innova 2.0 G A/T	1TRA621536 & MHFJW8EM9K2370243	Operasional

Pengadilan Tinggi Palangka Raya juga telah mengajukan proses hibah atas 1 (satu) unit kendaraan operasional roda 4 (empat) milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan status pinjam pakai sementara.

Berikut rincian aset kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang dimiliki oleh kantor Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			*Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Sedan Toyota/Camry V 2.5 A/T	2018	√			Tercatat sebagai barang Pihak Ketiga dan digunakan oleh KPT
2	SUV Toyota/Fortuner G 2.4 A/T	2018	√			Tercatat sebagai barang Pihak Ketiga dan digunakan oleh WKPT

3	MPV Toyota Kijang Innova 2.0 G A/T	2019	√			Tercatat sebagai barang Pihak Ketiga
4	SUV Mitsubishi/Pajero Sport 2.4L	2017	√			Dalam proses Hibah dari Pemda Kalteng
5	Sedan Toyota Corolla 1800 (KH 5)	2005	√			Ketua
6	Sedan Toyota Vios 1.5 G MT (KH 26)	2009	√			Wakil Ketua
7	Minibus Kijang Innova E (KH 95)	2008	√			Panitera
8	Minibus Kijang Innova V (KH 97)	2011	√			KPB
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Sepeda Motor Solo Honda NF 125 D (KH 2616 AY)	2003	√			Sub bagian Kepegawaian dan IT
2	Sepeda Motor Solo Honda NF 125 TR (KH 5002 AY)	2009	√			Kabag Umum Dan Keuangan
3	Sepeda Motor Solo Honda NF 125 D (KH 2617 AY)	2003	√			Sub bagian TU dan RT
4	Sepeda Motor Solo Suzuki EN 125 A (KH 4889 AY)	2008	√			Sub bagian TU dan RT
5	Sepeda Motor Solo Honda NF 125 D (KH 3646 AY)	2005	√			Panmud Hukum
6	Sepeda Motor Solo Suzuki EN 125 A (KH 4890 AY)	2008	√			Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
7	Sepeda Motor Solo Honda NF 125 D (KH 3647 AY)	2005	√			Kasubbag TU dan RT
8	Sepeda Motor Solo Honda MCB (KH 3829 AU)	1995			√	Rusak Berat

- a) Mobil dengan nomor polisi KH 5; type Sedan; merk Toyota Altis; tahun pembuatan 2005; nomor mesin: 1ZZ4460122; nomor rangka: MR053ZEC257402486; nomor BPKB: D8456618G; tahun perolehan 2008, tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai mobil dinas Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- b) Mobil dengan nomor polisi KH 26; type Vios 1,5 G M/T; merk Toyota Vios G G/T; tahun pembuatan 2008; nomor mesin: 1NZX847105; nomor rangka: MR053HY9389018098; nomor BPKB: F7391880G; tahun perolehan 2009, tercatat

atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai mobil dinas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

- c) Mobil dengan nomor polisi KH 97; type Kijang V; merk Toyota; tahun pembuatan 2011; nomor mesin: 1TR7153119; nomor rangka: MHFXW4367B4058717; nomor BPKB: I-06795484M; tahun perolehan 2011, tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai mobil dinas Sekretaris Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- d) Mobil dengan nomor polisi KH 95; type Kijang Innova; merk Toyota; tahun pembuatan 2008; nomor mesin: 1TR6639606; nomor rangka: MHFXW41G580032720; nomor BPKB: F6668783M; tahun perolehan 2009, tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai mobil dinas Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- e) Mobil dengan nomor polisi KH 1764 AU; type Pajero Sport 2.4L DAKAR 4x2 8A/T; merk Mitsubishi; tahun pembuatan 2017; nomor mesin: 4N15UBP3620; nomor rangka: MK2KRWPNUHJ000502; nomor BPKB: -; status dalam proses hibah dan tercatat atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan pengguna Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- f) Mobil dengan nomor polisi B 1046 UAH; type Camry 2.5V AT; merk Toyota; tahun pembuatan 2018; nomor mesin: 2AR1948790; nomor rangka: MRO53AK50J4510669; nomor BPKB: N09460941; tercatat sebagai barang Pihak Ketiga pada aplikasi SIMAK BMN Pengadilan Tinggi Palangka Raya berdasarkan BAST Kendaraan Nomor: 69/BUA.7/BAST/BMN/7/2018 pada tanggal 19 Juli 2018 dengan pengguna Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- g) Mobil dengan nomor polisi B 1409 UJR; type Fortuner 2,4G 4x2 AT; merk Toyota; tahun pembuatan 2018; nomor mesin: 2GDC382682; nomor rangka: MHFJB8GSXJ1555896; nomor BPKB: N09467239; tercatat sebagai barang Pihak Ketiga pada aplikasi SIMAK BMN Pengadilan Tinggi Palangka Raya berdasarkan BAST Kendaraan Nomor: 69/BUA.7/BAST/BMN/7/2018 pada tanggal 19 Juli 2018 dengan pengguna Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- h) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2616 AM; merk Honda Kharisma 125; tahun pembuatan 2003; nomor mesin: JB21E1255450; nomor rangka: MH1JB21133K258193; nomor BPKB: C6280699M; tahun perolehan 2003 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional pada Sub Bagian Kepegawaian dan IT Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- i) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2617 AM; merk Honda Kharisma 125; tahun pembuatan 2003; nomor mesin: JB21E1258271; nomor rangka: MH1JB21113K260850; nomor BPKB: C6280700M; tahun perolehan 2003 tercatat

atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional pada Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

- j) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 3829 AY; merk Honda Win 100; tahun pembuatan 1996; nomor mesin: HAE2270994; nomor rangka: MH1HA000SSK171432; nomor BPKB: A3697858M; tahun perolehan 1996 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan kondisi rusak berat.
- k) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 3646 AY; merk Honda Kharisma; tahun pembuatan 2005; nomor mesin: JB22E1553144; nomor rangka: MH1JB22105K554516; nomor BPKB: D8617805M; tahun perolehan 2005 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- l) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 3647 AY; merk Honda Kharisma; tahun pembuatan 2005; nomor mesin: JB22E1563566; nomor rangka: MH1JB221X5K564146; nomor BPKB: D8617806M; tahun perolehan 2005 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- m) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 4889 AY; merk Suzuki Thunder; tahun pembuatan 2008; nomor mesin: F4051D555259; nomor rangka: MH8EN125A8J555657; nomor BPKB: F2394460M; tahun perolehan 2008 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional pada Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tanga Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- n) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 4890 AY; merk Suzuki Thunder; tahun pembuatan 2008; nomor mesin: F4051D555301; nomor rangka: MH8EN125A8J555740; nomor BPKB: F2394461M; tahun perolehan 2008 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- o) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 5002 AY; merk Honda Supra X; tahun pembuatan 2009; nomor mesin: JB91E1660806; nomor rangka: MH1JB91189K664018; nomor BPKB: F6090295M; tahun perolehan 2009 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Kabag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

2. PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

1. Pengadaan

Tidak ada Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung pada tahun anggaran 2019.

2. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Untuk tahun anggaran 2019 ini Pengadilan Negeri Palangka Raya mendapatkan anggaran Pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp. 270.781.000 , Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya dan Rumah Dinas Kantor sebesar Rp. 14.490.000,-

Tabel Rekapitulasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

No	Kegiatan	Output Yang dihasilkan	Anggaran yang Tersedia	Anggaran Yang digunakan	Ket
1	Pemeliharaan Gedung kantor & Halaman Kantor,	Terselenggaranya gedung perkantoran yang bersih, rapi, indah dan nyaman	Rp. 270.781.000,-	Rp 270.744.790,-	
2	Pemeliharaan Rumah Dinas		Rp. 14.490.000,-	Rp 14.476.086-	

3. Penghapusan

Proses penghapusan pada sarana / prasarana gedung tahun anggaran 2019 tidak ada.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a. Pengadaan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung pada tahun anggaran 2019 terdiri atas :

- ✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar Rp. 78.000,000,-

Tabel Rekapitulasi Pengadaan Fasilitas Gedung

No	Kegiatan	Output Yang Dihasilkan	Anggaran yang tersedia	Anggaran Yang digunakan	Ket
1	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan MA RI : - Pengadaan Peralatan dan Mesin	Terselenggaranya kebutuhan perkantoran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Rp. 78.000.000,-	Rp. 77.747.000,-	

b. Pemeliharaan

Untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung tahun anggaran 2019 terdiri dari pemeliharaan :

- ✓ Kendaraan Dinas
- ✓ AC Ruangan
- ✓ Peralatan Pengolah data berupa Komputer dan Laptop
- ✓ Printer
- ✓ Faximile
- ✓ Mesin Genset

Tabel Rekapitulasi Pemeliharaan Fasilitas Gedung

No	Kegiatan	Output Yang dihasilkan	Anggaran yang Tersedia	Anggaran Yang digunakan	Ket
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin : - Kendaraan Dinas - AC ruangan - Komputer - Laptop - Printer - Faximile - Mesin Genset	Terselenggaranya kebutuhan perkantoran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Rp. 125.359.000,-	Rp. 125.285.646,-	

c. Penghapusan

Proses penghapusan pada sarana / prasarana fasilitas gedung tahun anggaran 2019 tidak ada.

Tabel Matrik sarana/prasarana pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

No.	Sarana/Prasarana Kantor	Jumlah	Keterangan
I	Sarana/Prasarana Gedung		
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	3	
3.	Ruang Panitera	1	
4.	Ruang Sekretaris	1	
5.	Ruang Sidang Umum	5	
6.	Ruang Kepaniteraan	5	

7.	Ruang Panitera Pengganti	1	
8.	Ruang Tunggu Pers	1	
9.	Ruang Tunggu Penasihat Hukum	1	
10.	Ruang Mediasi	1	
11.	Ruang Pos Bakum	1	
12.	Ruang Kesekretariatan	3	
13.	Ruang Server/ IT	1	
14.	Ruang Perpustakaan	1	
15.	Ruang Kesehatan	1	
16.	Mushola	1	
17.	Ruang Sidang Tipikor/ PHI	2	
18.	Ruang pertemuan	1	
II	<i>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</i>		
17.	Server	4 Unit	Dalam Kondisi Baik
18.	Router	1 Unit	Dalam Kondisi Baik
19.	Switch Hub	1 Unit	Dalam Kondisi Baik
20.	Netware Interface External	6 Unit	Dalam Kondisi Baik
21.	Rak Server	1 Buah	Dalam Kondisi Baik
22.	P.C unit	31 Unit	Dalam Kondisi Baik
23.	Laptop	19 Unit	Dalam Kondisi Baik
24.	Peralatan Jaringan Lainnya	5 Buah	Dalam Kondisi Baik
25.	Camera Digital	1 Unit	Dalam Kondisi Baik
26.	Monitor	3 Buah	Dalam Kondisi Baik
27.	Printer	18 Unit	Dalam Kondisi Baik
28.	CCTV	16 Unit	Dalam Kondisi Baik
29.	Mesin Absensi	3 unit	Dalam Kondisi Baik
30.	Sound System	1 Buah	Dalam Kondisi Baik
31.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12 Buah	Dalam Kondisi Baik
32.	Pesawat Telephone	1 Buah	Dalam Kondisi Baik
33.	Facsimile	1 Buah	Dalam Kondisi Baik
34.	Internet	1 Buah	Dalam Kondisi Baik
35.	Hardisk	2 Buah	Dalam Kondisi Baik
36.	Speaker komputer	6 Buah	Dalam Kondisi Baik
37.	Tape Recorder	- Buah	-
38.	CPU	1 Buah	Dalam Kondisi Baik

39.	Genset	1	Dalam Kondisi Baik
40.	Mesin Ketik Manual	-	-
41.	Mesin Ketik Elektronik	-	-
42.	Lemari Besi/ Metal	10	Dalam Kondisi Baik
43.	Lemari Kayu	74	Dalam Kondisi Baik
44.	Rak Besi	43	Dalam Kondisi Baik
45.	Filing Cabinet Besi	20	Dalam Kondisi Baik
46.	Brankas	3	Dalam Kondisi Baik
47.	Alat Pemotong Kertas	3	Dalam Kondisi Baik
48.	Meja Kerja Kayu	143	Dalam Kondisi Baik
49.	Kursi Besi/ Metal	197	Dalam Kondisi Baik
50.	Kursi Kayu	105	Dalam Kondisi Baik
51.	Sice	16	Dalam Kondisi Baik
52.	Bangku Panjang Besi/ Metal	4	Dalam Kondisi Baik
53.	Bangku Panjang Kayu	16	Dalam Kondisi Baik
54.	Meja Rapat	6	Dalam Kondisi Baik
55.	Meja Komputer	4	Dalam Kondisi Baik
56.	AC Split	66	Dalam Kondisi Baik
57.	Buffet	3	Dalam Kondisi Baik
58.	LCD Projector/ Infocus	1	Dalam Kondisi Baik
59.	Kotak Surat	5	Dalam Kondisi Baik
60.	Papan Visual/ Papan Nama	29	Dalam Kondisi Baik
61.	Teralis	1	Dalam Kondisi Baik
62.	Perkakas Kantor Lainnya	4	Dalam Kondisi Baik
63.	Meja Resepsonis	2	Dalam Kondisi Baik
64.	Kursi Fiber Glas/ Plastik	72	Dalam Kondisi Baik
65.	Gantungan Jas	1	Dalam Kondisi Baik
66.	Jam Elektronik	7	Dalam Kondisi Baik
67.	Mesin Penghisap Debu/ Vacuum Cleaner	1	Dalam Kondisi Baik
68.	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	8	Dalam Kondisi Baik
69.	Exhaust Fan	3	Dalam Kondisi Baik
70.	Trenk Air/ Tandon Air	1	Dalam Kondisi Baik
71.	Televisi	1	Dalam Kondisi Baik
72.	Lambang Garuda Pancasila	5	Dalam Kondisi Baik

73	Gambar Presiden/ Wakil Presiden	1	Dalam Kondisi Baik
74	Tiang Bendera	8	Dalam Kondisi Baik
75	Dispenser	6	Dalam Kondisi Baik
76	Palu Sidang	4	Dalam Kondisi Baik
78	Lambang Instansi	2	Dalam Kondisi Baik
79	Asbak Tinggi	6	Dalam Kondisi Baik
80	Bingkai Foto	1	Dalam Kondisi Baik
81	Audio Mixing Portable	1	Dalam Kondisi Baik
82	Alat Studio Lainnya	1	Dalam Kondisi Baik
83	Telephone (PABX)	20	Dalam Kondisi Baik
84	Charger	1	Dalam Kondisi Baik
85	Kursi Roda	1	Dalam Kondisi Baik
86	TV Monitor	1	Dalam Kondisi Baik
87	Alat Pemadam Kebakaran	6	Dalam Kondisi Baik
88	Alat Press Kertas	1	Dalam Kondisi Baik
89	Tameng	5	Dalam Kondisi Baik
90	Komputer Lainnya	1	Dalam Kondisi Baik
91	Pernmainan Lainnya	1	Dalam Kondisi Baik
92	Piala	25	Dalam Kondisi Baik
93	Scanner (Peralatan Personal Komputer	1	Dalam Kondisi Baik

Matrik Kendaraan Dinas pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Roda 4					
1.	New Mazda Sedan	2010	√			
2.	Toyota Vios	2006	√			
3.	Toyota Kijang	2001	√			
4.	Toyota Innova E	2006	√			
5.	Toyota Innova G (Pinjam Pakai)	2013	√			

II	Roda2					
5.	Honda Mega Pro	2005	√			
6.	Yamaha Jupiter MX	2006	√			
7.	Yamaha Jupiter MX	2006	√			
8.	Yamaha Jupiter Z	2005	√			
9.	Yamaha Jupiter MX	2007	√			
10.	Honda GL Max	2003			√	
11.	Honda GL Max	2003			√	

Matrik Rumah Dinas pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2019 yaitu sebagai berikut

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1.	Rumah Dinas Ketua	1	√			
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√			
3.	Rumah Dinas Hakim	6		√	√	Rusak ringan = 5 Rusak berat = 1 (mengalami kebakaran)
4.	Rumah Dinas Panitera	1		√		
5.	Rumah Dinas Sekretaris	-				Belum ada

3. PENGADILAN NEGERI SAMPIT

Sarana dan prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik Negara yang terdiri dari tanah, gedung bangunan kantor permanen, dan rumah negara permanen. Pengadilan Negeri Sampit memiliki 1 (satu) gedung kantor yang berdiri di satu sertifikat tanah dan 8 (delapan) bangunan rumah dinas untuk digunakan sendiri sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri, Hakim dan Panitera, serta 1 (satu) tanah kosong yang tidak dipergunakan.

Gedung dan Tanah pada Pengadilan Negeri Sampit telah bersertifikat a.n. Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI. Berikut adalah data gedung dan tanah Pengadilan Negeri Sampit :

NO	URAIAN	LOKASI	SERTIFIKAT		LUAS (m ²)
			NOMOR	TANGGAL	
1	Tanah untuk bangunan gedung kantor	Jl. H.M. Arsyad No. 36	BF 261196	24 Agustus 2011	3.000 m ²

2	Tanah untuk bangunan rumah dinas	Jl. M.T. Haryono No. 101	AA 080033	11 Mei 1990	69m2
3	Tanah untuk bangunan rumah dinas	Jl. Manggis	BF 263354	11 November 2012	1.092 m2
4	Tanah untuk bangunan rumah dinas	H.M. Arsyad No. 37	BF 261197	24 Agustus 2011	307 m2
5	Tanah untuk bangunan rumah dinas	Jl. M.T. Haryono No. 74	AA 080012	11 Mei 1990	804 m2
6	Tanah untuk bangunan rumah dinas	Jl. S. Parman No. 18	AB 247453	30 April 1991	307 m2
7	Tanah untuk bangunan rumah dinas	Jl. Cut Nyak Dien No. 1	BF 261195	24 Agustus 2011	1.464 m2
8	Tanah	Jl. Sutoyo	BF 261194	24 Agustus 2011	1.000 m2

Berikut adalah data bangunan dan pemanfaatan Pengadilan Negeri Sampit :

N O	NAMA BARANG	LUAS	ALAMAT	KONDIS I	PEMANFAATAN
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.000m ²	Jl. H.M. Arsyad No.36	Baik	Digunakan sendiri (kantor)
2.	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	120 m ²	1983	Rusak Ringan	Digunakan oleh KPN
3.	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70 m2	1981	Rusak Ringan	Digunakan oleh Hakim
4.	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70 m2	1983	Rusak Ringan	Digunakan oleh Hakim
5.	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70 m2	1978	Rusak Ringan	Digunakan oleh Hakim
6.	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70 m2	1981	Rusak Ringan	Digunakan oleh Hakim
7.	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70 m2	2004	Rusak Ringan	Digunakan oleh Hakim
8.	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70 m2	2004	Rusak Ringan	Digunakan oleh Hakim

9.	Rumah Negara Golongan II Permanen	70 m2	2004	Rusak Ringan	Digunakan oleh Hakim
----	---	-------	------	-----------------	-------------------------

Pengelolaan sarana peralatan dan mesin pada Pengadilan Negeri Sampit berupa perawatan rutin kendaraan-kendaraan bermotor dan servis pada kendaraan yang mengalami kerusakan. Berikut adalah data kendaraan bermotor dan pemanfaatan Pengadilan Negeri Sampit :

N O	NAMA BARAN G	STATUS	TAHUN PEROLEHA N	KONDIS I	PEMANFAATA N
RODA EMPAT					
1	Toyota Fortuner	Pinjam Pakai dari Pemda Kab. Kotawaringi n Timur		Baik	Mobil Dinas Ketua Digunakan sendiri (Rumah dinas Ketua)
2	Toyota Fortuner	Pinjam Pakai dari Pemda Kab. Seruyan		Baik	Mobil Dinas Ketua Digunakan sendiri (Rumah dinas Ketua)
3	Toyota Innova	Milik Sendiri	2006	Rusak Ringan	Mobil Dinas Wakil Ketua
4	Toyota Avanza	Milik Sendiri	2004	Rusak Ringan	Mobil Dinas Panitera
RODA DUA					
1	Honda Supra	Milik Sendiri	1997	Rusak Berat	-
2	Honda Supra X	Milik Sendiri	2004	Rusak Ringan	Digunakan Kasubbag Umum & Keuangan
3	Honda Kharisma	Milik Sendiri	2005	Baik	Digunakan Kasubbag Kepeg & Ortala
4	Honda Mega Pro	Milik Sendiri	2006	Rusak Ringan	Digunakan Panmud Perdata
5	Honda Supra X 125	Milik Sendiri	2007	Baik	Digunakan Sekretaris

Hal yang sama juga dilakukan untuk inventaris dan perabotan yang lain.

NO	NAMA PERALATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Komputer server	2 unit	Maintenance rutin (cleaning, dll)
2	P.C. Unit	23 unit	Baik : 19 unit, Rusak berat : 4 unit
3	Laptop/Notebook	11 unit	Reset, penggantian battery, dll
4	Printer	23 unit	Servis; Cartridge; tinta; Reset; Toner; dll
5	Mesin Faxsimile	1 unit	Baik
6	Air Conditioner (AC Split)	32 unit	Servis rutin, isi Freon, dll
7	Air Conditioner (AC Standing)	3 unit	Servis rutin, isi Freon

Selama tahun 2019 terdapat penambahan sarana dan prasarana fasilitas peralatan dan mesin, yaitu berupa :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Air Conditioner (AC Split)	5 unit	Hibah
2	Air Conditioner (AC Standing)	1 unit	Hibah
3	Sound System	1 set	Hibah
4	P.C. Unit	4 unit	Pengadaan MA-RI
5	Server + Rak	1 set	Pengadaan MA-RI
6	UPS	4 unit	Pengadaan MA-RI
7	Kiosk Android (Survey Pelayanan)	1 unit	Pengadaan MA-RI
8	Laptop	6 unit	Pengadaan Sendiri
9	Kamera CCTV	4 unit	Hibah

4. PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

1. Gedung

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB yang dipakai sekarang adalah gedung bertingkat II pada bagian muka dan terletak di Jalan Sutan Syahrir No. 16, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar

Tampak Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB tersebut luas bangunannya 80 m2 konstruksi bangunan permamen dengan luas tanah 170 m2.

Keadaan kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut tertata rapi dan bersih dengan dihiasi dengan taman bunga dan kolam. Di halaman samping kantor dibangun sebuah Musholla “AL FATH” pada tahun 2014, dan di bagian belakang kantor dibangun lapangan Volly yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Di belakang dan disamping kanan kantor dibangun tempat parkir kendaraan roda dua beserta kendaraan roda empat. Untuk di belakang kantor tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat khusus untuk Hakim dan Pegawai, sedangkan pada bagian samping kanan untuk Kendaraan Tahanan, Polisi, dan Pengunjung. Di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sudah terdapat Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sudah dibangun Ruang Mediasi, Perpustakaan, Ruang Tunggu Pengunjung, Ruang Menyusui atau laktasi, Tempat Merokok atau Smoking Area serta toilet yang bersih untuk pengunjung maupun pegawai dan toilet khusus difabel. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun juga telah menyediakan ruang tamu terbuka sebagai bukti keterbukaan dalam menerima tamu.

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB telah menerapkan sistem satu pintu, jadi semua Pengunjung, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum atau lainnya masuk ke gedung hanya lewat pintu depan saja sehingga mudah terpantau. Terlebih lagi setiap tamu yang masuk diwajibkan melapor ke Meja PTSP dan akan dikenakan tanda tamu berupa kartu pengunjung.

Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB berupaya melakukan beberapa terobosan dan renovasi guna melengkapi sarana dan prasarana, antara lain :

- Memperluas Ruang Tunggu Pengunjung



- Pembuatan tempat Spanduk/Baliho (ukuran 3x5m)



- Pembuatan Pembatas Ruang IT



➤ Perbaikan Rumah Dinas Wakil Ketua



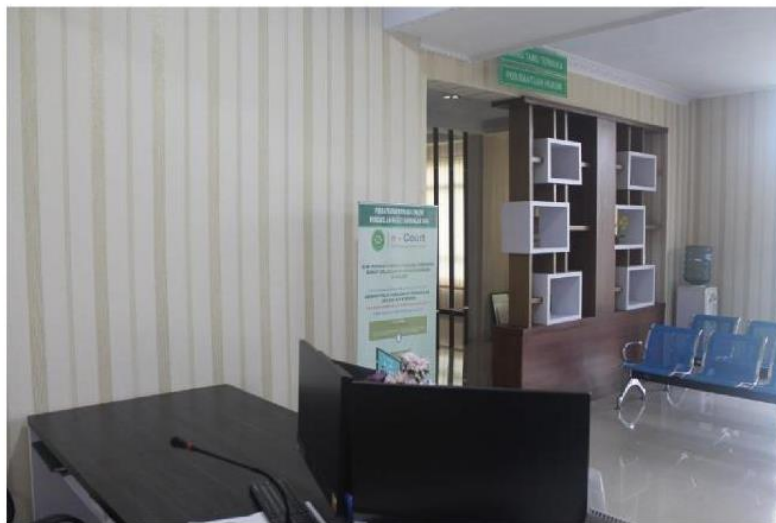
➤ Perbaikan Toilet dan Pagar Rumah Dinas (Gang Lombok 1)



- Perbaikan Lobi Kantor (PTSP, Ruang Posbakum, Ruang Jaksa, Ruang PH, Ruang Tamu Terbuka)
Sebelum



Sesudah





- Pembuatan Tempat Sampah



- Perbaikan Tempat Wudhu Mushola



➤ Pemindahan Ruang Sidang Anak



Sebelum



Sesudah

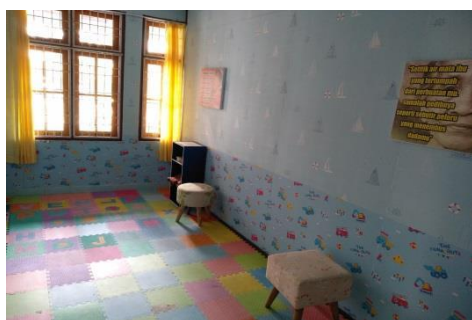
➤ Pemindahan Ruang Teleconference dan Ruang Tunggu Ramah Anak



Sebelum



Sesudah



Sebelum



Sesudah

➤ Pergantian Keramik Ruang Panitera Pengganti



2. Gedung Tempat Sidang Keliling (Zetting Plaats).

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB mempunyai 2 tempat Sidang (Zetting Plaats) yaitu di Jalan Tjilik Riwut, Kelurahan Mendawai, Kabupaten Sukamara dengan luas 8288 m2 dengan Sertifikat Nomor : 300/1987 dan di Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak memperoleh anggaran sidang keliling (*zetting plaats*) sehingga tidak ada kegiatan sidang keliling ke Kabupaten Sukamara yang memang jaraknya jauh dari kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

3. Rumah Dinas

Bahwa untuk kenyamanan Pejabat baik Teknis maupun Struktural yang melaksanakan tugasnya di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB dalam hal ini Pemerintah telah menyediakan Rumah Dinas untuk tempat tinggal sebanyak 10 unit dengan dibebani kewajiban untuk setiap bulannya membayar sewa kepada Negara, adapun kondisi Rumah Dinas tersebut per tanggal 31 Desember 2019 :

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Rumah Dinas	1	1	0	0	Belum ditempati
2.	Rumah Dinas	1	1	0	0	
3.	Rumah Dinas Hakim	6	6	0	0	1 rumah belum ditempati
4.	Rumah Dinas Panitera	1	1	0	0	
5.	Rumah Dinas Sekretaris	1	1	0	0	
Jumlah		10	10	0	0	

Rumah Dinas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB tersebut per 31 Desember 2018 sudah ditempati Pejabat baik Teknis maupun Struktural dengan rincian yaitu :

- Rumah Dinas yang terletak di Jalan Abdullah Mahmud yang diperuntukannya untuk Rumah Dinas Ketua dan sekarang belum ditempati.
- Rumah Dinas yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman SH yang diperuntukannya untuk Rumah Dinas Wakil Ketua sekarang ditempati oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Bpk. ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH. Dengan nomor SK : W16-U3/131/SEK/SK/VIII/2019.

- Rumah Dinas yang terletak di Jalan Sutan Syahrir No.16 atau berada di komplek belakang kantor yang peruntukannya untuk Rumah Dinas Hakim sekarang ditempati oleh Bpk. IMAN SANTOSO, SH., MH. dengan nomor SK : W16-U3/107/SEK/SK/III/2019.
- Rumah Dinas yang terletak di Jalan Sutan Syahrir No.16 atau berada di komplek belakang kantor yang peruntukannya untuk Rumah Dinas Hakim sekarang ditempati oleh Bpk. HERU KARYONO, SH. dengan nomor SK : W16-U3/130/SEK/SK/VIII/2019.
- Rumah Dinas yang terletak di Jalan Sutan Syahrir No.16 Gang Lombok I yang peruntukannya untuk Rumah Dinas Hakim sekarang belum ditempati dan dalam keadaan rusak ringan.
- Rumah Dinas yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman yang peruntukannya untuk Rumah Dinas Panitera sekarang ditempati oleh Bpk. YOHANIS, SH. dengan nomor SK : W16-U3/105/SEK/SK/III/2019.
- Rumah Dinas yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman yang peruntukannya untuk Rumah Dinas Sekretaris sekarang ditempati oleh Bpk. HUSNI THAMRIN, ST. dengan nomor SK : W16-U3/104/SEK/SK/III/2019.
- Rumah Dinas yang terletak di Jalan Ahmad Wongso yang peruntukannya untuk Rumah Dinas Hakim sekarang ditempati oleh Bpk. MUHAMMAD IKHSAN, SH. dengan nomor SK : W16-U3/106/SEK/SK/III/2019.
- Rumah Dinas yang terletak di Jalan Ahmad Wongso yang peruntukannya untuk Rumah Dinas Hakim sekarang ditempati oleh Bpk. MANTIKO SUMANDA MOECHTAR, SH., M.Kn. dengan nomor SK : W16-U3/109/SEK/SK/III/2019.
- Rumah Dinas yang terletak di Jalan Ahmad Wongso yang peruntukannya untuk Rumah Dinas Hakim sekarang ditempati oleh Bpk. IQBAL ALBANNA, SH., MH. dengan nomor SK : W16-U3/108/SEK/SK/III/2019.

4. Kendaraan Dinas

Bahwa untuk kenyamanan Pejabat baik Teknis maupun Struktural yang melaksanakan tugasnya di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB dalam hal ini Pemerintah telah menyediakan Kendaraan Dinas untuk transportasi dan membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas, adapun Kendaraan Dinas tersebut per tanggal 31 Desember 2018 :

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I.	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Toyota Kijang Innova G N/T Lux Model	2015	√	-	-	Mobil Dinas Ketua
2.	Toyota Kijang Super Long Model Minibus	2003	√	-	-	Mobil Dinas Panitera
3.	Toyota Kijang Innova Model Minibus	2007	√	-	-	Mobil Dinas Wakil Ketua
4.	Toyota Kijang Super Short	1991	√	-	-	Mobil Dinas Operasional
II.	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Honda Kharisma	2005	√	-	-	Motor Dinas Sekretaris
2.	Honda Kharisma	2005	√	-	-	Motor Dinas Panitera Muda Pidana
3.	Honda Mega Pro	2006	√	-	-	Motor Dinas Panitera Muda Hukum
4.	Honda Supra X	2003	√	-	-	Motor Dinas Panitera Muda Perdata
5.	Honda Win	1994	√	-	-	Motor Dinas Kasub Umum dan Keuangan

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
6.	Honda Supra X	2003	-	-	-	Hilang

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun setiap kendaraan dinas memiliki penanggungjawab masing-masing kendaraan dinas, adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Uraian	Penanggung Jawab	Nomor SK	Keterangan
I.	Jenis Kendaraan Roda 4			
1	Toyota Kijang Innova G N/T Lux Model Minibus	Abu Achmad Sidqi Amsya, SH.	W16-U3/133.a/KPA/S K/III/2019	Pinjam Pakai Pemda Kotawaringin Barat
2	Toyota Kijang Innova Model Minibus		W16-U3/027/KPA/SK/I/2019	Jabatan Wakil Ketua Sekarang Kosong
3	Toyota Kijang Super Long Model Minibus	Yohanis, SH.	W16-U3/ 026 /KPA/SK/I/2018	
4	Toyota Kijang Super Short	Deni Nurmansyah, SE.	W16-U3/ 027/KPA/SK/II/2 019	
II.	Jenis Kendaraan Roda 2			
1	Honda Kharisma	Husni Thamrin, ST.	W16-U3/025/KPA/SK/I/2019	
2	Honda Kharisma	Ucok Richon Manik, SH.	W16-U3/085/KPA/SK/I/2019	
3	Honda Mega Pro	Hariyanto	W16-U3/030/KPA/SK/I/2019	
4	Honda Supra X	Jurmani, SH.	W16-U3/028/KPA/SK/I/2019	
5	Honda Win	Deni Nurmansyah, SE.	W16-U3/029/KPA/SK/I/2019	

No	Uraian	Penanggung Jawab	Nomor SK	Keterangan
6	Honda Supra X	-	-	Hilang Sudah TGR

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB untuk mendukung jalannya peradilan baik secara teknis maupun secara administratif sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sarana dan Prasana disesuaikan dengan standar Akreditasi Penjamin Mutu sehingga bisa meningkatkan kinerja Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan Tupoksinya dan masyarakat yang diberikan pelayanan mendapat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan di Pengadilan. Berikut ini Sarana dan Prasarana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB :

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
I.	Sarana/Prasarana Gedung		
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	1	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang Umum	3	
7.	Ruang Sidang Anak	1	
8.	Ruang Kepaniteraan	3	
9.	Ruang Kesekretariatan	1	
10.	Ruang Panitera Pengganti	1	
11.	PTSP	1	
12.	Pojok e-Court	1	
13.	Ruang Mediasi/Diversi	1	
14.	Ruang Jaksa	1	
15.	Ruang Posbakum	1	
16.	Ruang Penasihat Hukum	1	
17.	Ruang Tunggu Sidang Anak	1	
18.	Perpustakaan	1	
19.	Ruang Serba Guna	1	
20.	Ruang IT	1	
21.	Ruang Arsip	1	
22.	Ruang Persediaan	1	
23.	Ruang Barang Bukti	1	
24.	Gudang	1	
25.	Ruang Ibu Menyusui/Laktasi	1	
26.	Ruang Tahanan Pria	1	
27.	Ruang Tahanan Wanita	1	
28.	Mushola	1	
29.	Ruang Tamu Terbuka	1	

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
30.	Tempat Merokok / Smoking	1	
31.	Toilet	11	
32.	Toilet Difabel	1	
33.	Ruang Tunggu Pengunjung	1	
34.	Pos Satpam / Keamanan	0	Masih belum tersedia
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1.	Minibus	3	
2.	Sepeda Motor	6	
3.	Mesin Ketik Manual Portable (11- 13 Inchi)	2	
4.	Lemari Besi/Metal	7	
5.	Lemari Kayu	10	
6.	Rak Besi	30	
7.	Filling Cabinet Besi	6	
8.	Brandkas	2	
9.	Tabung Pemadam Api	4	
10.	CCTV	2	
11.	Mesin Absensi	2	
12.	Papan Pengumuman	2	
13.	Meja Kerja Kayu	32	
14.	Kursi Besi/Metal	64	
15.	Kursi Kayu	32	
16.	Sice	2	
17.	Bangku Panjang Kayu	30	
18.	Meja Rapat	1	
19.	Meja Komputer	7	
20.	Tempat Tidur Besi	1	
21.	Meja Resepsionis	2	
22.	Mesin Pemotong Rumput	1	
23.	AC Split	21	
24.	Kipas Angin	1	
25.	Televisi	6	
26.	Amplifier	3	
27.	Wireless	1	
28.	Dispenser	2	
29.	Lambang Instansi	1	
30.	Handy Cam	1	
31.	Karpet	6	
32.	Gordy/Kray	44	
33.	Alat Rumah Tangga Lainnya	3	
34.	UPS	7	Bertambah 4 Pada
35.	Digital Led Running Text	1	
36.	Camera Digital	1	
37.	Facisimile	1	
38.	Genset	2	
39.	Komputer Jaringan Lainnya	3	Bertambah 1 pada

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
40.	PC Unit	23	Bertambah 4 pada
41.	Laptop	11	Bertambah 3 Pada Tahun 2019
42.	Printer	23	
43.	Scanner	2	
44.	Server	3	Bertambah 1 pada
45.	Router	1	
46.	Rak Server	3	Bertambah 1 pada
47.	Swicth	1	

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam melaksanakan tugas agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan harapan maka perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2019 ini dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana

a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Pengadaan Laptop Hakim)

NO	Nama	Kuantitas
1	LAPTOP Fujitsu PC Lifebook E449	1 Unit

b. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Pengadaan Laptop Hakim BA-BUN)

NO	Nama	Kuantitas
1	LAPTOP Fujitsu PC Lifebook E449	2 Unit

c. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung e-Court (BA-BUN)

NO	Nama	Kuantitas
1	PC HP ProOne 600 G5 21.5-in All-in-One	4 Unit
2	Server Fujitsu TX1330M4	1 Unit
3	Rak Server Indorack 19 inch Standing Close Rack Glass Door	1 Unit
4	UPS PC APC Back-UPS BX1400U-MS	4 Unit
5	Kiosk Touchscreen Vestouch Interactive Android Kiosk 21.5 inch	1 Unit

5. PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS

Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II terkhusus pada pengelolaan sarana dan prasarana merincikan tentang pelaksanaan pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung yang meliputi pengadaan, pemeliharaan dan usulan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dalam kurun waktu tahun anggaran 2019.

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II saat ini mempunyai gedung perkantoran dengan sarana dan prasarana ruangan sebagai berikut:

1. Gedung Kantor

Gedung kantor Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II terbagi menjadi 2 gedung yaitu gedung depan, samping kanan, samping kiri dan belakang. . Gedung depan terdiri dari 2 lantai dengan luas bangunan 1.344 m², gedung samping kanan memiliki luas bangunan 100 m², gedung samping kiri memiliki luas bangunan 200 m² dan gedung belakang memiliki luas bangunan 190 m². Bangunan tersebut berdiri di atas tanah dengan luas 4.997 m² Sertifikat No. 19 tanggal 31 Januari 1984 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Tambun bungai No. 55 Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

No	Sarana/Prasana Gedung Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Rapat	1	
7	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
8	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
9	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
10	Ruang Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
11	Ruang Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	1	
12	Ruang Sub Bagian PTIP	1	
13	Ruang Server	1	
14	Ruang Sidang Utama	1	
15	Ruang Sidang II	1	
16	Ruang Sidang Anak	1	
17	Ruang Arsip	1	
18	Ruang Kesehatan	1	
19	Ruang Mediasi	1	
20	Ruang Posbakum	1	
21	Ruang Jaksa	1	
22	Ruang Menyusui	1	

2. Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1		v		
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1		v		
3	Rumah Dinas Panitera	1		v		
4	Rumah Dinas Hakim	1		v		
5	Rumah Dinas Hakim	1		v		
6	Rumah Dinas Panitera Pengganti	1		v		

7	Rumah Dinas Panitera Pengganti	1	v		
8	Rumah Dinas Panitera Pengganti	1	v		

- a) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m² Golongan II tipe C Semi Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 795 m² Sertifikat No. 87 tanggal 02 Agustus 1993 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Melati No 05 Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II.
- b) Dua unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m² Golongan II tipe C Semi Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 2.473 m² Sertifikat No. 1 tanggal 02 Agustus 1979 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Melati No 07 dan No. 9 Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II dan Hakim.
- c) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m² Golongan II tipe C Semi Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.482 m² Sertifikat No. 146 tanggal 22 Mei 2014 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Ahmad Yani No. 100 Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II.
- d) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m² Golongan II tipe C Semi Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 668 m² Sertifikat No. 20 tanggal 31 Januari 1984 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Kenanga No. 18 Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II.
- e) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m² Golongan II tipe C Semi Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 536 m² yang terletak di jalan Kenanga No. 39 Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II.
- f) Dua unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m² Golongan II tipe C Semi Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 987 m² Sertifikat No. 18 tanggal 31 Januari 1984 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Patih Rumbih No. 69 dan No. 71 Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Panitera Pengganti dan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II.

3. Kendaraan Dinas

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II memiliki 1 buah kendaraan beroda empat dan 5 kendaraan beroda dua.

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Mobil Toyota Innova	1		v		
2	Sepeda Motor Honda	1		v		
3	Sepeda Motor Honda	1		v		
4	Sepeda Motor Honda	1		v		
5	Sepeda Motor Honda	1			v	
6	Sepeda Motor Honda	1			v	

- Mobil dengan nomor polisi KH 4 BU; type Kijang Innova; merk Toyota; tahun pembuatan 2005; nomor mesin: ITR 6197493; nomor rangka: MHFXW416650013749; nomor BPKB: D7965327; tahun perolehan 2010, tercatat atas nama Mahkamah Agung RI dan digunakan sebagai mobil operasional kantor.
- Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2465 BY; merk Honda; tahun pembuatan 2007; nomor mesin: HB4IE1824241; nomor rangka: MH1HB41197K828519; nomor BPKB: D6401673; tahun perolehan 2007 tercatat atas nama Kantor Pengadilan Negeri dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.
- Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2219 BY; merk Honda; tahun pembuatan 2005; nomor mesin: JB22E1563387; nomor rangka: MHIJB22125K567058; nomor BPKB: D8035636; tahun perolehan 2005 tercatat atas nama Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.
- Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2218 BY; merk Honda; tahun pembuatan 2005; nomor mesin: KEHLE1163418; nomor rangka: MHIKEHLI95K164382; nomor BPKB: D8035635; tahun perolehan 2005 tercatat atas nama Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.
- Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 631 BC; merk Honda; tahun pembuatan 1997; nomor mesin: HAB4E1001517; nomor rangka: MHIHABA16VK001856; nomor BPKB: A7240928; tahun perolehan 1997 tercatat atas nama Pengadilan Negeri Kapuas.
- Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 632 BC; merk Honda; tahun pembuatan 1997; nomor mesin: MFGE1669329; nomor rangka: MHINFG00WK660716; nomor BPKB: A7240926; tahun perolehan 1997 tercatat atas nama Pengadilan Negeri Kapuas.

4. Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran

No	Sarana/Prasana Fasilitas Perkantoran Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II	Jumlah	Keterangan
1	Komputer	18	
2	Laptop	9	
3	Printer	9	
4	Scanner	2	
5	AC	22	
6	Faximile	1	
7	Genset	1	
8	e-Skum	1	
9	Monitor	1	
10	Server	3	
11	Hub	1	
12	Router	1	
13	Rak Server	2	
14	UPS	6	
15	Televisi	1	
16	Kipas Angin	2	
17	Meja rapat	2	
18	Kursi Bangku Panjang	26	
19	Bangku Panjang Besi/metal	5	
20	Sice	2	
21	Kursi Kayu	29	
22	Kursi Besi	65	
23	Meja Kerja Kayu	49	
24	Papan Visual/Papan Nama	12	
25	Tabung Pemadam Kebakaran	5	
26	Rak Besi	28	
27	Rak Kayu	1	
28	Filling Cabinet Besi	18	
29	Brankas	3	
30	Lemari Kayu	13	
31	Lemari Besi	10	
32	Mesin Pemotong Rumput	1	
33	Tiang Bendera	6	
34	Palu Sidang	2	
35	Lambang Instansi	1	
36	Lambang Garuda Pancasila	3	
37	Sound System	2	
38	LAN	1	
39	Monografi	9	
40	Proyektor	1	
41	Perangkat Komputer Lainnya	2	
42	Komputer Jaringan Lainnya	1	
43	Pesawat Telepon	10	

Berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana gedung secara umum pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sebagai berikut:

- a) Pengadaan/pembangunan dan pengembangan

Dalam hal tersebut di atas terdapat anggaran pengembangan nilai bangunan Gedung Kantor pada DIPA Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Tahun Anggaran 2019.

b) Pemeliharaan/perawatan

Pemeliharaan sarana dan prasarana tetap dilakukan setiap tahunnya untuk menjaga dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada tahun 2019 meliputi perbaikan/service AC, Laptop, PC, Printer, Genset, Kendaraan Dinas/Operasional baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) serta pemeliharaan gedung kantor dan halaman.

c) Penghapusan

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II tidak ada melakukan penghapusan Barang Milik Negara (BMN).

d) Pengadaan

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah	Harga (Rp.)
1	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan • Renovasi perluasan ruang tahanan	77 M ²	555.478.000
2	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi • Pengadaan Laptop Hakim (BA. BUN) • Laptop Untuk Hakim	2 UNIT 1 UNIT	26.000.000 13.000.000

6. PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II terkhusus pada pengelolaan sarana dan prasarana merincikan tentang pelaksanaan pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung yang meliputi pengadaan, pemeliharaan dan usulan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dalam kurun waktu tahun anggaran 2019.

Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II saat ini mempunyai gedung perkantoran dengan sarana dan prasarana ruangan sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II terkhusus pada pengelolaan sarana dan prasarana merincikan tentang pelaksanaan pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung yang meliputi pengadaan, pemeliharaan dan usulan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dalam kurun waktu tahun anggaran 2019.

Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II saat ini mempunyai gedung perkantoran dengan sarana dan prasarana ruangan sebagai berikut:

I. GEDUNG KANTOR

- a) Gedung kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II terbagi menjadi 3 gedung yaitu Bagunan Gedung Ke-1 /Gedung Baru pada Tahun 2016 dengan 2 lantai dengan luas bagunan 500 m², bagunan tersebut berdiri diatas tanah dengan luas 10.000 m² SK Gubernur dan sudah di tingkatkan menjadi Sertifikat atas nama Pengadilan Negeri Muara Teweh Cq.Mahkamah Agung RI. Bagunan Gedung Ke-2 Gedung Lama pada Tahun 1998 dengan lantai 1, Luas Bagunan 200 m² yang beralamat di Jln. Yetro Sinseng no.08 Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah, sedangkan bangunan Ke-3 berada di Kabupaten Murung Raya pada Tahun 1983 dengan lantai 1, Luas bagunan 250 m².
- b) Halaman Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II
- Foto Halaman Gedung Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II Sebelumnya



- Foto Halaman Gedung Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II Sesudahnya





NO	SARANA/PRASARANA GEDUNG	JUMLAH	KET
1	RUANG KETUA	1	
2	RUANG WAKIL KETUA	1	
3	RUANG PANITERA	1	
4	RUANG SERVER	1	
5	RUANG RAPAT PIMPINAN	1	
6	RUANG KEBAKTIAN	1	
7	RUANG ARSIP PIDANA	1	
8	RUANG ARSIP PERDATA	1	
9	RUANG HAKIM	1	
10	RUANG SEKRETARIS	1	
11	RUANG SIDANG CAKRA	1	
12	RUANG SIDANG TIRTA II	1	
13	RUANG SIDANG RAMAH ANAK	1	
14	RUANG KEPANITERAAN PERDATA	1	
15	RUANG KEPANITERAAN PIDANA	1	
16	RUANG KEPANITERAAN HUKUM	1	
17	RUANG MEDIASI DAN DIVERSI	1	
18	RUANG UMUM DAN KEUANGAN	1	
19	RUANG PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN	1	
20	RUANG KEPEGAWAIAN DAN ORTALAK	1	
21	RUANG BARANG BUKTI	1	
22	RUANG PANTRI	1	
23	RUANG JURUSITA	1	
24	RUANG PEPUSTAKAAN	1	
25	RUANG LAKTASI	1	
26	RUANG RAMAH ANAK	1	
27	RUANG KESEHATAN	1	
28	RUANG TELECONFERENCE	1	
29	RUANG JAKSA	1	
30	RUANG POSBAKUM	1	
31	RUANG RAPAT SERBA GUNA	1	
32	GUDANG	2	
33	RUANG TAHANAN WANITA	1	
34	RUANG TAHANAN PRIA	1	
35	TOILET	16	

II. RUMAH DINAS

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Rumah Dinas Ketua	1		√		
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1		√		
3.	Rumah Dinas Hakim	3		√		

- a) Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m² Jumlah lantainya 1 (satu Lantai) Type C/II telah dibangun pada tahun 1984, No. IMB 97/XII/3/1984 Tanggal IMB 15/03/1984. Letak Bangunan terletak di Jalan Yetro Sinseng nomor 08 Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah (Komplek Rumah Dinas). Digunakan sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.
- b) Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m² Jumlah lantainya 1 (satu Lantai) Type C/II telah dibangun pada tahun 1984, No. IMB 97/XII/3/1984 Tanggal IMB 15/03/1984. Letak Bangunan terletak di Jalan Yetro sinseng no.08 Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah (Komplek Rumah Dinas). Digunakan sebagai rumah Dinas Wakil Ketua (Kosong) Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.
- c) Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m² Jumlah lantainya 1 (satu Lantai) Type C/II telah dibangun pada tahun 1984, No. IMB 97/XII/3/1984 Tanggal IMB 15/03/1984. Letak Bangunan terletak di Jalan Yetro Sinseng nomor 08 Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah (Komplek Rumah Dinas). Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.
- Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m² Jumlah lantainya 1 (satu Lantai) Type C/II telah dibangun pada tahun 1984, No. IMB 97/XII/3/1984 Tanggal IMB 15/03/1984. Letak Bangunan terletak di Jalan Yetro Sinseng nomor .08 Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah (Komplek Rumah Dinas). Digunakan sebagai rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.
- d) Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m² Jumlah lantainya 1 (satu Lantai) Type C/II telah dibangun pada tahun 1984, No. IMB 97/XII/3/1984 Tanggal IMB 15/03/1984. Letak Bangunan terletak di Jalan Yetro Sinseng nomor 08 Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah (Komplek Rumah Dinas). Digunakan sebagai rumah dinas Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.
- e) Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m² Jumlah lantainya 1 (satu Lantai) Type C/II telah dibangun pada tahun 1984, No. IMB 97/XII/3/1984

Tanggal IMB 15/03/1984. Letak Bangunan terletak di Jalan Yetro Sinseng nomor 08 Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah (Komplek Rumah Dinas). Digunakan sebagai rumah Dinas Hakim (Kosong) Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.

3. MESS WISMA /BUNGALOW

Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
MESS 1	1		√		
MESS 2	1		√		
MESS 3	1			√	
MESS 4	1			√	
MESS 5	1		√		

- 1 (satu) unit mess wisma/bungalow dengan luas bangunan 35 m² Jumlah lantainya 1 (satu Lantai) telah dibangun pada tahun 1981, Letak Bangunan terletak di Jalan Yetro Sinseng nomor 08 Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah (Komplek Rumah Dinas) digunakan sebagai mess wisma staff Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.
- 2 (dua) unit mess wisma/bungalow dengan luas bangunan 25 m² Jumlah lantainya 1 (satu Lantai) telah dibangun pada tahun 1981, Letak Bangunan terletak di Jalan Yetro Sinseng nomor 08 Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah (Komplek Rumah Dinas) digunakan sebagai mess wisma staff Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.
- 2 (dua) unit mess wisma/bungalow dengan luas bangunan 25 m² Jumlah lantainya 1 (satu Lantai) telah dibangun pada tahun 1981, Letak Bangunan terletak di Jalan Yetro Sinseng nomor 08 Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah (Komplek Rumah Dinas) tidak dapat digunakan karena dalam keadaan rusak berat (tidak ada penghuni).

Berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana gedung secara umum pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II sebagai berikut:

a) Pengadaan/pembangunan dan pengembangan

Dalam hal tersebut diatas tidak terdapat anggaran pengadaan pembangunan dan pengembangan pada DIPA Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II Tahun Anggaran 2019.

b) Pemeliharaan/perawatan

Pemeliharaan sarana dan prasarana tetap dilakukan setiap tahunnya untuk menjaga dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II pada tahun 2019 meliputi perbaikan/service AC, PC Komputer, Printer, Jaringan Instalasi Listrik, Kendaraan Dinas/Operasional

baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua), rumah dinas serta pemeliharaan gedung kantor

4. TANAH

Pengadilan Negeri Muara Teweh memiliki aset tanah yang terdapat di Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara dan Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Pengadilan Negeri Muara Teweh.

5. PRASARANA GEDUNG

NO	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Keterangan
1	Personal Computer	24	Jumlah Keseluruhan Personal Computer 24 (dua puluh empat) unit yang terdiri dari 17 (tujuh belas) unit dalam kondisi baik/layak pakai dan 7 (tujuh) unit personal komputer dalam kondisi rusak total.
2	Printer	10	Jumlah keseluruhan Printer 10 (sepuluh) unit yang terdiri dari 8 (delapan) unit dalam kondisi baik/layak pakai dan 2 (dua) unit printer dalam kondisi rusak total.
3	Laptop	15	Jumlah keseluruhan Laptop 15 (lima belas) unit yang terdiri dari 12 (dua belas) unit dalam kondisi baik/layak pakai dan 3 (tiga) unit laptop dalam kondisi rusak total.
4	Fingerprint	3	Jumlah keseluruhan Fingerprint 1 (satu) unit dalam kondisi baik dan 2 (dua) unit dalam kondisi rusak
5	Smart TV Samsung (Samsung)	1	Jumlah keseluruhan Smart TV Samsung 1 (satu) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
6	AC Split (Panasonic)	14	Jumlah keseluruhan AC Split 14 (empat belas) unit yang terdiri dari 10 (sepuluh) dalam kondisi baik/layak pakai dan 4 (empat) unit laptop dalam kondisi rusak total.
7	Server (Fujitsu)	2	Jumlah keseluruhan Server 2 (dua) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
8	Router (TP-Link)	1	Jumlah keseluruhan Router 1 (satu) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
9	Unit Power Supply UPS (ICA)	5	Jumlah keseluruhan Unit Power Supply (UPS) yang

NO	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Keterangan
			terdiri dari 5 (lima) unit dalam kondisi baik/layak pakai
10	Scanner (Peralatan Personal)	3	Jumlah keseluruhan Scanner (Peralatan Personal) dalam kondisi baik/layak pakai dan 1 (satu) unit rusak total
11	Monitor (LG)	1	Jumlah keseluruhan Monitor 1 (satu) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
12	Telepon Pararel (PABX)	8	Jumlah keseluruhan Telepon Pararel (PABX) 8 (delapan) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
13	Backdrop (Olahan)	1	Jumlah keseluruhan Backdrop 1 (satu) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
14	Logo Mahkamah Agung	1	Jumlah keseluruhan Logo Mahkamah Agung 1 (satu) dalam kondisi baik/layak pakai.
15	Lemari kayu Toga dan Jas (Olahan)	11	Jumlah keseluruhan Lemari kayu Toga dan Jas 11 (sebelas) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
17	Lemari kayu arsip (Olahan)	13	Jumlah keseluruhan Lemari kayu arsip 13 (tiga belas) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
18	Meja kerja Ketua Pengadilan Negeri (Olahan)	1	Jumlah keseluruhan Meja kerja Ketua PN 1 (satu) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
19	Meja kerja Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Olahan)	1	Jumlah keseluruhan Meja kerja Ketua WKPN 1 (satu) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
20	Meja kerja Panitera (Olahan)	1	Jumlah keseluruhan Meja kerja Ketua Panitera 1 (satu) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
21	Meja kerja Sekretaris (Olahan)	1	Jumlah keseluruhan Meja kerja Ketua Sekretaris 1 (satu) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
22	Meja Informasi (Resepsionis)	1	Jumlah keseluruhan Meja Informasi (Resepsionis) 1 (satu) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
23	Kursi Informasi (Kursi Zeis)	2	Jumlah keseluruhan Kursi Informasi (Kursi Zeis) 2 (dua) unit dalam kondisi baik/layak pakai.

NO	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Keterangan
24	Kursi Majelis Hakim (Olahan Kayu Jati)	7	Jumlah keseluruhan Kursi Majelis Hakim (Olahan Kayu Jati) 7 (tujuh) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
25	Kursi hitam terdakwa (Kursi Zeis)	15	Jumlah keseluruhan Kursi hitam terdakwa (Kursi Zeis) 15 (lima belas) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
26	Kursi Penitera Pengganti hitam (Kursi Zeis)	1	Jumlah keseluruhan Kursi Penitera Pengganti hitam (Kursi Zeis) 1 (satu) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
27	Meja Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum (Olahan)	2	Jumlah Meja Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum (Olahan) 2 (dua) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
28	Kursi Sofa Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Panitera, dan Sekretaris (Sice)	4	Jumlah Kursi Sofa Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Panitera, dan Sekretaris 4 (empat) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
29	Meja Kasubbag dan Panmud (Olahan)	7	Jumlah keseluruhan Meja Kasubbag dan Panmud (Olahan) 7 (tujuh) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
30	Meja kerja kayu staff (Olahan)	1	Jumlah keseluruhan Meja kerja kayu staff 1 (satu) unit dalam kondisi baik/layak pakai
31	Kursi kerja Ketua Pengadilan Negeri (Sice)	1	Jumlah keseluruhan Kursi kerja kayu staff 1 (satu) unit dalam kondisi baik/layak pakai
32	Kursi kerja Hakim (Sice)	5	Jumlah keseluruhan kursi kerja kayu staff 5 (lima) unit dalam kondisi baik/layak pakai
33	Kursi kerja Kasubbag dan Panmud (Sice)	7	Jumlah keseluruhan Kursi kerja Kasubbag dan Panmud (Sice) 7 (tujuh) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
34	Kursi kerja biru staff (Sice)	19	Jumlah keseluruhan Kursi kerja biru staff (Sice) 19 (sembilan belas) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
35	Kursi besi panjang	23	Jumlah keseluruhan Kursi besi panjang 23 (dua puluh tiga) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
35	Meja kerja (Biro 160X70X75)	17	Jumlah keseluruhan Meja kerja (Biro 160X70X75) 17 (tujuh belas) yang terdiri dari 6 (enam) unit dalam kondisi baik/layak pakai dan 11 (sebelas) unit dalam kondisi rusak total.

NO	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Keterangan
36	Meja kerja (Biro 120X70X75)	17	Jumlah keseluruhan Meja kerja (Biro 120X70X75) 17 (tujuh belas) yang terdiri dari 6 (enam) unit dalam kondisi baik/layak pakai dan 11 (sebelas) dalam kondisi rusak total.
37	Kursi besi metal pertemuan	50	Jumlah keseluruhan Kursi besi metal pertemuan 50 (lima puluh) unit yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) unit dalam kondisi baik/layak pakai dan 25 (dua puluh lima) unit dalam kondisi rusak total.
38	Rak kayu arsip	15	Jumlah keseluruhan Rak kayu arsip 15 (lima belas) unit yang terdiri dari 10 (sepuluh) dalam kondisi baik/layak pakai dan 5 (lima) dalam kondisi rusak total.

6. PENGHAPUSAN

Tidak terdapat penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung untuk tahun 2019 di Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II .

Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II dalam melaksanakan tugas agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan harapan maka perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II yang dilaksanakan dalam tahun 2019 ini dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

7. SARANA DAN PRASARANA

- a) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi (Laptop untuk hakim) Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk tahun 2019 yaitu:

NO	NAMA	KUANTITAS	NILAI TOTAL (Rp.)
1	LAPTOP	4	Rp. 52.000.000

- b. Pada tahun 2019 telah diterima bantuan alat-alat untuk menunjang keperluan Kantor dan e-Court yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA	KUANTITAS
1	MESIN FOTOCOPY XEROX	1
2	PC.UNIT ALL IN ONE HP AIO PRO ONE	4
3	UPS.PC.UNIT	4
4	SERVER PUJITSU INTEL XEON	1

5	RAK SERVER	1
6	VESTOUCH INTERACTIVE ANDROID	1

8. KENDARAAN DINAS

Berikut rincian kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang dimiliki oleh kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	TOYOTA KIJANG KH 1077 EU	1193			√	
2.	TOYOTA KIJANG INNOVA KH 4 EU	2006	√			
3.	DAIHATUS TERIOS	2011	√			
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	SUZUKI /A100	1990			√	
2	SUZUKI /A100	1990			√	
3	HONDA NF 100 L (SUPRA FIT)	2004		√		
4	HONDA NF 100 L (SUPRA FIT)	2004		√		
5	HONDA NF 125 D (KARISMA D)	2005		√		
6	HONDA GLP 160 cc	2006			√	
7	Honda NF 100 SLF	2007		√		
8	HONDA VARIO HF 125 D	2015	√			

a) Jenis Kendaraan Roda 4

1. Mobil dengan nomor polisi KH 1077 EU ; type Toyota (Kijang Kotak); tahun peroleh 1993; nomor mesin 5k-9165161; nomor rangka KF40-130938; nomor BPKB E No.2178236; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II; kondisi mobil sekarang Rusak Total.
2. Mobil dengan nomor polisi KH 4 E ; type Toyota (inova); tahun peroleh 2006; nomor mesin 1TR6246448; nomor rangka MHFXW41G760016905; nomor BPKB 103381351492178236-G; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II; di gunakan sebagai mobil dinas Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.
3. Mobil dengan nomor polisi KH 1521 EU ; type Daihatsu (Terios); tahun peroleh 2011; nomor mesin DJK4173 nomor rangka MHKG2CJ2JBK052269; nomor BPKB I-06795727-M; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II; di gunakan sebagai mobil dinas di gunakan sebagai mobil dinas Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.

b) Jenis Kendaraan Roda 2

1. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 4462EY ; type Honda Vario; tahun peroleh 2015; nomor mesin JFH1E1430092 nomor rangka MH1JFH110FK435083; nomor BPKB L-06944806; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II; dipergunakan sebagai kendaraan dinas Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh kelas II
2. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 4972 EM; type Suzuki/A100; tahun peroleh 1990; nomor mesin A100-ID-12473 nomor rangka A100-236793; nomor BPKB - ; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II; Kondisi motor rusak total tidak dipergunakan (Gudang).
3. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2271 EY ; type Honda NF 125 D (KARISMA D); tahun peroleh 2005; nomor mesin JB22E1565350 nomor rangka MH1JB22155K566323; nomor BPKB D NO.8616814M; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II; tidak dipergunakan (Gudang).
4. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2130 EY ; type Honda NF 100 L (SUPRA FIT); tahun peroleh 2004; nomor mesin HB11E1485027 nomor rangka MH1HB11124K48325; nomor BPKB D NO.8616814M; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II; tidak dipergunakan (Gudang).
5. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2129 EY ; type Honda NF 100 L (SUPRA FIT); tahun peroleh 2004; nomor mesin HB11E1481677 nomor rangka MH1HB11104K484492; nomor BPKB D NO.8616813M; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II; tidak dipergunakan (Gudang)
6. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2452 EY ; type Honda NF100SLF tahun peroleh 2007; nomor mesin HB32E1197483 nomor rangka MH1HB321X7K205242; nomor BPKB- ; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II; dipergunakan sebagai operasional bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.
7. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2452 EY ; type Honda NF100SLF tahun peroleh 2007; nomor mesin HB32E1197483 nomor rangka MH1HB321X7K205242; nomor BPKB- ; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II; dipergunakan sebagai operasional bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.
8. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 4971 EM ; type Suzuki/A100 tahun peroleh 1990; nomor mesin A100-ID-124083 nomor rangka A100-236783;

nomor BPKB- ; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II ; tidak dipergunakan (Gudang)

7. PENGADILAN NEGERI BUNTOK

1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II terkhusus pada pengelolaan sarana dan prasarana merincikan tentang pelaksanaan pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung yang meliputi pengadaan, pemeliharaan dan usulan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dalam kurun waktu tahun anggaran 2019.

Berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana gedung secara umum pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagai berikut:

4. Pengadaan/pembangunan dan pengembangan

Dalam hal tersebut diatas tidak terdapat anggaran pengadaan pembangunan dan pengembangan pada DIPA Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun Anggaran 2019.

5. Pemeliharaan/perawatan

Pemeliharaan sarana dan prasarana tetap dilakukan setiap tahunnya untuk menjaga dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada tahun 2019 meliputi perbaikan/service AC, PC Komputer, Printer, Jaringan Instalasi Listrik, Kendaraan Dinas/Operasional baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua), rumah dinas serta pemeliharaan gedung kantor.

Gedung kantor Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berdiri pada tahun 1981. Bangunan tersebut berdiri di atas tanah dengan luas 3.120 m² yang terdiri dari luas tanah untuk bangunan yaitu 1.718 m² dan luas tanah untuk sarana 1.402 m². Status Kepemilikan yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 5 tanggal 9 Mei 1980 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Pelita Raya No. 20 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Gedung kantor Pengadilan Negeri Buntok Kelas II terdiri dari:

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Ket
1	RUANG KPN	1	terdiri dari ruang ruang kerja yang menyatu dengan ruang tamu, toilet dan ruang ganti
2	RUANG WKPN	1	terdiri dari ruang kerja yang menyatu dengan ruang tamu
3	RUANG HAKIM	1	-
4	RUANG PANITERA	1	terdiri dari ruang kerja yang menyatu dengan ruang tamu
5	RUANG SEKRETARIS	1	terdiri dari ruang kerja yang menyatu dengan ruang tamu

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Ket
6	RUANG KEPANITERAAN PIDANA	1	-
7	RUANG KEPANITERAAN HUKUM	1	terdiri dari ruang kerja dan ruang arsip perkara
8	RUANG KEPANITERAAN PERDATA	1	terdiri dari ruang kerja dan ruang arsip perkara perdata
9	RUANG SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA	1	-
10	RUANG SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	1	-
11	RUANG SUB BAGIAN PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN	1	-
12	RUANG MEDIASI/DIVERSI/KAUKUS	1	-
13	RUANG BARANG BUKTI	1	-
14	RUANG TUNGGU BAPAS /PEKERJA SOSIAL	1	-
15	RUANG LAKTASI	1	-
16	RUANG TAHANAN ANAK	1	-
17	RUANG TUNGGU JAKSA	1	-
18	RUANG POSBAKUM	1	-
19	RUANG PERPUSTAKAAN	1	-
20	RUANG TAHANAN	2	Terdiri dari ruang tahanan pria dan wanita
21	RUANG SIDANG	3	Terdiri dari ruang sidang utama (2 rg) dan ruang sidang anak
22	GUDANG	2	Terdiri dari Gudang Peralatan dan Gudang Arsip
23	TOILET	3	Terdiri dari Toilet Umum, Hakim dan Pegawai

Tabel 22. Keadaan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Gedung kantor Pengadilan Negeri Buntok sampai saat ini belum memenuhi standar prototype, dan satu-satunya Pengadilan Negeri yang belum memenuhi standar prototype di wilayah Kalimantan Tengah.

2. Pengelolaan Sarana/Prasarana Bangunan Lainnya

Selain pengelolaan Gedung kantor, Satuan Kerja Pengadilan Negeri Buntok Kelas II juga mengelola bangunan lainnya yaitu Rumah Dinas, Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Mushola), Gedung tempat kerja lainnya (Gazebo) dan Pagar.

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			*Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1	Rumah Dinas Ketua	1	√			Digunakan oleh WKPN

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			*Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√			Digunakan oleh KPN
3	Rumah Dinas Hakim	4	√			
4	Rumah Dinas Panitera	1	√			
5	Rumah Dinas Sekretaris	1	√			Digunakan oleh Plt Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan
II	Bangunan Lainnya					
1	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	√			
2.	Gedung tempat kerja lainnya (Gazebo)	2	√			
3.	Pagar Permanen	1	√			

3. Pengelolaan Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran

No	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Keterangan
1	Mesin ketik listrik portabel	1	Rusak Berat
2	Lemari Besi/metal	5	Rusak Berat
3	Lemari Kayu	53	Baik
4	Rak Besi	18	Baik
5	Rak Kayu	2	Rusak Berat
6	Filing Cabinet Besi	11	Baik
7	Brandkas	3	Baik
8	Tabung Pemadam Api	10	Baik
9	CCTV-Camera Control Television System	4	2 Baik, 2 Rusak Berat
10	Papan Visual / Nama	19	Baik
11	White board	7	Baik
12	Peta	1	Baik
13	Mesin Absensi	2	Baik
14	Hand metal Detector	1	Baik
15	LCD Projector/infocus	1	Baik
16	Focusing screen/layer LCD Projector	1	Baik
17	Papan Pengumuman	1	Baik
18	Alat Kantor Lainnya	1	Baik
19	Meja Kerja Kayu	97	Baik
20	Kursi Besi / Metal	218	Baik
21	Kursi Kayu	87	Baik
22	Sice	18	Baik
23	Bangku Panjang Kayu	23	Baik

No	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Keterangan
24	Meja Rapat	6	Baik
25	Meja Komputer	14	Baik
26	Meja Telepon	4	Baik
27	Meja Resepsionis	4	Baik
28	Partisi	3	Baik
29	Meubeleir Lainnya	2	Baik
30	Jam Elektronik	4	Baik
31	AC Split	21	Baik
32	Kipas Angin	16	Baik
33	Televisi	4	Baik
34	Loudspeaker	2	Baik
35	Soundsystem	2	Baik
36	Wireless	1	Baik
37	Lambang Garuda Pancasila	7	Baik
38	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Baik
39	Tiang Bendera	6	Baik
40	Mimbar/Podium	1	Baik
41	Palu Sidang	2	Baik
42	Lambang Instansi	1	Baik
43	Handycam	1	Baik
44	Asbak Tinggi	3	Baik
45	Intercom Unit	2	Baik
46	Uninterruptible Power Suply (UPS)	4	Baik
47	Celling Mount Bracket	1	Baik
48	Digital led running text	1	Baik
49	Headset	2	Baik
50	Kamera Digital	1	Baik
51	Video Conference	1	Baik
52	Pesawat Telepon	1	Baik
53	Handy Talky (HT)	1	Baik
54	Faximile	1	Baik
55	Komputer Jaringan Lainnya	1	Baik
56	PC unit	33	Baik
57	Laptop	10	Baik
58	Printer (Peralatan Personal Computer)	13	Baik
59	Scanner (Peralatan Personal Computer)	2	Baik
60	Server	2	Baik
61	Router	1	Baik
62	Rak Server	1	Baik
63	Peralatan Komputer Lainnya	7	Baik
64	Alat Tenis Meja	1	Baik
65	Monografi	4537	Baik
66	Software Komputer	1	Baik
67	Electric Generating Set Lainnya (Genset)	1	Baik

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Buntok Kelas II mendapatkan belanja modal untuk pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran dan pengadaan sarana prasarana pendukung SIPP dengan anggaran sebesar Rp 26.000.000. dengan realisasi sebesar Rp 25.500.000 atau 98,08 %.

Dengan rincian sebagai berikut:

No	MAK	Uraian	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)
1	532111	Pengadaan Laptop	25.500.000	26.000.000
		J U M L A H	25.500.000	26.000.000

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada Tahun 2019 juga mendapatkan Belanja Modal kiriman dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Alat Pengolah Data & Komunikasi pendukung E- Court dengan rincian sebagai berikut :

No	MAK	Uraian	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah	Satuan
1	532111	Server	84.310.000	1	Unit
2	532111	Rak Server	9.866.590	1	Unit
3	532111	PC. Unit	48.749.600	4	Unit
4	532111	UPS	10.136.000	4	Unit
5	532111	Komputer Jaringan Lainnya	17.840.000	1	Unit
		J U M L A H	Rp 170.902.190		

4. Pengelolaan Sarana/Prasarana Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas)

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II terdiri dari:

1. Mobil dengan nomor polisi KH 1647 DU; type Honda HR-V RU1 1.5 A MT CKB; merk Honda; tahun pembuatan 2015; nomor mesin: L15Z61028383; nomor rangka: MHRRU1710FJ400586; nomor BPKB: L06970294M; tahun perolehan 2016, tercatat atas nama Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan digunakan sebagai mobil dinas Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
2. Mobil dengan nomor polisi KH 4 DU; type Toyota/Kijang; merk Innova E; tahun pembuatan 2007; nomor mesin: 1TR6359460; nomor rangka: MHFXW41G07002039; nomor BPKB: C-5795206-M; tahun perolehan 2007, tercatat atas nama Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan digunakan sebagai mobil dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
3. Mobil dengan nomor polisi KH 1063 DU; type Toyota/Kijang Standart KF 80 Long Ben; merk Toyota/Kijang; tahun pembuatan 2003; nomor mesin: 7K-0653858; nomor rangka: MHF11KF8030085065; nomor BPKB: C-5795206-M; tahun perolehan 2003, tercatat atas nama Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan digunakan sebagai mobil dinas Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

4. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2366 DY; merk/Type Honda/NF 100SLD SUPRA FIT; tahun pembuatan 2007; nomor mesin: HB42E-1132866; nomor rangka: MH1HB421X7K124926; Nomor BPKB E5026916M tahun perolehan 2007 tercatat atas nama Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Petugas Pengelola ATK.
5. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2138 DY; merk Honda; Type GLP III MEGA PRO tahun pembuatan 2005; nomor mesin: KEHLE-1166325; nomor rangka: MH1KEHL106K-167964; nomor BPKB: E0749432M; tahun perolehan 2006 tercatat atas nama Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan digunakan sebagai kendaraan dinas Juru Sita Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
6. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2070 DY; merk Honda NF 100 L Supra Fit; tahun pembuatan 2004; nomor mesin: HB11E-1512357; nomor rangka: MH1HB111B4K-510465; nomor BPKB: Sewaktu Transfer Tidak ada; tahun perolehan 2004 tercatat atas nama Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan dalam kondisi rusak berat.
7. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2137 DY; merk Honda NF 125 D; tahun pembuatan 2005; nomor mesin: JB22E1565530; nomor rangka: MH1JB22105K566780; nomor BPKB: E0749492M; tahun perolehan 2005 tercatat atas nama Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	HONDA HR-V RU1 1.5 A MT CKB (KH 1647 DU)	2016	√			Ketua
2	TOYOTA KIJANG INNOVA E (KH 4 DU)	2010	√			Wakil Ketua
3	TOYOTA KIJANG STANDART KF 80 (KH 1063 DU)	2003	√			Panitera
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	HONDA NF 100 L SUPRA FIT (KH 2070 DY)	2005			√	Kasubag Umum dan Keuangan
2	HONDA GLP III MEGA	2005	√			Juru Sita

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	PRO (KH 2138 DY)					
3	HONDA NF 125 D (KH 2137 DY)	2005	√			Panitera
4	HONDA NF 100 SLD SUPRA FIT (KH 2366 DY)	2007	√			Untuk Operasional Umum

5. Pengelolaan Aset Tanah

Pengelolaan aset berupa tanah bangunan kantor dan tanah bangunan rumah negara terdiri dari:

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Luas
1	Tanah Bangunan Rumah Negara gol. 2	6	4591 m ²
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	3120 m ²

Berikut Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca (Periode 31 Desember 2019):

AKUN NERACA			JUMLAH	
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
117111	Barang Konsumsi	2,004,000	0	2,004,000
117113	Bahan untuk pemeliharaan	254,100	0	254,100
131111	Tanah	4,291,681,000	0	4,291,681,000
132111	Peralatan dan Mesin	2,313,127,714	1,815,985,207	497,142,507
133111	Gedung dan Bangunan	3,746,527,000	716,379,906	3,030,147,094
134113	Jaringan	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	60,376,669	0	60,376,669
136111	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0
162151	Software	3,903,000	1,951,500	1,951,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	36,804,000	36,804,000	0
JUMLAH KEGIATAN 1066.970		10,454,677,483	2,571,120,613	7,883,556,870

8. PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG

1. PENGOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang II terkhusus pada pengelolaan sarana dan prasarana merincikan tentang pelaksanaan pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung yang meliputi pengadaan, pemeliharaan dan usulan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dalam kurun waktu tahun anggaran 2019.

Pengadilan Negeri Tamiang Layang II saat ini mempunyai gedung perkantoran dengan sarana dan prasarana ruangan sebagai berikut:

1. Gedung Kantor

Gedung kantor Pengadilan Negeri Tamiang Layang II memiliki 2 lantai dengan luas bangunan 699,75 M² dibangun pada tahun 2007-2008, bangunan tersebut berdiri di atas tanah dengan luas 6.000 M² Sertifikat Hak Pakai No. 3 tanggal 9 Juni 1981 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Ahmad Yani No.007 Tamiang Layang, Kab.Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah, pada Tahun 2019 mendapat anggaran pada DIPA/RKAKL No 01 Belanja Modal Mak 533121 sejumlah Rp. 4.950.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) diperuntukan Perluasan Gedung kantor lanjutan;

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Ket
1.	RUANG KPN	1	L1
2.	RUANG WKPN	1	L1
3.	RUANG HAKIM	1	L1
4.	LANTAI DASAR : Sayap Kanan : - Toilet Pegawai - Ruang Arsip - Ruang Kepant.Hukum - Ruang Arsip Perkara - Ruang Pengacara - Ruang Mediasi - Ruang Sidang perdata - Toilet Pengunjung Sidang	 1 1 1 1 1 1 1 1 6	 Ld Ld Ld Ld Ld Ld Ld Ld Ld
5.	LANTAI DASAR : Sayap Kiri : - Ruang Barang Bukti - Ruang Kesehatan - Ruang Saksi Korban - Ruang Sidang Anak - Ruang Tunggu Anak Laki-laki - Ruang Tunggu Anak Perempuan - Ruang Laktasi - Ruang Bapas - Ruang Diversi - Ruang Tahanan Anak Laki-laki - Ruang Tahanan Anak Perempuan - Ruang Tunggu Jaksa - Ruang Tunggu Polisi - Ruang Sidang Pidana	 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 Ld Ld Ld Ld Ld Ld Ld Ld Ld Ld Ld Ld Ld Ld Ld

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Ket
		1	Ld
6.	LANTAI DASAR : Tengah : - Ruang Kepaniteraan Pidana - Ruang Kepaniteraan Perdata - Ruang Jurusita - Ruang Panitera Pengganti - Ruang Perpustakaan - Ruang Sidang Utama - Ruang Teleconprence	 1 1 1 1 1 1 1 1	 Ld Ld Ld Ld Ld Ld Ld
7.	Loby Depan/PTSP		Ld
8.	Ruang Pos Bakum	1	Ld
9.	RUANG PANITERA	1	Ld
10.	RUANG SEKRETARIS	1	Ld
11.	RUANG KESEKRETARIATAN - Umum dan Keuangan - Ruang Perencanaan, TI/Pelaporan dan Server - Kepegawaian & Ortala	 1 1 1	 Ld Ld Ld
12	MUSHOLA	1	Ld
13.	GUDANG	2	Ld
14.	TOILET UMUM :	6	Ld

- Ruang Ketua yang terdiri dari ruang kerja , ruang rapat dan ruang tamu;
- Ruang Wakil Ketua yang terdiri dari ruang kerja, ruang rapat dan ruang tamu;
- Ruang Panitera yang terdiri dari ruang kerja dan ruang tamu ;
- Ruang Sekretaris yang terdiri dari ruang kerja dan ruang tamu;
- Ruang Hakim ruangan diisi oleh 3 (tiga) orang Hakim ;
- Ruang Panitera Pengganti;
- Ruang Perpustakaan;
- Ruang Kepaniteraan Pidana;
- Ruang Kepaniteraan Perdata;
- Ruang Kepaniteraan Hukum;
- Ruang Arsip Perkara;
- Ruang Kesekretariatan Umum dan Keuangan;
- Ruang Kesekretariatan PTIP dan Server;
- Ruang Kepegawaian dan Ortala;
- Mushola;
- Gudang;
- Toilet yang terdiri dari 20 (dua puluh) buah termasuk toilet yang berada di dalam ruangan.

2. Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1	Rumah Dinas Ketua	-	-	-	-	-
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	-	-	-	-	-
3	Rumah Dinas Hakim	-	-	-	-	-
4	Rumah Dinas Panitera	-	-	-	-	-
5	Rumah Dinas Sekretaris	-	-	-	-	-

Berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana gedung secara umum pada Pengadilan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II sebagai berikut:

a. Pengadaan/pembangunan dan pengembangan

Dalam hal tersebut diatas Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II DIPA 01 Tahun Anggaran 2019 mendapat anggaran untuk perluasan gedung kantor lanjutan sejumlah Rp. 4.950.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sudah dilaksanakan perluasan gedung kantor lanjutan selama 120 hari sesuai kontrak dari tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan 11 Desember 2019.

b. Pemeliharaan/perawatan

Pemeliharaan sarana dan prasarana tetap dilakukan setiap tahunnya untuk menjaga dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II pada tahun 2019 meliputi perbaikan/service AC, PC Komputer, Printer, Jaringan Instalasi Listrik, Kendaraan Dinas/Operasional baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua), serta pemeliharaan gedung kantor.

No	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Keterangan
1	Mesin Ketik Manual Standard (11-13 Inci)	5	
2	Lemari Besi/metal	5	
3	Lemari Kayu	48	
4	Rak Besi	12	
5	Filing Cabinet Besi	19	
6	Brandkas	1	
7	Alat Penyimpanan perlengkapan Kantor Lainnya	60	
8	Papan Visual/Papan Nama	26	
9	Mesin Absensi	2	
10	Stempel Timbul/Bulat	1	
11	Meja Kerja Kayu	70	
12	Kursi Besi/metal	131	
13	Kursi Kayu	28	

c. Penghapusan

Tidak terdapat penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung untuk tahun 2019 di Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II, karena gedung kantor tersebut baru berdiri dan selesai pekerjaan fisik pada pertengahan tahun 2008 dan pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II mendapat tambahan untuk pembangunan gedung lanjutan sejumlah Rp. 4.950.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dalam melaksanakan tugas agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan harapan maka perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II yang dilaksanakan dalam tahun 2019 ini dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

a) Sarana dan Prasarana

1. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II data yang tercatat sampai dengan tahun 2019 antara lain :

NO	NAMA	KUANTITAS	NILAI TOTAL (Rp.)
1.	LAPTOP Lenovo ideapad 510s	1 unit	15.000.000,-
2.	P.C. Unit DELL Inspiron 3250	4 unit	40.000.000.-
3.	PRINTER Epson L360	4 unit	10.000.000,-
4.	SCANNER Canon Scanner Image Formula DR-F120	1 Unit	7.500.000,-
5.	TELEVISI Samsung Full HD	1 Unit	20.000.000,-
6.	UPS APC Smart UPS 1500VA	2 Unit	20.000.000,-
7.	LAPTOP Fujitsu Lifebook E546 Thn.2017	2 Unit	30.000.000,-
8.	LAPTOP Fujitsu Lifebook E546 Thn.2018	2 Unit	26.000.000,-
9.	LAPTOP Fujitsu Lifebook E546 Thn.2019 untuk Hakim	4 Unit	52.000.000,-

2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II data yang tercatat sampai dengan tahun 2019 antara lain :

NO	NAMA	KUANTITAS	NILAI TOTAL (Rp.)
1.	Meja Direksi	1 Unit	8.000.000,-
2.	Meja Kerja dan Kursi	10 Unit	50.000.000,-
3.	Meja Kerja 1 Biro	4 Unit	16.000.000,-
4.	Kursi Putar Tinggi	1 Unit	7.000.000,-
5.	Kursi Putar Tinggi (Kabag)	1 Unit	6.000.000,-
6.	Filing Cabinet	4 Unit	10.000.000,-

7.	Sice/Sofa	2 Unit	14.000.000,-
8	AC Split	5 Unit	25.000.000,-
9.	Lemari Toga	3 Unit	10.500.000,-
10.	- Lemari Arsip	4 Unit	50.000.000,-
	- Kepegawaian	8 Unit	Belum diinput ke Simak BMN
	- Kursi PTSP	1 Unit	
	- Meja Ketua	1 Unit	
	- Meja Rapat	2 Unit	
	- Meja Ecourt	1 Unit	
	- Podium		

3. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II data yang tercatat sampai dengan tahun 2019 antara lain :

NO	NAMA	KUANTITAS	NILAI TOTAL (Rp.)
1	PC	2 Unit	10.000.000
2	Printer	2 Unit	5.000.000
3	CCTV	1 Set	20.000.000,-

4. Kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 yang dimiliki oleh kantor Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II data yang tercatat sampai dengan tahun 2019 antara lain :

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Kijang Innova G (KH 1532 KU)	2013	√			Ketua
2	Kijang Innova G (KH 1514 KU)	2011	√			Wakil Ketua
3	Kijang Innova E Standar (KH 1519 KU)	2009	√			Panitera
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Sepeda Motor Honda SUPRA/ NF 125 TRF (KH 2509 KY)	2009	√			Jurusita
2	Honda Mega Pro GL 160, (KH 2508 KY)	2008	√			Umum Dan Keuangan

1. Mobil dengan nomor polisi KH 1532 KU, type Kijang Innova G Tahun 2013 merk Toyota nomor mesin: ITR7533656 nomor rangka:

- MHFXW42G3D2255710, Status Barang Pinjam Pakai dari Pemerintah Daerah Barito Timur;
2. Mobil dengan nomor polisi KH 1514 KU type Kijang Innova G Tahun 2011, merk Toyota, nomor mesin: ITR7153651 nomor rangka: MHFXW42G3B2196932 nomor BPKB: I 06795202 M, tahun perolehan 2009, tercatat atas nama Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II;
 3. Mobil dengan nomor polisi B 1397 PQN & nomor polisi KH 1519 KU, type Kijang Innova E Standar Tahun 2009, merk Toyota, nomor mesin: ITR6690551, nomor rangka: MHFXW41G590034582, nomor BPKB: L.06929128, tahun perolehan 2011, tercatat atas nama Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II.
 4. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2509 KY, merk Honda SUPRA/ NF 125 TRF tahun pembuatan 2008; nomor mesin: JB01E-1052112, nomor rangka: MH1JBO1188KO51813, nomor BPKB F 6092697 M tahun perolehan 2003 tercatat atas nama Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Jurusita Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II
 5. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2508 KY merk Honda Mega Pro GL 160, tahun pembuatan 2008; nomor mesin: KC11E-121149 nomor rangka: MH17KC11188KI9894; nomor BPKB: F 60926981 M tahun perolehan 2003 tercatat atas nama Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II

9. PENGADILAN NEGERI KASONGAN

a. Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kasongan dibangun diatas tanah seluas 16.839 M2, dengan luas bangunan 2.048 M2 terdiri dari 2 (dua) lantai dan tipe bangunan permanen. Penataan ruang dalam Gedung Pengadilan Negeri Kasongan adalah sebagai berikut :

No.	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Sidang Umum	2	
2	Ruang Sidang Anak	1	
3	Ruang KPN	1	
4	Ruang WKPN	1	
5	Ruang Panitera	1	
6	Ruang Sekretaris	1	

7	Ruang Hakim	1	
8	Ruang Panitera Muda Pidana	1	
9	Ruang Panitera Muda Perdata	1	
10	Ruang Panitera Muda Hukum	1	
11	Ruang Sub bagian Umum & Keuangan	1	
12	Ruang Sub bagian Kepegawaian & Organisasi tata laksana	1	
13	Ruang Sub bagian Perencanaan, TI, & Pelaporan	1	
14	Ruang Bendahara	1	
15	Ruang Mediasi	1	
16	Ruang Barang Bukti	1	
17	Ruang Pos bantuan hukum (Posbakum)	1	
18	Ruang tunggu Jaksa	1	
19	Ruang Tunggu Anak (Tahanan Anak)	1	
20	Ruang Tahanan	2	
21	Ruang Akreditasi	1	
22	Ruang Rapat Pimpinan	1	
23	Ruang IT/Server	1	
24	Ruang Musholla	2	
25	Ruang Persekutuan Kristiani	1	
26	Ruang Pertemuan Umum	1	
27	Ruang Arsip berkas Perkara	1	
28	Ruang Perpustakaan	1	
29	Ruang Laktasi (ibu menyusui)	1	
30	Gudang	2	
31	Toilet	6	

Lantai Dasar (1) terdiri dari :

- 3 Ruang Sidang yang terdiri dari 1 Ruang sidang Utama, 1 Ruang sidang anak, dan 1 Ruang sidang biasa ;
- 1 Ruang Kepaniteraan yang terdiri dari Ruang Kepaniteraan Pidana, Ruang Kepaniteraan Perdata, dan Ruang Kepaniteraan Hukum ;
- 1 Ruang Kesekretariatan yang terdiri dari Ruang Kasubbag Umum & Keuangan, Ruang Kasubbag Kepegawaian & Organisasi tata laksana, dan Ruang Kasubbag Perencanaan, TI, Pelaporan ;
- 1 Ruang Barang Bukti ;
- 1 Ruang Mediasi ;
- 1 Ruang Pengacara dan POSBAKUM ;
- 1 Ruang Jaksa ;
- 1 Ruang Laktasi (ruang Ibu Menyusui) ;
- 1 Ruang Musholla ;
- 3 Ruang tahanan ;
- 2 buah Toilet ;

Lantai Atas (2) terdiri dari :

- 1 Ruang Ketua Pengadilan, yang dilengkapi dengan ruang kerja, ruang tamu dan toilet ;
- 1 Ruang Wakil Ketua Pengadilan, yang dilengkapi ruang kerja, ruang tamu dan toilet ;
- 1 Ruang Panitera, yang dilengkapi ruang kerja, ruang tamu dan toilet ;
- 1 Ruang Sekretaris,
- 1 Ruang Rapat Pimpinan ;
- 1 Ruang Hakim-Hakim ;
- 1 Ruang Pertemuan Umum ;
- 1 Ruang Arsip Berkas Perkara ;
- 1 Ruang Perpustakaan ;
- 1 Ruang Server ;
- 1 Ruang Musholla ;
- 1 Ruang Ibadah Persekutuan Kristiani ;
- 1 Ruang Sekretariat Akreditasi Penjaminan Mutu ;
- 2 Ruang Gudang ;
- 4 buah Toilet ;

Selain itu kawasan gedung Pengadilan Negeri Kasongan juga dilengkapi dengan Tempat Parkir Mobil tipe permanen dan tempat Parkir Motor semi permanen, dan Pos Satpam tipe permanen.

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung pada tahun anggaran 2019 adalah Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung terdiri dari :

- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi (Laptop untuk Hakim) AC Laptop sebanyak 3 unit dengan nilai perolehan Rp. 39.000.000,-

b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Hal-hal yang dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas Pengadilan antara lain adanya sarana dan prasarana fasilitas yang menunjang. Dalam hal ini sarana dan prasarana fasilitas gedung yang ada di Pengadilan Negeri Kasongan adalah:

- Rumah Dinas (TIDAK ADA)
- Kendaraan Dinas :

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Toyota Innova G Lux	2015				
2	Toyota Fortuner	2019				*Pinjam pakai

						Pemda
3	Suzuki Apv	2011				*Pinjam pakai Pemda
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Honda Revo	2012				
2	Honda Revo	2012				

- 1 buah Mobil Toyota Innova G Lux milik sendiri atas nama Pengadilan Negeri Kasongan dengan Nomor Polisi KH 1533 NU (KH 5 NU) digunakan sebagai Mobil Dinas Ketua Pengadilan Negeri Kasongan ;
- 1 buah Mobil Toyota Fortuner, status Pinjam Pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dengan Nomor Polisi KH 1136 NU digunakan sebagai Mobil Dinas Ketua Pengadilan Negeri Kasongan ;
- 1 buah Mobil Suzuki APV, status Pinjam Pakai dari Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Nomor Polisi KH 1077 NU digunakan sebagai Mobil Dinas Sekretaris Pengadilan Negeri Kasongan ;
- 1 buah Sepeda Motor milik sendiri atas nama Pengadilan Negeri Kasongan dengan Nomor Polisi KH 5071 NY digunakan sebagai Kendaraan Dinas Panitera Pengadilan Negeri Kasongan ;
- 1 buah Sepeda Motor milik sendiri atas nama Pengadilan Negeri Kasongan dengan Nomor Polisi KH 5072 NY digunakan sebagai Kendaraan Dinas Fungsional Umum ;

▪ Fasilitas Perkantoran :

No.	Sarana/Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah	Keterangan
Perlengkapan Elektronik			
1	Komputer	22 unit	1 unit kondisi rusak
2	Laptop	11 unit	
3	Note book	1 unit	
4	Speaker	12 unit	
5	Printer	30 unit	
6	Scanner	2 unit	
7	Server	1 unit	
8	Software Komputer	9 unit	
9	Facsimile	1 unit	
10	Genset	1 unit	
11	Local Area Network (LAN)	1 unit	
12	Power Suply	1 unit	
13	AC Split	25 unit	
14	Televisi	2 unit	
15	Mesin Absensi	1 unit	
16	Router	1 unit	
17	CCTV	2 paket	
18	Sound system	1 paket	
19	LCD Projector/Infocus	1 unit	

No.	Sarana/Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah	Keterangan
20	Unit Power Suply (UPS)	25 unit	9 unit kondisi rusak
Perlengkapan Meubelair			
21	Lemari Kayu	28 unit	
22	Brandkas	2 unit	
23	Papan visual/papan nama	66 unit	
24	Papan Pengumuman	1 unit	
25	Meja kerja kayu	65 unit	
26	Kursi besi / metal	105 unit	10 unit kondisi rusak berat
27	Kursi kayu	24 unit	
28	Bangku panjang kayu	10 unit	
29	Meja computer	9 unit	
30	Meja resepsionis	1 unit	
31	Rak server	1 unit	
32	Sice/sofa	4 unit	
33	Rak besi	5 unit	
34	Meja rapat	11 unit	
35	Meja informasi & Pengaduan	1 unit	
36	Kursi kayu panjang	6 unit	
37	Meja kecil	6 unit	
38	Meja dispenser & tempat koran	1 unit	
Perlengkapan lainnya			
39	Tiang bendera	2 unit	
40	Tangga aluminium	1 unit	
41	Palu sidang	3 unit	
42	Lambing instansi	1 unit	
43	Gordyn/Kray	1 unit	
44	Bangunan semi permanen (smoking area)	1 set	

Untuk tahun anggaran 2019 tidak ada dilakukan penghapusan Barang Milik Negera (BMN), walaupun sudah ada beberapa barang yang dalam kondisi rusak berat.

10. PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK

1. Gedung



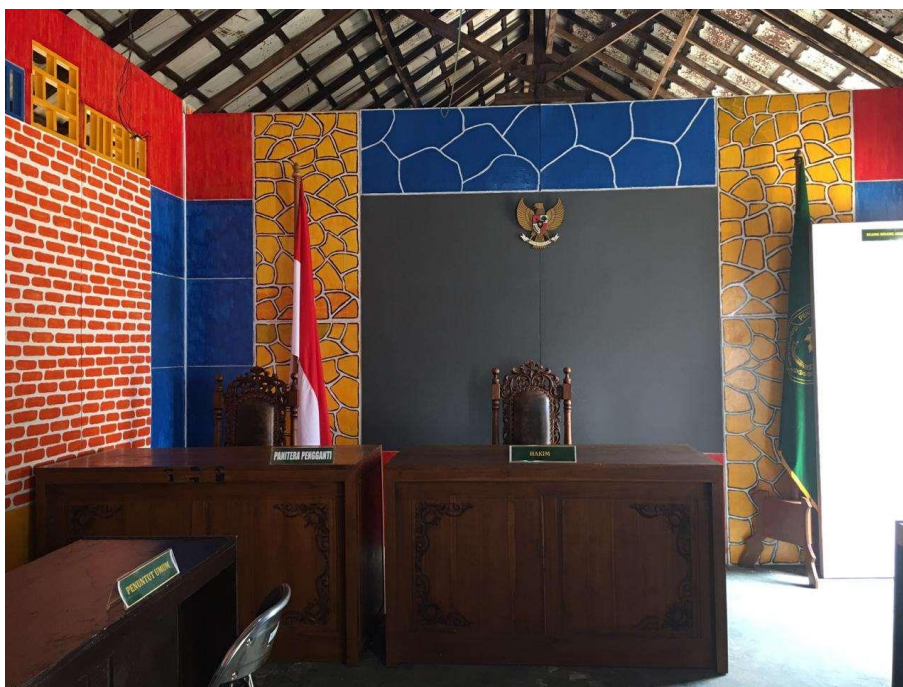
Gedung Kantor Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II yang dipakai sekarang adalah Gedung Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau terletak di Jalan Bukit Hibul Utara No.096, Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Gedung Kantor Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II masih berstatus Pinjam Pakai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. Gedung Kantor Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II tersebut luas bangunannya 220 m2 konstruksi bangunan permanen dengan luas tanah 3000 m2. Keadaan kantor Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II tersebut tertata rapi dan bersih dengan dihiasi dengan taman bunga dan kolam. Di halaman samping kantor dibangun sebuah musholla pada tahun 2018, dan di bagian belakang kantor ada Taman Kecil. Di samping kiri depan kantor ada tempat parkir kendaraan roda dua beserta kendaraan roda empat. Dan di samping kanan ada tempat parkir untuk hakim dan pegawai serta untuk kendaraan tahanan, polisi, dan pengunjung. Di Pengadilan Negeri Nanga Bulik sudah terdapat Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pojok e-Court untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sudah dibangun ruang mediasi, ruang tunggu pengunjung, ruang menyusui atau laktasi, tempat merokok atau smoking area serta toilet yang bersih untuk pengunjung maupun pegawai. Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II juga

telah menyediakan ruang tamu terbuka sebagai bukti keterbukaan dalam menerima tamu.

Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II telah menerapkan sistem satu pintu, jadi semua Pengunjung, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum atau lainnya masuk ke gedung hanya lewat pintu depan saja sehingga mudah terpantau. Terlebih lagi setiap tamu yang masuk diwajibkan melapor ke Meja PTSP dan akan dikenakan tanda tamu berupa kartu pengunjung.

Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II pada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II berupaya melakukan beberapa terobosan dengan Pembuatan Ruangan melengkapi sarana dan prasarana, antara lain :

1. Pembuatan Ruang Sidang Anak



2. Pembuatan Ruang Tunggu Ramah Anak dan Ruang Tahanan Wanita



3. Pembuatan Papan Nama Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan DYK Cabang Nanga bulik



4. Pembuatan Area Parkir Kerdaraan Roda 4 (empat) dan Kendaraan Ruda 2 (dua)





5. Pembuatan Ruang Posbakum



6. Pembuatan Ruang Mediasi, Diversi, Kaukus, Teleconference, Ruang Tunggu Jaksa, Ruang tunggu pekerja Sosial, Ruang tunggu PK Bapas, Ruang tunggu Ramah Anak



7. Ruang PTSP



8. Ruang Pos Satpam



2. Gedung Tempat Sidang Keliling (Zetting Plaats)

Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II mempunyai 1 tempat Sidang (Zetting Plaats) yaitu Tanah berada di Kelurahan Tapin Bini, Kec.Lamandau, Kabupaten Lamandau dengan luas 1.421 m2 dengan SKT (Surat Keterangan Tanah) Nomor : 590/460/XI/2016, Kecamatan Tapin Bini, Kabupaten Lamandau. Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Nanga Bulik tidak memperoleh anggaran sidang keliling (*zetting plaats*) sehingga tidak ada kegiatan sidang keliling pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II.

3. Rumah Dinas

Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II belum memiliki Rumah Dinas namun demikian untuk kenyamanan Pejabat baik Teknis maupun Struktural yang melaksanakan tugasnya di Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dalam hal ini Pemerintah memberikan bantuan berupa Uang Sewa Rumah Dinas untuk tempat tinggal para Hakim sebanyak 3 unit.

4. Kendaraan Dinas

Bahwa untuk kenyamanan Pejabat baik Teknis maupun Struktural yang melaksanakan tugasnya di Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dalam hal ini Pemerintah telah menyediakan Kendaraan Dinas untuk transportasi dan membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas, adapun Kendaraan Dinas tersebut per tanggal 31 Desember 2019:

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I.	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	KIJANG INNOVA BLACK Minibus	2019	√	-	-	Mobil Dinas Ketua
2	SUZUKI ALL NEW ERTIGA GX A/T (ARK415F) VIN Silver Minibus	2019	√	-	-	Mobil Dinas Wakil Ketua
3	TOYOTA RUSH	2014	√	-	-	Mobil Dinas Panitera
II.	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Honda New Vario ESP CBS ISS - 2018	2019	√	-	-	Motor Dinas Sekretaris
2	Honda CRF 150- 2018	2019	√	-	-	Motor Dinas Panitera Muda Pidana

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II untuk mendukung jalannya peradilan baik secara teknis maupun secara administratif sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sarana dan Prasarana disesuaikan dengan standar Akreditasi Penjamin Mutu sehingga bisa meningkatkan kinerja Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan Tupoksinya dan masyarakat yang diberikan pelayanan mendapat kepuasan terhadap

pelayanan yang diberikan di Pengadilan. Berikut ini Sarana dan Prasarana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II :

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
I.	Sarana/Prasarana Gedung		
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	1	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang Umum	1	
7.	Ruang Sidang Anak	1	
8.	Ruang Kepaniteraan	3	
9.	Ruang Kesekretariatan	1	
10.	Ruang Panitera Pengganti	-	
11.	PTSP	1	
12.	Pojok e-Court	1	
13.	Ruang Mediasi/Diversi	1	
14.	Ruang Jaksa	1	
15.	Ruang Posbakum	1	
16.	Ruang Penasihat Hukum	1	
17.	Ruang Tunggu Sidang Anak	1	
18.	Perpustakaan	-	
19.	Ruang Serba Guna	-	
20.	Ruang IT	1	
21.	Ruang Arsip	1	
22.	Ruang Persediaan	-	
23.	Ruang Barang Bukti	-	
24.	Gudang	1	
25.	Ruang Ibu Menyusui/Laktasi	1	
26.	Ruang Tahanan Pria	1	
27.	Ruang Tahanan Wanita	1	
28.	Mushola	1	
29.	Ruang Tamu Terbuka	1	
30.	Tempat Merokok / Smoking	1	
31.	Toilet	3	
32.	Toilet Difabel	-	
33.	Ruang Tunggu Pengunjung	1	
34.	Pos Satpam / Keamanan	1	
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1.	Minibus	1	
2.	Sepeda Motor	2	
3.	Lemari Kayu	2	
4.	Mesin Absensi	1	
5.	Lcd Projector/infocus	1	
6.	Meja Kerja Kayu	15	
7.	Kursi Besi/metal	15	
8.	Ac.Split	6	
9.	Televisi	1	

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
10.	Uninterruptible Power Supply	4	
11.	Lcd Monitor	1	
12.	Pc Unit	10	
13.	Laptop	5	
14.	Printer	7	
15.	Scanner	1	
16.	Server	2	
17.	Router	1	
18.	Hub	1	
19.	Rak Server	1	
20.	Wireless Access Point	1	
21.	Bangunan Gedung Permanen	1	

Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dalam melaksanakan tugas agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan harapan maka perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II tahun 2019 dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana

a. Pengadaan Kendaraan Bermotor (Mobil Dinas & Motor Dinas)

No	Nama	Kuantitas
1	SUZUKI ALL NEW ERTIGA GX A/T (ARK415F) VIN 2018 Silver	1 Unit
2	HONDA New Vario ESP CBS ISS - 2018	1 Unit
3	HONDA CRF 150 - 2018	1Unit

b. Pengadaan Alat Jaringan Pendukung E-Court (BA-BUN)

No	Nama	Kuantitas
1	Router	1 Unit
2	Switch Hub	1 Unit
3	Wireless Router	1 Unit
4	Monitor	1 Unit
5	Kabel UTP & Konektor Rj45	1 Unit
6	Infokus & Layar	1 Unit
7	PC All In One	2 Unit
8	Smart TV	1 Unit
9	Scaner	1 Unit
10	Printer	3 Unit

c. Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pendukung SIPP (BA-BUN)

No	Nama	Kuantitas
1	ASUS NB S430FN-EB525T (Intel Core i5-8265U 2x4GB 1TB 256GB Nvidia 2 GB Win 10)	3 Unit

11. PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

1. Gedung



Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II yang dipakai sekarang adalah gedung pinjam pakai Pemerintah Daerah pada bagian muka dan terletak di Jalan Tingang Menteng No. 39, Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II tersebut luas bangunannya 500 m² yang merupakan Pinjam Pakai Pemerintah Daerah Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II telah menerapkan sistem satu pintu, jadi semua Pengunjung, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum atau lainnya masuk ke gedung hanya lewat pintu depan saja sehingga mudah terpantau. Terlebih lagi setiap tamu yang masuk diwajibkan melapor ke Meja PTSP dan akan dikenakan tanda tamu berupa kartu pengunjung.

2. Rumah Dinas

Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II belum memiliki Rumah Dinas

3. Kendaraan Dinas

Bahwa untuk kenyamanan Pejabat baik Teknis maupun Struktural yang melaksanakan tugasnya di Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II dalam hal ini Pemerintah telah menyediakan Kendaraan Dinas untuk transportasi dan membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas, adapun Kendaraan Dinas tersebut per tanggal 31 Desember 2019 :

	Tahun	Kondisi	
--	-------	---------	--

No	Uraian	Perolehan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Ket
I.	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Toyota ALL NEW RUSH 1.5 G M/T (VIN 2018)	2018	ü	-	-	Mobil Dinas Ketua
2.	Toyota Kijang Innova	2019	ü	-	-	Mobil Dinas Operasional
II.	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Honda New CB150 VERZA CW- 2018	2018	ü	-	-	Motor Dinas Panitera
2.	Honda New Vario 125 CBS ISS - 2018	2018	ü	-	-	Motor Dinas Operasional

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau setiap kendaraan dinas memiliki penanggungjawab masing-masing kendaraan dinas, adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Uraian	Penanggung Jawab	Nomor SK	Ket
I.	Jenis Kendaraan Roda 4			
1.	Toyota ALL NEW RUSH 1.5 G M/T (VIN 2018)	Agung Nugroho, S.H.	W16-U11/428/KP.04.6/5/2019	
2.	Toyota Kijang Innova	M. Rusgiansyah, S.H., M.H.	W16-U11/427/KP.04.6/5/2019	
II.	Jenis Kendaraan Roda 2			
1.	Honda New CB150 VERZA CW- 2018	I Made Landep, S.H.	W16-U11/435/KP.04.6/5/2019	
2.	Honda New Vario 125 CBS ISS - 2018	Deni Nurmansyah, SE.	W16-U11/435/KP.04.6/5/2019	

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II untuk mendukung jalannya peradilan baik secara teknis maupun secara administratif sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sarana dan Prasana disesuaikan dengan

standar Akreditasi Penjamin Mutu sehingga bisa meningkatkan kinerja Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan Tupoksinya dan masyarakat yang diberikan pelayanan mendapat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan di Pengadilan. Berikut ini Sarana dan Prasarana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II :

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
I.	Sarana/Prasarana Gedung		
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	1	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang Umum	1	
7.	Ruang Sidang Anak	1	
8.	Ruang Kepaniteraan	4	
9.	Ruang Kesekretariatan	4	
10.	Ruang Panitera Pengganti	-	
11.	PTSP	1	
12.	Ruang Mediasi/Diversi/Inzage	1	
13.	Ruang Jaksa	1	
14.	Ruang Posbakum	1	
15.	Ruang Penasihat Hukum	1	
16.	Ruang Tunggu Sidang Anak	1	
17.	Perpustakaan	1	
18.	Ruang IT	-	
19.	Ruang Arsip	1	
20.	Ruang Persediaan	-	
21.	Ruang Barang Bukti	-	
22.	Gudang	1	
23.	Ruang Ibu Menyusui/Laktasi	1	
24.	Ruang Tahanan Pria	1	
25.	Ruang Tahanan Wanita	1	
26.	Mushola	1	
27.	Ruang Tamu Terbuka	1	
28.	Tempat Merokok / Smoking Area	-	
29.	Toilet	21	
30.	Toilet Difabel	-	
31.	Ruang Tunggu Pengunjung	1	
32.	Pos Satpam / Keamanan	-	

Adapun sarana dan Prasarana yang ada di PN Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

No	Nama Aset	Satuan	Kuantitas
1	Mini Bus (Penumpang	Unit	2
2	Sepeda Motor	Unit	2
3	Lemari Besi/Metal	Buah	4
4	Lemari Kayu	Buah	2

5	Mesin Absensi	Buah	1
6	Meja Kerja Kayu	Buah	15
7	Kursi Besi/Metal	Buah	26
8	Kursi Kayu	Buah	3
9	Sice	Buah	3
10	Bangku Panjang	Buah	6
11	Meja Rapat	Buah	3
12	A.C. Split	Buah	6
13	Televisi	Buah	1
14	Camera Video	Buah	1
15	Uninterruptible Power	Buah	4
16	Komputer Jaringan	Buah	1
17	P.C Unit	Buah	12
18	Lap Top	Buah	5
19	Monitor	Buah	1
20	Printer (Peralatan	Buah	10
21	Scanner (Peralatan	Buah	2
22	Router	Buah	1
23	Hub	Buah	1
24	Rak Server	Buah	1
25	Kabel UTP	Buah	1
26	Wireless Access Point	Buah	2
27	Peralatan Jaringan Lainnya	Buah	1

12. PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN

A. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang kinerja dari Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Kurun. Manajemen Aset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. Aset yang dikelola meliputi kendaraan dinas, rumah dinas dan sarana / prasarana.

Sarana/Prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Kuala Kurun dapat dilihat pada matrik sebagai berikut:

No	Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
I	Ruang		
1.	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang I	1	
7	Ruang Sidang Anak	1	
8	Ruang Pidana	1	
9	Ruang Perdata	1	
10	Ruang Hukum	1	
11	Ruang Umum dan Keuangan	1	

12	Ruang Kepegawaian dan Ortala	1	
13	Ruang PTIP	1	
14	Ruang Arsip	1	
15	Ruang Tahanan Pria	1	
16	Ruang Tahanan Wanita	1	
17	Ruang Mediasi	1	
18	Ruang Posbakum	1	
19	Ruang Laktasi	1	
20	Ruang Jaksa	1	
21	Pos Penjagaan	1	
19.	WC Umum	1	
II	Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1.	Mobis Dinas	2	1 = Milik sendiri 1 = Pinjam Pakai
2.	Motor Dinas	2	Milik Sendiri
3	Server	2	Milik Sendiri
4	PC	15	10= Milik sendiri 5 = Pinjam Pakai
5	Laptop	5	Milik Sendiri
6	Printer	12	7 = Milik sendiri 5 = Pinjam Pakai
7	Printer Laser	2	Milik Sendiri
8	Kursi	44	7 = Milik sendiri 37 = Pinjam Pakai
9	Lemari kayu	15	2 = Milik sendiri 13 = Pinjam Pakai
10	Meja Kerja	32	7 = Milik sendiri 25 = Pinjam Pakai
11	Kursi Kayu	18	Pinjam pakai
12	AC	31	6 = Milik sendiri 25 = Pinjam Pakai
13	Mesin Absensi	1	Milik sendiri
14	Mesin Fotocopy	1	Pinjam pakai
15	TV untuk jadwal sidang	1	Milik sendiri
16	Anjungan E-Court	1	Milik sendiri
17	Brangkas	2	Hibah
18	Scanner	2	Milik sendiri
19	Meja Pojok E-Court	1	Milik sendiri
20	Meja Inzage	1	Milik sendiri
21	CCTV	1	Hibah
22	Sice	4	Pinjam pakai
23	Monitor	1	Milik sendiri
24	Switvh	1	Milik sendiri
25	Wifi Asus	3	Milik sendiri
26	Mikrotik	1	Milik sendiri

C. PENGELOLAAN TI

Dalam Rangka terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, peradilan umum sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya menempatkan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta organisasi modern berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu. Kebijakan yang diambil salah satunya adalah pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisi, operator maupun user dalam implementasi dari masing-masing aplikasi dilakukan secara rutin.

Perangkat pendukung TI tersedia yakni :

N o	Satuan Kerja	Alamat Website	Alamat Sipp Web	Versi Sipp	Versi Ptsp	Nama Provider Internet Dan Bandwidth	Model/Type Server	Fungsi Server	Kondisi
1	Pengadilan Tinggi Palangka Raya	www.pt-palangkaraya.go.id	https://banding.mahkamahagung.go.id/	-	2.2-2	ICON+ 15Mbps 1:1	IBM 3250 MS Integrated Lenovo Fujitsu PRIMERGY TX 1330 M4	PTSP, Aplikasi Perpustakaan, Aplikasi HatiWasbid & Hatiwasda, Aplikasi Masdeko, Aplikasi Simasdok, Aplikasi E-pidin, Aplikasi e- Baper, Aplikasi e-LLK, Aplikasi e-regedit	Baik
2	Pengadilan Negeri Palangka Raya	www.pn-palangkaraya.go.id	www.sipp.pn-palangkaraya.go.id	3.3.0-1	2.2-2	ICON+ 30 Mbps 1:1	Fujitsu PRIMERGY RX 1330 M1 Fujitsu PRIMERGY TX 1330 M4	SIPP,PTSP, MIS,Sinkronisasi dan aplikasi lain-lain Backup Data SIPP dan MIS, Aplikasi Lain	Baik
3	Pengadilan Negeri Sampit	www.pn-sampit.go.id	www.sipp.pn-sampit.go.id	3.3.0-1	2.2-2	ICON+ 25 Mbps 1:1 Speedy up to 30 Mbps	Fujitsu RX 1330 M1 Fujitsu PRIMERGYTX 1330 M4	SIPP,PTSP, MIS,Sinkronisasi dan Back up data	Baik
4	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	www.pn-pangkalanbun.go.id	www.sipp.pn-pangkalanbun.go.id	3.3.0-1	2.2-2	ASTINet 50 Mbps 1:4	Fujitsu RX 1330 M1 Rainer Server SV110C4 Fujitsu TX 1330 M4	SIPP, PTSP, MIS Maintenance, Sinkronisasi, Otomatis Backup Backup Data SIPP dan MIS, Aplikasi Lain	Baik Baik Baik

5	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	www.pn-kualakapuas.go.id	www.sipp.pn-kualakapuas.go.id	3.3.0-1	2.2-2	ICON+ 20M bps 1:1	Fujitsu RX 1330 M1,dan TX 1330 M4	SIPP, PTSP, MIS	Baik
							Fujitsu TX 1330 M4	Backup Data	Baik
6	Pengadilan Negeri Muara Teweh	www.pn-muarateweh.go.id	sipp.pn-muarateweh.go.id	3.3.0-1	2.2-2	ASTINet Lite 50 Mbps 1:4	Fujitsu RX 1330 M1	SIPP, PTSP, MIS, E-Library, Backup Aplikasi dan Data	Baik
							Fujitsu TX 1330 M4	Back up Aplikasi dan Data	Baik
7	Pengadilan Negeri Kasongan	www.pn-kasongan.go.id	www.sipp.pn-kasongan.go.id	3.3.0-1	2.2-2	ICON+ 20M bps 1:1	Fujitsu RX 100 S7p	SIPP, PTSP, MIS	Baik
							Fujitsu TX 1330 M4		Baik
8	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	www.pn-tamianglayan.go.id	www.sipp.pn-tamianglayan.go.id	3.3.0.-1	2.2-2	ICON+ 17Mbps 1:1	Fujitsu RX 1330 M1	SIPP,PTSP, MIS,Sinkronisasi	Baik
							Fujitsu TX 1330 M4	Backup Data	Baik
9	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	www.pn-pulangpisau.go.id	www.sipp.pn-pulangpisau.go.id	3.3.0.-1	2.2-2	ICON+ 20Mbps 1:1	Fujitsu RX 1330 M2	SIPP,PTSP, MIS,Sinkronisasi	Baik
							Fujitsu TX 1330 M4	Backup Data	Baik
10	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	www.pn-nangabulik.go.id	www.sipp.pn-nangabulik.go.id	3.3.0-1	2.2-2	ASTINet 50 Mbps	Fujitsu RX 1330 M1	SIPP,PTSP, MIS,Sinkronisasi	Baik
							Fujitsu TX 1330 M4	Backup Data	Baik
11	Pengadilan Negeri Buntok	www.pn-buntok.go.id	www.sipp.pn-buntok.go.id	3.3.0-1	2.2-2	ASTINet 50 Mbps	Fujitsu RX 1330 M1	SIPP,PTSP, MIS,Sinkronisasi	Baik
							Fujitsu TX 1330 M4	Backup Data	Baik
12	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	www.pn-kualakurun.go.id	www.sipp.pn-kualakurun.go.id	3.3.0-1	2.2-2	ASTINet 50 Mbps 1:4 + 60 Mbps Indihome Up To	Fujitsu RX 1330 M1	SIPP,PTSP, MIS,Sinkronisasi	Baik
							Fujitsu TX 1330 M4	Backup Data	Baik

Salah satu pemanfaat Teknologi informasi adalah diwajibkannya setiap Pengadilan untuk mempunyai *website* termasuk Pengadilan Tinggi Palangka Raya sendiri.

Dalam era digitalisasi sekarang ini website mempunyai peran sangat penting, karena dengan adanya website akan tercipta transparansi segala kegiatan yang ada di badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, khususnya Peradilan Umum. Melalui website keterbukaan informasi publik maupun keterbukaan pelayanan publik akan mudah diakses oleh masyarakat pengguna pengadilan.

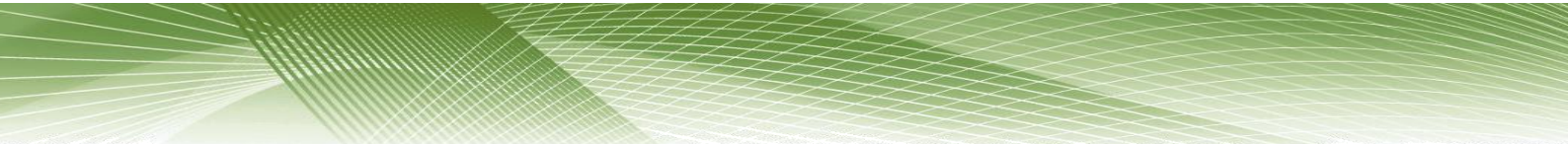
Website PT Palangka Raya adalah sebagai berikut:



Salah satu website Pengadilan Negeri di wilayah Kalimantan Tengah adalah:



Minimnya tenaga yang mempunyai keahlian di bidang IT, harus menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan pemanfaatan Teknologi Informasi, karena untuk masa



yang akan datang, Teknologi Informasi adalah sarana utama dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing aparat Pengadilan;

Untuk pengembangan pemanfaatan TI, Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan terus mendorong para pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi maupun pegawai di seluruh Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan tentang Teknologi Informasi.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK





BAB V

PENINGKATAN

PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

PELAKSANAAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan Nomor : 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015 untuk melakukan Penilaian dan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai standard sertifikasi ISO 9001:2008, diperkaya dengan penerapan International Framework For Court Excelent.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang wilayahnya hukumnya meliputi Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 11 (Sebelas) satker dibawahnya yaitu :

1. PN Palangkaraya Kelas I A
2. PN Sampit Kelas I B
3. PN Pangkalan Bun Kelas I B
4. PN Kuala Kapuas Kelas II
5. PN Muara Teweh Kelas II
6. PN Buntok Kelas II
7. PN Tamiang Layang Kelas II
8. PN Kasongan Kelas II
9. PN Kuala Kurun Kelas II
10. PN Nanga Bulik Kelas II
11. PN Pulang Pisau Kelas II

Dari 11 (Sebelas) satker tersebut semuanya telah terakreditasi dan dari 11 (sebelas) satker tersebut pada tahun 2019 ada yang telah Surveillance yaitu 8 (delapan) satker, dimana 1 (satu) satker di Surveillance oleh Dirjen Badilum yaitu PN Palangka Raya oleh karena kelas I A, sedangkan yang 7 (tujuh) satker di Surveillance oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yaitu 2(dua) PN Kelas I B dan 5 (lima) PN Kelas II sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Pengadilan Negeri Buntok, Tangga 11-13 Maret 2019
2. Pengadilan Negeri Sampit, Tanggal 12 Maret 2019
3. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Tanggal 13-14 Maret 2019
4. Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Tanggal 16 Maret 2019
5. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Tanggal 5 Maret 2019

6. Pengadilan Negeri Muara Teweh, Tanggal 10 Juni 2019
7. Pengadilan Negeri Kasongan, Tanggal 01 Maret 2019.

Sedangkan 3 (tiga) Pengadilan Negeri merupakan PN baru yaitu :

1. Pengadilan Negeri Kuala Kurun
2. Pengadilan Negeri Nanga Bulik
3. Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Dilakukan Akreditasi / Sertifikasi masing-masing :

1. Pengadilan Negeri Kuala Kurun tanggal 23 Juli 2019
2. Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 16 Juli 2019
3. Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 16 Juli 2019

Kemudian hasil dari Akreditasi atas ketiga Pengadilan Negeri baru tersebut dibawa ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum untuk dilakukan KEKA. Hasil dari KEKA atas Pengadilan Negeri baru tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Kuala Kurun mendapatkan nilai A
2. Pengadilan Negeri Nanga Bulik mendapatkan nilai B
3. Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendapatkan nilai B

Kemudian ada perintah dari Direktur PAPU, agar Pengadilan Negeri Kelas II yang telah di Surveillance, dilakukan KEKA oleh Dirjen Badilum melalui Teleconference. Hasil dari Teleconference terhadap Pengadilan Negeri :

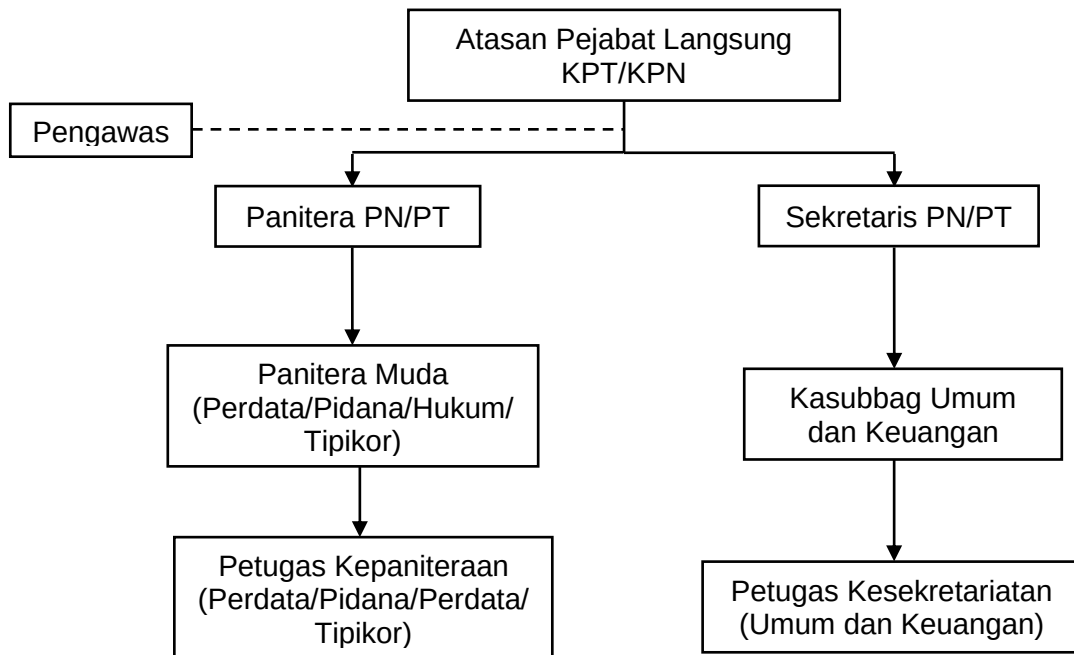
1. Pengadilan Negeri Tamiang Layang tetap mendapatkan nilai B
2. Pengadilan Negeri Kasongan mengalami penurunan nilai dari nilai A menjadi nilai B
3. Untuk Pengadilan Negeri yang lain mendapatkan nilai A.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah diadakan Audit Internal oleh Dirjen Badilum pada Tanggal 03 September 2019

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan Surat Keputusan Direktur Jendrak Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri se Wilayah Kalimantan Tengah telah melaksanakan sistim satu pintu yang dikenal dengan istilah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau One Gate System.

Berdasarkan SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, struktur PTSP adalah sebagai berikut:



1. Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Ketua Pengadilan Tinggi untuk PTSP pada Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri untuk PTSP pada Pengadilan Negeri.
2. Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Penanggungjawab pelaksanaan pada setiap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah masing-masing Panitera Muda dan seluruh Kepala Bagian/Sub Bagian pada Kesekretariatan.
4. Petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pegawai atau staf Kepaniteraan Muda Perdata/Pidana yang bertugas pada meja 1, staf Kepaniteraan Muda Hukum dan staf pada Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Keterpaduan;
- b. Efektif, Efisien, Ekonomis;
- c. Koordinasi;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Aksesibilitas.

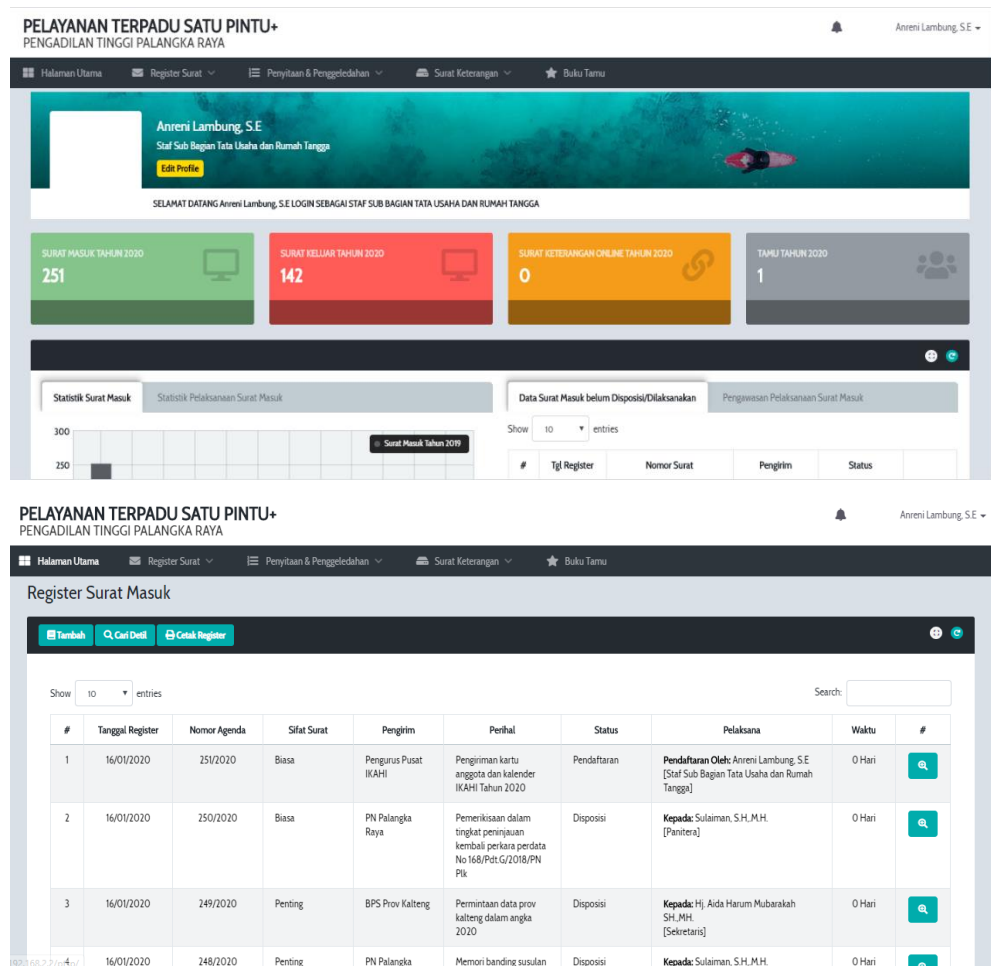
I. PTSP Pengadilan Negeri.

Dalam system PTSP ini masyarakat pengguna pengadilan, cukup dilayani melalui satu pintu, sehingga ASN di lingkungan Peradilan terhindar dari komunikasi dengan para pihak yang berperkara, dan hal ini mencegah terjadinya KKN maupun perbuatan tercela lainnya yang bisa dilakukan oleh ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

Hampir semua pelayanan yang disediakan di dalam PTSP ini dilakukan secara elektronik. Pelayanan dalam PTSP di semua Pengadilan Negeri, dibagi menjadi dua bagian/bidang yaitu:

1. Bidang Kesekretariatan, meliputi:

Tata persuratan, dimana tata kelola surat masuk dan surat keluar sudah menggunakan aplikasi, telah didokumentasikan /diinput secara elektronik, sehingga memudahkan dan mempercepat dalam pendistribuan persuratan.



Halaman Utama Register Surat Penyataan & Penggeledahan Surat Keterangan Buku Tamsu

Register Surat Keluar

Tambah Cari Detail Cetak Register

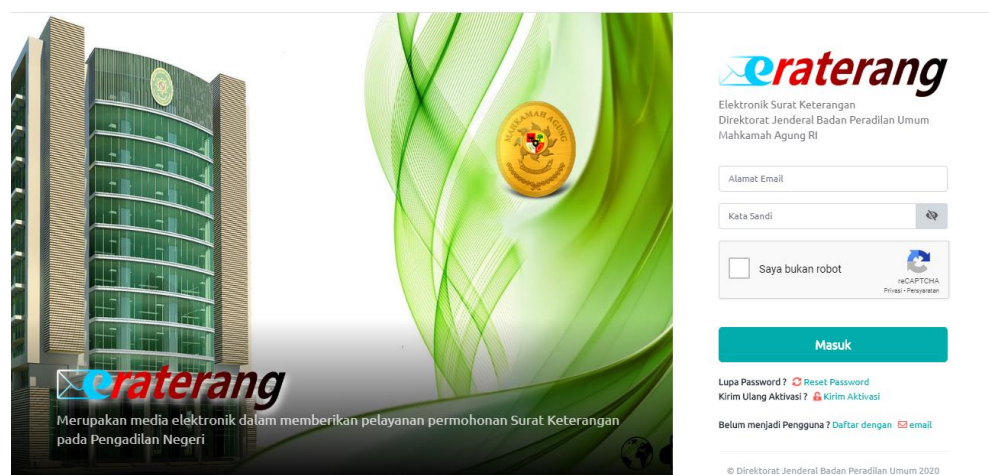
Show 10 entries Search:

#	Tanggal Register	Nomor Surat	Dari Bagian	Tujuan Kirim	Status	Waktu	#
1	16/01/2020	W16-U157/HK.01/01/2020	Kepaniteraan Muda Pidana	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	Pendaftaran	0 Hari	
2	16/01/2020	W16-U156/HK.01/01/2020	Kepaniteraan Muda Pidana	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	Pendaftaran	0 Hari	
3	16/01/2020	W16-U155/HM.01/01/2020	Sub Bagian Kepegawaian, dan Teknologi Informasi	Dekan fakultas hukum universitas palangka raya	Pendaftaran	0 Hari	
4	16/01/2020	W16-U154/HK.01/01/2020	Kepaniteraan Muda Pidana	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	Pendaftaran	0 Hari	
5	16/01/2020	W16-U153/HK.01/01/2020	Kepaniteraan Muda Pidana	KPN Palangka Raya	Pendaftaran	0 Hari	

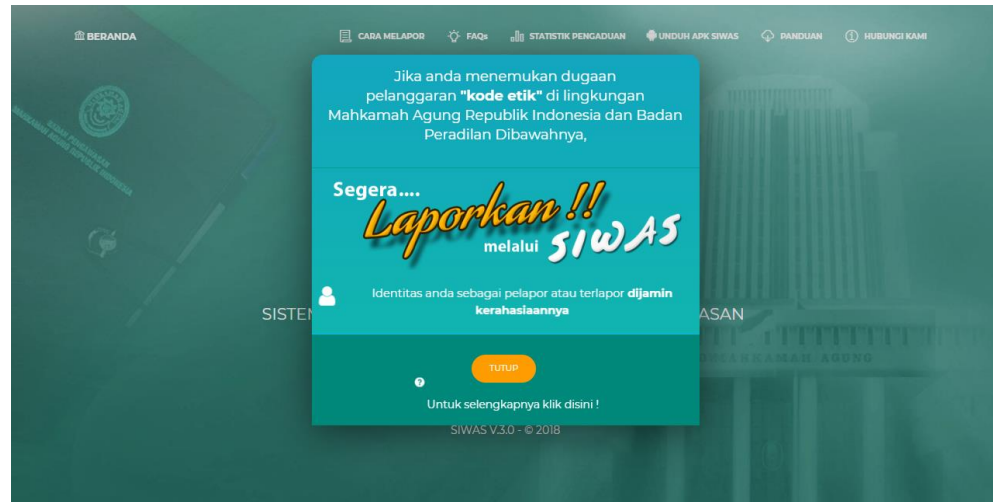
2. Bidang Kepaniteraan, terdiri dari:

a. Kepaniteraan Hukum, melayani:

- Permohonan surat keterangan belum pernah dipidana, layanan ini telah menggunakan aplikasi yang disebut dengan Eraterang yaitu aplikasi permohonan surat belum pernah dihukum, yang dilayani secara online, pemohon tidak perlu datang ke kantor Pengadilan Negeri yang dituju, akan tetapi cukup akses langsung ke situs eraterang melalui eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id, kemudian daftar menggunakan akun gmail, dilanjutkan dengan memilih Surat Keterangan yang diinginkan dan Pengadilan Negeri yang dituju, dan terakhir mengisi semua data formulir yang dibutuhkan. Kemudian, Pengadilan yang dituju akan memproses pengajuan Surat Keterangan tersebut, dan akan memberitahukan kepada pemohon apakah permohonannya diterima atau ditolak. Setelah permohonan diterima, pemohon dapat mengambil Surat Keterangan Asli di Pengadilan yang di tuju dengan membawa fotokopi dokumen-dokumen pendukung. Aplikasi ini diluncurkan mulai bulan Agustus 2019:



- Pengaduan masyarakat, layanan ini juga sudah disediakan secara elektronik (SIWAS) maupun secara manual;



- Permintaan salinan putusan yang telah BHT.
- b. Kepaniteraan Pidana, melayani:
 - Persetujuan/ijin Penggeledahan dan Penyitaan
 - Permohonan perpanjangan penahanan dari Penyidik/Penuntut Umum.
 - Permohonan upaya hukum, banding, kasasi dan PK
 - Pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kepaniteraan pidana;
- c. Kepaniteraan Perdata, melayani:
 - Menerima berkas perkara gugatan dan permohonan, layanan ini telah disediakan secara elektronik yang dikenal dengan istilah E-Court atau peradilan elektronik, sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;.

E-court yang telah diberlakukan di seluruh Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah meliputi kegiatan :

- 1) Pendaftaran (E-filing)
- 2) Pembayaran (E-payment)
- 3) Pemanggilan (E-Summons)

Untuk persidangan secara Elektronik (E-litigatie), belum semua pengadilan Negeri di Kalimantan Tengah melaksanakan e-litigatie, baru Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang mulai bulan Agustus 2019 ditunjuk sebagai Pengadilan Percontohan (Pilot Project) dalam melaksanakan E-litigatie, sedangkan untuk pengadilan yang lain, akan diberlakukan E-litigatie secara serentak pada awal tahun 2020;

E-court melayani perkara,

- 1) Gugatan
- 2) Permohonan dan

3) Bantahan (derden Verzet)

- Menerima permohonan upaya hukum, banding, kasasi dan PK;
- Pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kepaniteraan Perdata'

d. Pojok E-Court (E-court Corner)

Pojok E-court melayani masyarakat yang ingin memperoleh penjelasan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan E-court, termasuk membantu masyarakat umum yang akan mengajukan gugatan / permohonan / bantahan, akan tetapi tidak bisa menggunakan IT (Gaptek);

e. Meja Inzage

Meja Inzage wajib disediakan di setiap Pengadilan Negeri, yang berfungsi sebagai tempat para pihak untuk mempelajari berkas perkara baik dalam proses persidangan maupun dalam proses mengajukan upaya hukum Banding;

Untuk semua PTSP di semua Pengadilan se Kalimantan Tengah menyediakan layanan yang sama sebagaimana terurai di atas , hanya Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyediakan layanan yang berbeda karena Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang mengadili perkara PHI dan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu meja PTSP, untuk bagian Keperdataan, ditambah satu layanan yaitu perkara PHI dan untuk bagian Kepaniteraan ditambah satu layanan yaitu untuk perkara Tipikor;

II. PTSP Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Meskipun tidak melayani masyarakat secara langsung, Pengadilan Tinggi Palangka Raya juga menyediakan meja PTSP, dengan layanan yang hampir sama dengan PTSP di Pengadilan Negeri, hanya saja pelayanan PTSP Pengadilan Tinggi lebih kepada pelayanan terhadap Pengadilan-pengadilan yang ada di wilayah hukum Kalimantan Tengah;

Layanan PTSP Pengadilan Tinggi Palangka Raya meliputi :

1. Bagian Kesekretariatan

Layanan ini juga tentang tata kelola persuratan, yang telah dilakukan secara elektronik yang menggunakan aplikasi;

2. Bagian Kepaniteraan

a. Kepaniteraan Hukum:

▪ Pengaduan.

Untuk Pengaduan, meski telah tersedia aplikasi pengaduan secara online, meja PTSP juga melayani pengaduan secara langsung;

▪ E - buku tamu,

setiap tamu yang datang ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya harus diregister secara manual dan elektronik, dengan persetujuan pimpinan Pengadilan;

- Pendaftaran Penyumpahan Advokat

Bagi organisasi yang akan mendaftarkan anggotanya untuk disumpah sebagai Advokat, selain telah disediakan aplikasi pendaftarannya, juga dilayani langsung di meja PTSP;

Dalam rangka menindak lanjuti SK Dirjen Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018, PT Palangka Raya akan menambah layanan PTSP dengan meja e-court dan meja untuk inzage;

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Mengapresiasi dan mendorong kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik seperti yang telah diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana pada pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, yang juga menjadi acuan dalam kompetisi ini SK Ketua MA Nomor 026/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan SK Ketua MA Nomor 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

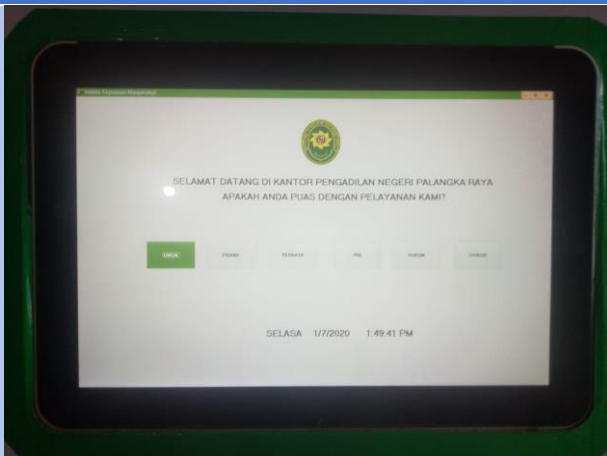
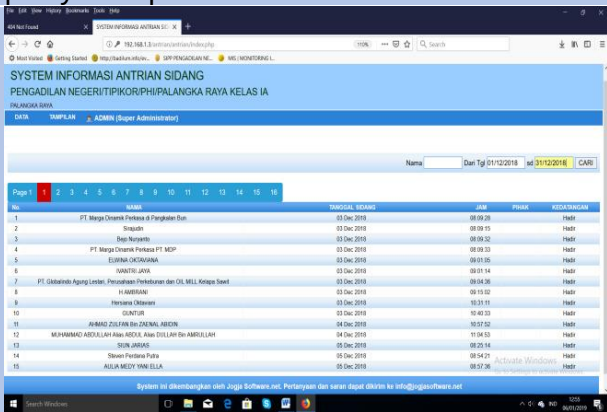
Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengertian Inovasi adalah suatu proses dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan suatu produk/sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Ada juga yang mengatakan arti inovasi adalah suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih bagi manusia. Proses Inovasi sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan karena kedua hal tersebut dapat memudahkan dalam memproduksi sesuatu yang baru dan berbeda.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan percepatan perkara para pencari keadilan di Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan seluruh Pengadilan Negeri dibawahnya serta peningkatan kinerja maka perlu adanya inovasi pelayanan publik.

Berikut Inovasi Pelayanan Publik yang sudah terlaksana di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan seluruh Pengadilan Negeri dibawahnya :

A. Pengadilan Negeri se- Kalimantan Tengah

No	Pengadilan Negeri	Jenis Inovasi	Penjelasan
1	Pengadilan Negeri Palangka Raya	1. Aplikasi Survey Harian	 Aplikasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peradilan.
		2. Aplikasi Antrian Sidang	 Aplikasi yang digunakan untuk memudahkan mendata dan memanggil para pihak yang hadir dan siap untuk disidangkan sesuai dengan antrian sidang.
		3. Mesin Antrian PTSP	 Mesin antrian PTSP Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah alat yang digunakan agar pelayanan di PTSP berjalan secara efektif dan efisien dengan cara melayani secara

			berurutan sesuai kedatangan pengunjung PTSP.
2	Pengadilan Negeri Sampit	1. Zona Edukasi	 Zona Edukasi adalah wadah kunjungan masyarakat hingga kalangan pelajar dan mahasiswa. Tujuannya agar pengunjung bisa mengenal lebih dalam tentang Pengadilan terutama tentang tugas-tugas serta bagaimana proses persidangan berlangsung.
		2. Aplikasi e-Survey	 e-Survey adalah aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat pengguna Pengadilan yang berbasis elektronik. Masyarakat pengguna Pengadilan dapat mengisi sesuai kepuasan mereka berdasarkan layanan yang diperolehnya. Hasil dari survey tersebut yang nantinya akan menjadi data untuk dijadikan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan juga Indeks Presepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Sampit

3. BAWI SAMPIT



BAWI SAMPIT merupakan asisten virtual Pelayanan Informasi pada Pengadilan Negeri Sampit yang berarti “Bersahaja, Amanah, Wibawa, Inovatif, Akuntabel, Melayani, Profesional, Inspiratif dan Transparan”. Aplikasi ini membuka percakapan antara pengunjung dengan petugas hingga sehingga memungkinkan untuk pengunjung bertanya lebih jelas kepada petugas.

3. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

1. Aplikasi Pemanggilan Persidangan

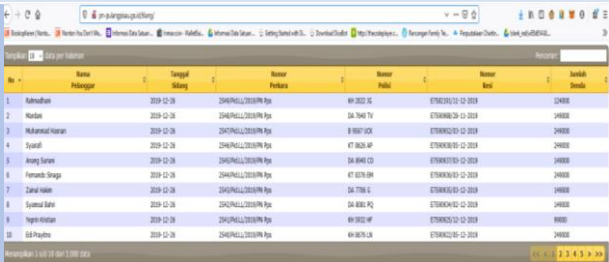


Aplikasi ini berfungsi untuk mengubah tulisan menjadi suara sehingga bisa membuat pengumuman panggilan sidang yang akan diperkeras melalui speaker di ruang tempat pengunjung.

2. Pengumuman Denda Tilang Online

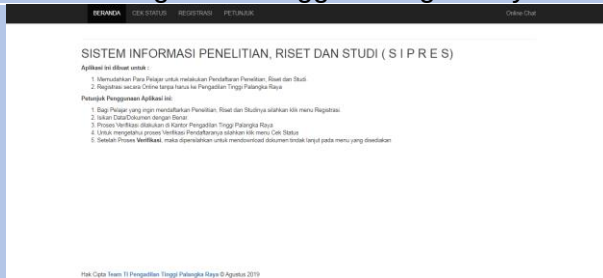


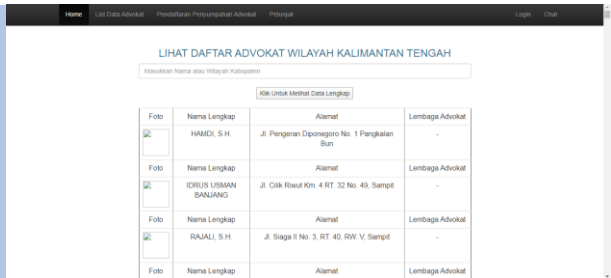
Aplikasi yang membantu untuk melakukan pencarian denda tilang secara online pada website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sehingga bisa diakses dimana saja. Pengumuman Denda tilang Online beralamatkan di tilang.pn-pangkalanbun.go.id

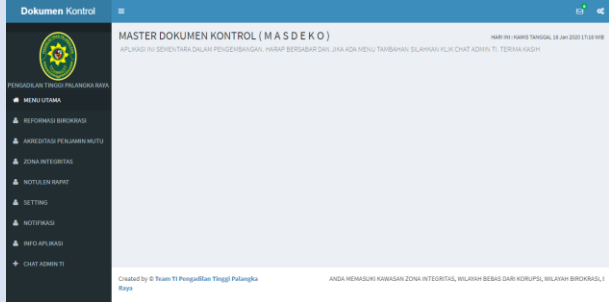
4.	Pengadilan Negeri Buntok	1. EVA (Executive Virtual Assistance)	 EVA merupakan agen perangkat lunak yang dapat melakukan tugas atau layanan individu berdasarkan perintah atau permintaan masyarakat pencari keadilan yang ingin mendapatkan Informasi tentang Pelayanan di Pengadilan Negeri Buntok
5.	Pengadilan Negeri Kasongan	1. Buku Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas	 Buku Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Kasongan yang dicetak dalam huruf Braille bagi penyandang disabilitas Tuna Netra
6.	Pengadilan Negeri Muara Teweh	1. e-IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	 Index Kepuasan Masyarakat Elektronik (E-IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik
7.	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	1. Pengumuman Denda Tilang Online	 Aplikasi yang membantu untuk melakukan

			pencarian denda tilang secara online pada website Pengadilan Negeri Pulang Pisau sehingga bisa diakses dimana saja. Pengumuman Denda Tilang Online beralamatkan di http://pn-pulangpisau.go.id/tilang/ .
8.	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	-	-
9.	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	-	-
10.	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	-	-
11.	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	-	-

B. Pengadilan Tinggi Palangka Raya

No	Kategori	Jenis Inovasi	Penjelasan
1.	Eksternal	Sistem Informasi Promosi, Pangkat, Pensiun dan Mutasi (SIP3M)	 Aplikasi ini dibuat agar para pegawai pada satuan kerja diruang lingkup Pengadilan Tinggi Palangka Raya dapat memonitor dan melihat perkembangan usulan yang diajukan melalui Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
		Sistem Informasi Penelitian, Riset dan Studi (SIPRES)	 Aplikasi SIPRES ini dibuat dan diperuntukkan oleh para pelajar yang ingin melakukan Penelitian, Riset dan Studi/Praktik Lapangan baik di Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya, maupun di Pengadilan Tinggi Palangka Raya sendiri. Untuk mendapatkan surat ijin Penelitian, Riset dan Studi tidak perlu lagi ke kantor Pengadilan Tinggi Palangka Raya, cukup dengan melakukan proses registrasi pada Aplikasi ini dan data akan diproses selama 30 menit. Setelah itu para pelajar dapat mendownload surat ijin Penelitian, Riset dan Studi yang sudah diverifikasi menggunakan barcode.

		Sistem Informasi Data Advokat (SIDAT)	 Aplikasi ini dibuat untuk : 1. Memudahkan masyarakat dalam mencari data-data advokat wilayah Kalimantan Tengah 2. Memudahkan Organisasi Advokat dalam melakukan pendaftaran penyempahan advokat di Pengadilan Tinggi Palangka Raya
		Master Survey Pelayanan Publik (MASPEPI)	 Aplikasi ini di buat agar masyarakat dapat turun andil dalam penilaian terhadap segala bentuk pelayanan yang terdapat pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Aplikasi ini terdiri dari beberapa bagian yaitu, Survey Harian, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Presepsi Korupsi (IPK), Pengaduan, Gratifikasi, Kritik dan Saran, Whistle Blowing System serta mereviu Laporan secara online.
2	Internal	Aplikasi Perpustakaan	 Aplikasi ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai buku apa saja yang terdapat pada perpustakaan Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
		Management Kontrol Dokumen HATIWASBID dan HATIWASDA (MAKBIDA) Versi. 1.0	

		Aplikasi ini berfungsi sebagai wadah dokumen-dokumen elektronik seperti Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Laporan Tindak Lanjut yang berkaitan dengan Pengawasan Bidang-Bidang di Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengawasan Daerah pada seluruh Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah.
	Master Dokumen Kontrol (MASDEKO)	
	Sistem Informasi Master Dokumen (SIMASDOK)	Aplikasi ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan elektronik dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan Akreditasi Penjaminan Mutu, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas dan lain-lain.  Aplikasi ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan elektronik dokumen-dokumen pendukung segala kegiatan seperti Surat Keputusan, Laporan Realisasi Anggaran, Notulen Rapat, dan lain-lain.

BAB VI

PENGAWASAN





BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

I. PENGAWASAN MELEKAT

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016, tanggal 25 Juli 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya, berkaitan dengan PERMA tersebut Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah melaksanakan pengawasan melekat yang berupa serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang dilaksanakan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara terus menerus agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan efektif dan efisien sesuai rencana dan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku;

Dalam pelaksanaan pengawasan melekat ini, dilingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya meliputi pengawasan pembinaan bidang-bidang pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pengawasan daerah pada Pengadilan Negeri Se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan menindak lanjuti pengaduan;

1. Pengawasan Bidang pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Pengawasan bidang dilakukan oleh para Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya yaitu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor. 135/KPT/PS/SK/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang susunan Hakim pengawas sebagai berikut :

NO	BIDANGPENGAWASAN/ PEMBINAAN	HAKIM TINGGI
1.	BIDANG PERDATA DAN EKSEKUSI	- BAMBANG WIDIYATMOKO,S.H.,M.H. H. MIRDIN ALAMSYAH, SH.,MH.
2.	BIDANG PIDANA	- PUDJI TRI RAHADI, SH. - PORMAN SITUMORANG, S.H.,M.H.
3.	BIDANG HUKUM	- WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H.,M.H. - DWI PRAPTI MARYUDIATI, SH.
4.	BIDANG TIPIKOR	- UMBU JAMA, S.H. - GATUT SULISTYO, S.H.,M.H. - DR. ANDREAS ENO TIRTAKUSUMA, SH.,MH.

5.	BIDANG SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TI	SURYA YULIEHARTANTI, S.H.,M.H.
6.	BIDANG SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH.
7.	BIDANG SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN	• SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H. • ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.
8.	BIDANG SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	• SUCIPTO, S.H., M.H. • H. MIRDIN ALAMSYAH, SH., M.H. • DWI PRAPTI MARYUDIATI, SH. • HERU PRAKOSA, SH., MH.
9.	PEMBINAAN MENTAL/SPRITUAL	• UMBUJAMA, S.H. • BAMBANG WIDIYATMOKO, S.H., M.H.
10.	KESEHATAN DAN OLAHRAGA	GATUT SULISTYO, S.H., M.H.
11.	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN WEBSITE	• HARINI, SH., MH. • F.X. SUPRIYADI, S.H., M.HUM
12.	HAKIM PENGAWAS SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI	• BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H. • F.X. SUPRIYADI, S.H., M.HUM • INDRIA MIRYANI, SH.

Dalam melaksanakan tugasnya Hakim pengawas bidang meliputi :

1. Bidang Teknis, yaitu :

- Memantau pelaksanaan penyelesaian perkara banding di Pengadilan Tinggi Palangka Raya;
- Memantau dan memeriksa prosedur penerimaan perkara banding, administrasi register perkara banding;
- Memantau dan memeriksa laporan perkara banding dan kearsipan perkara banding;
- Memberikan petunjuk dan bimbingan sesuai pola pembinaan dan administrasi perkara;
- Menginventarisir temuan baik teknis maupun administrasi peradilan dan menyampaikan laporannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan disertai saran dan solusinya;

2. Bidang Administrasi, yaitu :

- Memantau pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- Memantau kedisiplinan dan kinerja setiap pegawai Pengadilan Tinggi Palangka Raya baik Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Pejabat Kesekretariatan beserta stafnya;

II. PENGAWASAN DAERAH

Didalam melaksanakan pengawasan daerah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah melaksanakan 2 (dua) kali pengawasan, dimana yang pertama telah dibarengkan dengan pelaksanaan Surveillance/Akreditasi penjaminan mutu terhadap Pengadilan Negeri yang telah mendapat sertifikat A Exelent, untuk itu Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah membentuk tim surveillance/Akreditasi penjaminan mutu/pembinaan dan pengawasan Pengadilan Negeri Se Kalimantan Tengah dengan Surat Keputusan Nomor. 136/KPT/PS/SK/VII/2019 tanggal 1 Jli 2019 dengan susunan sebagai berikut :

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA		KOORDINATOR
NO	HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH	DAERAH PENGAWASAN
1	• UMBU JAMA, S.H. • BAMBANG KUSTOPO, S.H.,M.H. • HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH. • HARINI, SH.,MH. • GATUT SULISTYO, S.H.,M.H. • DR. ANDREAS ENO TIRTAKUSUMA, SH.,MH.	PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA
2	• SURYA YULIEHARTANTI, S.H.,M.H. • HARINI, SH.,MH.	PENGADILAN NEGERI SAMPIT
3	• BAMBANG WIDIYATMOKO,S.H.,M.H. • SETYANINGSIH WIJAYA,S.H.,M.H. • WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H.,M.H.	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
4	• H. MIRDIN ALAMSYAH, SH.,M.H. • DWI PRAPTI MARYUDIATI, SH.	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS
5	• SUCIPTO, S.H., M.H. • F.X. SUPRIYADI, S.H., M.HUM	PENGADILAN NEGERI BUNTOK
6	• SUCIPTO, S.H., M.H. • ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.,M.H.	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH
7	• PUDJI TRI RAHADI, SH. • HERU PRAKOSA, SH.,MH.	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG
8	• SETYANINGSIH WIJAYA,S.H.,M.H. • INDRIA MIRYANI, SH.	PENGADILAN NEGERI KASONGAN
9	• HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH. • PORMANSITUMORANG, S.H.,M.H..	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN
10	• BAMBANG KUSTOPO, S.H.,M.H. • HERU PRAKOSA, SH.,MH.	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
11	• BAMBANG WIDIYATMOKO,S.H.,M.H. • WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H.,M.H.	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK

Bahwa diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya semula ada 8 (delapan) Pengadilan Negeri dan mulai bulan Oktober 2018 ada penambahan 3 (tiga) Pengadilan Negeri baru yaitu Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan Negeri Nanga Bulik,

Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Tim yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan tersebut diatas telah mengadakan pengawasan ke Pengadilan Negeri. Adapun obyek pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas meliputi :

- Administrasi Perkara.
- Administrasi Persidangan.
- Administrasi Umum.
- Manajemen Peradilan.
- Pelayanan Publik.

Dari hasil pengawasan baik itu temuan, saran dan tindak lanjut harus dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam waktu 1 (satu) bulan untuk dievaluasi guna penyempurnaan pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri yang bersangkutan pada masa yang akan datang;

III. PENGADUAN

Pada Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam menangani pengaduan telah berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung RI Nomor .09 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle blowing System) di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya.



Pengadilan Tinggi Palangka Raya selama tahun 2019 telah memproses 1 (satu) pengaduan yang masuk kebagian Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan telah merespon keluhan-keluhan baik yang berasal dari pencari keadilan, masyarakat pada umumnya maupun tindak lanjut atas laporan instansi lain.

Kecenderungn pada tahun ini materi pengaduan dalam perkara perdata adalah lambatnya pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri, namun hal tersebut oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya selalu dimintakan klarifikasi ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan mengenai kendala yang menjadi hambatannya;

B. EVALUASI

Dalam rangka evaluasi hasil pengawasan baik internal (pengawas bidang) maupun eksternal (pengawas daerah), Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menyediakan aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud. Aplikasi tersebut diberi nama Management Kontrol HATIWASBID dan HATIWASDA (MAKBIDA).



Pada Tahun 2019 setelah dilakukan pengawasan internal baik terhadap Pengadilan Tinggi Palangka Raya maupun Pengadilan Negeri Se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah melaksanakan tugas sesuai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku walau masih perlu adanya peningkatan di bidang teknis dan administrasi.
2. Baik di Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan semua Pengadilan Negeri se Kalimantan Tengah sangat kurang jumlah pegawainya sehingga terdapat jabatan yang masih dirangkap, apalagi di Pengadilan Negeri yang masih baru (Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Pulang Pisau).
3. Keseluruhan Pengadilan Negeri se Kalimantan Tengah telah menerapkan SIPP dan PTSP dengan baik walaupun kadang ada kendala internet yang kurang lancar, hal ini setiap bulan dilakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaannya.
4. Dalam rangka pembinaan baik di Pengadilan Tinggi Palangka Raya maupun di setiap Pengadilan Negeri se Kalimantan Tengah selalu diadakan rapat bulanan untuk mengevaluasi pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan rencana kerja yang akan dilakukan serta pimpinan selalu mengingatkan dan mensosialisasikan PERMA Nomor 7 Tahun 2016, PERMA Nomor.8 Tahun 2016 dan PERMA Nomor. 9 Tahun 2016 serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor. 01/Maklumat/KMA/IX/2017.

BAB VII

PENUTUP





BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada umumnya, seluruh program dan kegiatan selama tahun 2019 di Pengadilan Tinggi Palangka Raya maupun Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya telah dilaksanakan dengan baik, diikuti dengan persentase penyerapan anggaran (DIPA 01 dan DIPA 03) yang lebih baik dari tahun sebelumnya

Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya senantiasa mengupayakan terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel serta peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan penyelesaian perkara. Hal ini diupayakan dengan meningkatkan penyelesaian perkara dari sisi percepatan waktu penyelesaian dan kualitas putusan serta meningkatkan pelayanan publik dengan menghadirkan berbagai inovasi berupa aplikasi pelayanan publik sehingga mampu meningkatkan kepuasan bagi para pencari keadilan, juga secara aktif melakukan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

Sumberdaya manusia (SDM), para aparatur peradilan, merupakan sumberdaya yang sangat berharga dalam rangka mencapai visi dan misi lembaga peradilan. SDM baik di Pengadilan Tinggi Palangka Raya maupun di Pengadilan Negeri se Kalimantan Tengah walaupun mengalami kekurangan namun telah dikelola secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien berdasarkan parameter yang objektif. Produktifitas kinerjanya senantiasa dijaga dan ditingkatkan. Penambahan Hakim dan Pegawai di tiap satuan kerja menjadi hal yang penting untuk segera dipenuhi.

Keuangan dan aset juga merupakan bagian yang penting dalam mendukung tercapainya lembaga peradilan yang agung. Kebutuhan standar sarana dan prasarana harus terpenuhi untuk mendukung peningkatan pelayanan prima. Selain itu, untuk mendukung tercapainya WTP maka pelaporan keuangan telah dilakukan dan disampaikan tepat waktu.

B. SARAN

Saran yang dapat disampaikan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung RI yaitu sebagai berikut:

NO.	NAMA	SARAN
1.	Pengadilan Tinggi Palangka Raya	1. Perlunya peningkatan sumberdaya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. 2. Perlunya penambahan pegawai untuk menjaga stabilitas kinerja. 3. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan pelayanan prima.
2.	Pengadilan Negeri Palangka Raya	1. Perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan baik Teknis maupun Non Teknis agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan lancar dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 2. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan pencapaian target pelayanan publik yang prima dan berbasis TI (Teknologi Informasi) 3. Perlu adanya penambahan personil pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, baik itu Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, maupun staf mengingat Sumber Daya Manusia yang dimiliki saat ini masih terbatas.
3.	Pengadilan Negeri Sampit	1. Mohon disediakan anggaran untuk penataan halaman gedung kantor Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB guna peningkatan pelayanan pada masyarakat. 2. Mohon disediakan anggaran untuk rehabilitasi rumah dinas Hakim dan Panitera, pembuatan pagar dan pengadaan rumah dinas Sekretaris. 3. Mohon disediakan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas roda empat maupun roda dua. 4. Perlu penambahan pegawai untuk menjaga stabilitas kinerja.
4.	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	1. Bidang Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB sangat kekurangan pegawai baik untuk staf kepaniteraan ataupun staf kesekretariatan, kekurangan kebutuhan pegawai sementara ini, agar operasional kantor dapat terlaksana sesuai dengan pembagian tugas berdasarkan Tupoksi yang ada, ditempuh dengan memperdayakan Pegawai honorer-honorer yang ada. Selain itu masih adanya jabatan-jabatan yang diisi oleh Plt dan kebutuhan Tenaga Fungsional terkait perkara yang semakin meningkat, mengingat kurang Panitera Pengganti dan masih ada jabatan-jabatan yang kosong antara lain Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

NO.	NAMA	SARAN
		dibutuhkan tambahan tenaga fungsional dan promosi-promosi jabatan untuk mengisi kekosongan itu. 2. Peningkatan pengetahuan Sumber Daya Manusia dipandang perlu rutinitas dilakukan melalui bimbingan teknis, workshop, dan lain-lain, kesempatan demikian dibutuhkan oleh seluruh Hakim dan karyawan, khususnya yang tugas di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B, mengingat perkembangan regulasi Mahkamah Agung terus berkembang serta banyaknya inovasi-inovasi baru dari Mahkamah Agung yang sudah mengimplementasikan teknologi informasi dan hal-hal tersebut membutuhkan bimbingan untuk memahaminya 3. Guna menunjang tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B saat ini masih sangat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana seperti mobil dinas, laptop, scanner dan wifi router. 4. Perlu ada anggaran untuk rehabilitasi gedung PN Pangkalan Bun mengingat semakin berkembangnya standar pelayanan peradilan dan ruangan penunjang juga semakin bertambah, maka dari itu perlu adanya rehabilitasi gedung agar gedung bangunan kantor PN Pangkalan Bun bisa sesuai dengan standar Mahkamah Agung.
5.	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	1. Berdasarkan presentasi perkara dan kegiatan yang tiap tahunnya selalu bertambah perlu adanya penambahan pegawai baru terutama dalam bidang administrasi (kesekretariatan) dan perkara (kepaniteraan) agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat lebih optimal dan maksimal dan tidak ada lagi pegawai yang merangkap jabatan. 2. Untuk menunjang tugas-tugas peradilan perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, baik yang berhubungan dengan perkantoran, perumahan dinas Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris, maupun pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) bagi pejabat struktural dan fungsional agar dapat memperlancar transportasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya. 3. Guna meningkatkan profesionalisme dan mutu kinerja serta memperluas wawasan pegawai baik bagi Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, Pejabat

NO.	NAMA	SARAN
		Struktural, Bendahara dan staf perlu adanya pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan kontinu.
6.	Pengadilan Negeri Muara Teweh	1. Pada saat ini tenaga honorer di Pengadilan Negeri Muara Teweh berjumlah 8 (delapan) orang. Sangat diharapkan Mahkamah Agung RI dapat memberikan perhatian lebih dan dapat mengangkat mereka menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, mengingat kontribusi mereka dalam membantu penyelesaian pekerjaan pegawai Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II. 2. Mengingat hingga saat ini belum ada pegawai Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II yang memiliki kompetensi dalam bidang teknologi informasi, penata laporan keuangan, arsiparis dan pustakawan maka kami mengharapkan agar Mahkamah Agung RI dapat menempatkan beberapa orang pranata komputer, penata laporan keuangan, arsiparis dan pustakawan atau mengadakan bimbingan teknis kepada jajaran Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.
7.	Pengadilan Negeri Buntok	1. Berdasarkan prosentasi perkara dan kegiatan yang tiap tahunnya selalu bertambah perlu adanya penambahan hakim maupun pegawai baru terutama dalam bidang administrasi (kesekretariatan) dan perkara (kepaniteraan) agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat lebih optimal sehingga tidak ada lagi pegawai yang merangkap jabatan. 2. Untuk menunjang tugas-tugas peradilan perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, baik yang berhubungan dengan perkantoran (Genset, AC, PC, dll) maupun pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) bagi pejabat struktural dan fungsional agar dapat memperlancar transportasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya. 3. Untuk menunjang tugas-tugas dalam pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, diperlukan anggaran pembangunan gedung kantor yang memenuhi standar prototype. Di wilayah peradilan umum Kalimantan Tengah, Gedung kantor PN Buntok menjadi satu-satunya yang tidak sesuai standar prototype. 4. Guna meningkatkan profesionalisme dan mutu kinerja Perlu penambahan pegawai untuk menjaga serta memperluas

NO.	NAMA	SARAN
		wawasan bagi hakim dan pegawai perlu diadakan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
8.	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	1. PN Tamiang Layang Kelas II Tahun Anggaran 2019 mendapat anggaran perluasan gedung kantor lanjutan dan telah selesai pada pertengahan Desember 2019, hanya saja sarana prasarana belum ada, diharapkan bisa terpenuhi ditahun anggaran 2021-2022. 2. Terpenuhinya dana untuk operasional kantor antara lain pemeliharaan halaman yang luasnya 6000 M² serta dana pemeliharaan gedung bangunan kantor yang lebih besar untuk kegiatan operasional Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II.
9.	Pengadilan Negeri Kasongan	1. Mohon agar mengadakan bimbingan teknis bagi tenaga fungsional dan kesekretariatan yang ada di Pengadilan Negeri Kasongan. 2. Mohon kiranya ditambah sumber daya manusia di PN Kasongan terutama pada posisi staf untuk bagian kepaniteraan dan kesekretariatan demi terlaksananya Pelayanan Prima kepada masyarakat pencari keadilan. 3. Mohon ditingkatkan sarana dan prasarana terutama pengadaan rumah dinas dan penambahan kendaraan operasional.
10.	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	1. Perlu penambahan pegawai untuk menjaga stabilitas kinerja. 2. Perlu penambahan sarana dan prasarana. 3. Perlu penambahan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana juga untuk pengembangan IT.
11.	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	1. Perlu penambahan pegawai untuk menjaga stabilitas kinerja. 2. Peningkatan pengetahuan sumber daya manusia perlu dilakukan melalui bimbingan teknis. 3. Perlu penambahan sarana dan prasarana seperti kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2(dua), laptop.pc komputer,scanner, wifi router dan meubelair lainnya.
12.	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	1. Perlu penambahan pegawai untuk menjaga stabilitas kinerja. 2. Peningkatan pengetahuan sumber daya manusia perlu dilakukan melalui bimbingan teknis. 3. Perlu penambahan sarana dan prasarana.